POLITIK ISLAM ANTI KOMUNIS

Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal

Buku ini hadir untuk memperlihatkan salah satu episode politik nasional di masa Demokrasi Liberal, yang memperlihatkan peran Partai Masyumi menghadapi Partai Komunis Indonesia antara 1950 sampai dengan 1957. Cukup banyak buku yang telah membicarakan peran Masyumi ataupun gerakan komunis (PKI). Namun, buku ini secara khusus ingin melihat sisi lain dari pergumulan kedua kekuatan penting dalam sistem politik saat itu. Bagaimana pertarungan wacana dan ideologi antara keduanya adalah sisi penting lain yang layak dicatat.

ISBN 979976614-1

SAMSURI POLITIK ISLAM ANTI KOMUNIS

SAMSURI

POLITIK ISLAM ANTI KOMUNIS

Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal

Safiria Insania Press

POLITIK ISLAM ANTI KOMUNIS

Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal

Samsuri

POLITIK ISLAM ANTI KOMUNIS

Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

POLITIK ISLAM ANTI KOMUNIS
Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal
Samsuri

Penulis : Samsuri
Penyunting : Suyanto
Penerbit : Safiria Insania Press bekerja sama dengan Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Alamat : Jl. Ring Road Timur No. 39 Nanggulan RT. 14 RW 19, Maguwoharjo Yogyakarta.
Telp/Fax (0274) 484584
E-mail: safiria_insania@plasa.com

Cetakan Pertama, Maret 2004
x + 128 hlm., 15 x 21 cm
ISBN ~ 979 97661 4 1

PENGAKUAN

"KOMUNISME" nampaknya akan selalu menarik untuk dikaji dari perspektif manapun di Indonesia. Meskipun masyarakat internasional sudah enggan membicarakan apalagi memikirkan soal ancaman komunisme setelah Perang Dingin berakhir, bahkan Republik Rakyat Cina sebagai negara komunis kini telah mentransformasikan sistem ekonominya ke dalam mekanisme pasar (kapitalisme), namun di Indonesia terminologi "bahaya komunisme" terus-menerus dipertahankan semenjak rezim Soeharto hingga rezim sekarang. Seolah-olah komunisme adalah "hantu-jahat" yang menakutkan yang harus dipertahankan untuk menghancurkan kekuatan politik anti *status quo*.

Buku ini hadir semata-mata untuk memperlihatkan salah satu episode politik nasional di masa Demokrasi Liberal, yang memperlihatkan peran Partai Masyumi

menghadapi Partai Komunis Indonesia antara 1950 sampai dengan 1957. Cukup banyak buku yang telah membicarakan peran Masyumi ataupun gerakan komunis (PKI). Namun, buku ini secara khusus ingin melihat sisi lain dari pergumulan kedua kekuatan penting dalam sistem politik saat itu.

Bagian besar materi buku ini berasal dari tesis penulis di Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000. Perlu dikemukakan di sini bahwa materi "Pendahuluan" dan Bab I sebagian besar pernah dimuat dalam *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 1, No. 1, 2001. Untuk ini, penulis mohon maaf kepada para pembaca apabila buku masih agak berbau teknis tesis, meskipun sudah dirombak di sana-sini oleh penyunting.

Penulis merasa berhutang budi kepada (alm.) Herbert Feith dan Betty Feith yang secara tulus dan ikhlas telah memberi semangat, bantuan moral dan material yang tak terhingga jumlahnya kepada penulis selama mereka berdua di Yogyakarta. Kepada mereka berdua, karya ini dihaturkan. Ucapan terimakasih disampaikan pula kepada Lance Castles, yang dengan budi baiknya penulis merasakan vitalitas dan suasana akademik selama tinggal bersama beliau di Yogyakarta. Ucapan terimakasih perlu disampaikan kepada Barbara Leigh yang telah memberikan bantuan biaya penelitian kepada penulis ketika itu.

Ucapan terimakasih patut disampaikan kepada Prof. Dr. Faisal Ismail, M.A. (Guru Besar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekarang Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI) yang telah bersedia menjadi pembimbing tesis penulis. Kepada almamater MSI UII Yogyakarta, ucapan terimakasih patut disampaikan di sini. Ucapan terimakasih selayaknya dihaturkan kepada banyak pihak yang telah membantu penulis yang tak bisa disebutkan satu per satu.

Alhamdulillah. Kepada Gini Pratigina dan Alifah Irene Mernissi, penulis tak henti-hentinya berterima kasih kepada keduanya. Dengan cinta dan kasih sayang keduanyalah, penulis mampu bertahan dan bergerak menjalani dinamika kehidupan.

Penulis sangat menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, semoga buku ini berguna bagi para pembaca.

Yogyakarta, Februari 2004
Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

PENDAHULUAN

PERGUMULAN Islam dan Komunisme di Indonesia telah mewarnai perjalanan sejarah modern bangsa ini. Sejak komunisme mulai berkembang pada sekitar 1916 – 1920, hubungan lama yang menyejarah antara Islam dan Komunisme, baik pada masa revolusi fisik ataupun di periode sesudahnya, telah banyak menyita perhatian banyak akademisi.[1] Di masa sekarang, polemik pro-kontra, terutama di kalangan Islam tentang Komunisme menjadi daya tarik tersendiri untuk dikaji di era pasca Perang Dingin, terutama setelah pernyataan permohonan maaf Abdurrahman Wahid ketika masih menjabat sebagai Presiden pada awal tahun 2000 terhadap orang-orang yang menjadi korban penumpasan peristiwa G30S/PKI[2] serta usulan agar larangan terhadap ajaran Komunisme yang tercantum dalam Tap MPRS No. XXV tahun 1966[3] dicabut. Usulan tersebut kemudian menimbulkan

pro dan kontra di kalangan masyarakat untuk beberapa lama.[4]

Sikap pro dan kontra di kalangan Islam terhadap Komunisme sebenarnya dapat dipelajari kembali dari perjalanan politik di Indonesia pasca-kemerdekaan hingga akhir era Demokrasi Liberal tahun 1957. Selama era Demokrasi Liberal tersebut terdapat pergumulan penting yang dilakukan oleh kelompok Muslim dengan kelompok Komunis.

Sistem kepartaian yang mendukung kehidupan Demokrasi Liberal mendapat ruang geraknya setelah Maklumat Pemerintah yang ditandatangani Wakil Presiden Republik Indonesia Mohammad Hatta, dikeluarkan pada tanggal 3 November 1945, tentang pembentukan partai-partai di Indonesia. Melalui maklumat itulah lahir banyak partai politik yang mewakili berbagai aliran ideologi-politik yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat.[5]

Bagi umat Islam, maklumat tersebut merupakan peluang untuk membentuk partai politik Islam. Kemudian dibentuklah Partai Masyumi yang direncanakan sebagai satu-satunya partai politik Islam berdasar keputusan Konggres Umat Islam di Yogyakarta pada tanggal 7 – 8 November 1945.[6]

Sebelumnya pernah berdiri Masyumi buatan Jepang pada bulan Oktober 1943.[7] Berbeda dengan Masyumi buatan Jepang yang oleh Pemerintah Pendudukan Jepang dijadikan sebagai alat untuk mengkooptasi umat Islam demi kepentingannya sendiri, Masyumi hasil Konggres Yogyakarta dimotivasi oleh keinginan untuk menjadikan Masyumi sebagai partai politik tunggal Islam yang dapat menyalurkan aspirasi politik umat.[8]

Suasana revolusi yang sedang bergolak di Indonesia pada awal-awal kemerdekaan dan persaingan dengan berbagai kelompok ideologi, yaitu Nasionalisme dan Marxisme/Sosialisme dari partai-partai baru tersebut, telah mendorong

tokoh-tokoh politik dan pergerakan sosial keagamaan Islam Indonesia yang telah aktif semenjak zaman pergerakan nasional untuk membentuk "partai tunggal" Islam di Indonesia. "Partai Tunggal" ini, yaitu Masyumi, akan menghimpun semua potensi kekuatan politik Islam. Dengan demikian, partai itu akan memiliki sifat pluralisme di dalamnya, tampak dari ragam aliran pemikiran keagamaan anggota-anggota Masyumi, seperti tercermin dalam suasana federatif keanggotaan istimewa yang terdiri atas organisasi sosial keagamaan, yaitu Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Persatuan Umat Islam (PUI), Al Irsyad, Jam'iyatul Wasliyah, Al Ittihadiyah, dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).[9]

Pandangan dasar modernisme Masyumi yang secara positif memandang pluralisme telah mendorong Masyumi untuk bersikap terbuka. Keterbukaan itu tampak dalam kesediaannya untuk bekerjasama dengan golongan lain dalam mencapai tujuan Masyumi. Kerjasama ini pada awalnya dilakukan secara luas dan tanpa batas, sehingga di zaman revolusi itu pun Masyumi bersedia juga bekerjasama dengan golongan Komunis beraliran Trotskyis di bawah pimpinan Tan Malaka.[10]

Kerjasama Masyumi dengan PKI, yaitu Komunis beraliran Stalinis di bawah pimpinan Muso, sedikit sekali. Pada waktu sekelompok orang PKI mencoba untuk merebut kekuasaan, yang dimulai dari Madiun pada 18 September 1948, para pemimpinnya mendesak rakyat untuk menentang "Kabinet Masyumi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta." Kaum Komunis menuduh bahwa Hatta dan tokoh-tokoh Masyumi adalah "borjuis" dan "antek imperialis Amerika." Menurut tokoh-tokoh Komunis, berharap kepada "kemurahan hati Amerika" dalam menyelesaikan sengketa Indonesia-

Belanda adalah "harapan sia-sia," karena Amerika Serikat juga imperialis. Satu-satunya jalan yang mungkin bagi Indonesia untuk menang melawan Belanda adalah jika Indonesia bersekutu dengan Uni Soviet. Negara Komunis ini, menurut Muso telah "anti-imperialisme dan kolonialisme."[11]

Perang pamflet dan perkelahian antara pendukung Masyumi dan pendukung FDR (Front Demokrasi Rakyat)[12] yang beraliran Komunis dan dipimpin oleh Muso itu menjadi sengit setelah Agustus 1948. Akhirnya, meletuslah "Pemberontakan Komunis di Madiun" pada tanggal 18 September 1948. Bendera merah putih diturunkan dan kemudian digantikan dengan bendera "palu arit". Dalam pemberontakan itu, ribuan rakyat, polisi, dan pasukan yang anti Komunis terbunuh.[13] Begitu juga banyak orang yang mendukung Komunis juga ikut terbunuh.

Masyumi mengutuk keras pemberontakan FDR, dan menuduh kaum Komunis sebagai "pengkhianat terhadap bangsa dan negara." Sejak peristiwa itu pula, Masyumi mulai mengganti sikapnya dalam bekerjasama dengan kaum Komunis ke arah yang sangat *rigid*. Ada yang berdalih bahwa bekerjasama dengan "kaum anti Tuhan, anti agama, dan anti demokrasi" tidak boleh dilakukan untuk selama-lamanya.[14] Sikap-sikap permusuhan antara Masyumi dan kaum Komunis, yang kemudian ditujukan secara langsung kepada PKI, berlanjut hingga Masyumi itu terpaksa membubarkan diri pada tahun 1960.[15]

Sikap permusuhan Masyumi terhadap PKI antara lain ditujukan pada sikap politik PKI yang telah menghalalkan segala cara, dan prinsip-prinsip Komunisme yang dianut PKI berlawanan secara diametral dengan prinsip-prinsip keagamaan yang dianut oleh Masyumi. Pernyataan bahwa PKI pada 1954 menerima Pancasila sebagai dasar negara, bagi

Masyumi merupakan suatu hal yang aneh dan tidak mungkin sepenuh hati, karena Komunisme pada dasarnya tidak mengakui adanya Tuhan. Karena itulah, Muhammad Rusjad Nurdin dari Masyumi mempertanyakan di Konstituante apakah kaum Komunis menerima Pancasila dengan sebenar-benarnya atau hanya di lidah saja. Mengutip pasal 13 Program Partai Komunis Rusia, bahwa "tiap-tiap anggota Partai Komunis tidak boleh beragama dan diharuskan mengambil bagian dengan giat untuk menghentikannya,"[16] Muhammad Rusjad Nurdin menandaskan bahwa "tidaklah mungkin Partai Komunis Indonesia (PKI) dapat menerima Pancasila yang memuat pada sila pertamanya Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, yang ditentang oleh Komunisme."[17]

Dengan mencermati persoalan tersebut, beberapa pokok pikiran penting yang ingin diurai dalam buku ini antara lain bagaimanakah wacana ideologi Masyumi tentang Komunisme yang diperjuangkan PKI. Pertanyaan ini diharapkan dapat menjawab persoalan selanjutnya tentang bentuk-bentuk perjuangan Masyumi menghadapi PKI pada era Demokrasi Liberal. Implikasi yang diharapkan tentunya adalah adanya formulasi dan implikasi dari perjuangan Masyumi dalam menghadapi PKI selama era Demokrasi Liberal. Seluruh proses perjuangan Masyumi menghadapi komunisme tersebut dilihat dalam perspektif pendidikan politik untuk rakyat Indonesia oleh Masyumi. Dalam konteks ini, maka relevansi buku ini selain untuk menyingkap dinamika sejarah itu, adalah juga untuk mewarisi dan mencermati strategi pendidikan politik yang diterapkan oleh Masyumi.

Catatan :

[1] Kajian akademik hubungan antara Islam dan Komunisme di Indonesia antara lain untuk menyebut beberapa nama, dapat dicermati dalam Timur Jaylani, *The Sarekat Islam Movement: Its Contribution to Indonesian Nationalism,* Tesis MA (Montreal: McGill University, 1959), H.J. Benda dan Ruth T. McVey (penyunting dan penerjemah), *The Communist Uprising of 1926 – 1927 in Indonesia: Key Documents,* (Ithaca: Cornell University Press, 1960), Deliar Noer, *Masjumi: Its Organization, Ideology, and Political Role in Indonesia,* Tesis MA (Ithaca: Cornell University, 1960), Arnold C. Brackman, *Indonesian Communism: A History,* (New York: Frederick A. Praeger, 1963), Ruth C. McVey, *The Rise of Indonesian Communism,* (Ithaca: Cornell University Press, 1965), Takashi Siraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912 – 1916,* alih bahasa Hilmar Farid (Jakarta: Grafiti Press, 1997), dan Soe Hok Gie. *Di Bawah Lentera Merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917 – 1920,* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999). Kajian akademik dimaksud adalah proses keilmuan yang menghasilkan penelitian-penelitian kritis hubungan Islam-Komunisme di Indonesia.

[2] Permohonan maaf mantan Presiden Abdurrahman Wahid ini disampaikan pada saat pidato Pembukaan Konggres I PDI-P tanggal 27 Maret 2000. Lihat, "Presiden Buka Konggres PDI-P, Pemerintah Usulkan Pemilihan Presiden Langsung," *Kompas,* (28 Maret 2000), hlm. 1 dan 11.

[3] Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme. Ada dua alasan PKI dan paham Komunisme/ Marxisme-Leninisme dilarang, (1) paham Komunisme/ Marxisme-Leninisme dinyatakan bertentangan dengan Pancasila, dan (2) orang-orang dan golongan yang menganut paham tersebut, khususnya PKI dikatakan beberapa kali telah berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan. Lihat, Keputusan-Keputusan M.P.R.S Sidang Umum ke-IV 20 Djuni – 6 Djuli 1966 (Yogyakarta: U.P Indonesia, 1966), hlm. 96.

[4] Pendapat pro dan kontra dapat dibaca antara lain dalam "Seputar Penghapusan Tap MPRS No XXV", *Suara Merdeka* (8 April 2000), hlm. XI.

[5] Partai-partai tersebut antara lain Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) berdiri pada 7 November 1945, PKI (Partai Komunis Indonesia) berdiri pada 7 November 1945 yang sebelumnya telah didirikan pada 21

Oktober 1945, Partai Rakyat Jelata berdiri pada 8 November 1945, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) berdiri pada 10 November 1945, Partai Sosialis Indonesia berdiri pada 10 November 1945, Partai Rakyat Sosialis tanggal 20 November 1945, Partai Katolik Republik Indonesia berdiri pada 8 November 1945, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia berdiri pada 17 Desember 1945 dan PNI (Partai Nasional Indonesia) berdiri pada 29 Januari 1946 sebagai hasil fusi antara PRI (Partai Rakyat Indonesia), Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia), dan Serikat Rakyat Indonesia yang masing-masing berdiri pada bulan November dan Desember 1945. Lihat Sekretariat negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka,* jilid I (Jakarta: Pt. Citra Lamtoro Gung Persada, 1985), hlm. 55 – 56 dan George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia,* (Ithaca: Cornell University Press, 1952), hlm. 156 – 161.

[6] Abu Barkat, "Peristiwa Penting Bagi Umat Islam Indonesia 17-8-1945 – 17-8-1951," *Suara Partai Masjumi,* No 8-9, th ke-6 (Agustus – September 1951), hlm. 14 dan 16, Ahmad Sayafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dan Konstituante,* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 110.

[7] *Ibid.*

[8] Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-I-Islami (Pakistan),* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999), hlm. 62.

[9] Anggota asli Masyumi adalah NU, Muhammadiyah, PUI, dan Perikatan Umat Islam. Dua organisasi yang disebut terakhir ini kemudian bergabung menjadi satu organisasi PUSI (Persatuan Umat Islam Indonesia). Persis, PUSA, dan Jam'iyatul Wasliyah, menjadi anggota istimewa pada tahun 1949 dan Al Ittihadiyah pada tahun 1951. Pada akhirnya, NU keluar sebagai anggota istimewa Masyumi dan menjadikan dirinya sebagai partai politik baru pada tahun 1952, mengikuti jejak Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) yang keluar sebelumnya pada bulan Juli 1947, sebagai akibat ketidakpuasan dengan dominasi kaum modernis di dalam kepemimpinan Masyumi. Lihat Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme,* hlm. 183 – 184, dan Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan,* hlm. 115.

[10] Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme,* hlm. 82.

[11] *Ibid.*, hlm. 82-83. Lihat pula uraian menarik tentang Muso dan Front Demokrasi Rakyat (FDR) dalam Pemberontakan Madiun itu sebagai

reaksi terhadap Kabinet Hatta dan Masyumi, dalam Soe Hok Gie, *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September 1948*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997), hlm. 161-231.

[12] Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti), hlm. 184. FDR ini terutama didukung oleh organisasi politik Sayap Kiri, antara lain Partai Sosialis Indonesia (Parsi-Amir Sjarifuddin), Partai Buruh, dan PKI. Lihat Soe Hok Gie, *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan*, hlm. 215.

[13] Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme*, hlm. 83-83.

[14] *Ibid.*, hlm. 84.

[15] Deliar Noer, *Partai Islam*, hlm. 184. Perintah resmi pembubaran Masyumi (dan Partai Sosialis Indonesia/ PSI-Sjahrir) menurut Keputusan Presiden No. 200/1960, pada tanggal 19 Agustus 1960, terutama karena keterlibatan beberapa tokoh penting Masyumi dan PSI dalam Pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera Barat mulai Februari 1958. Lihat pula Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, hlm. 187-192.

[16] Ide bagian kalimat ini berasal dari Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999) hlm. 69 dengan pengecekan langsung kepada sumber primernya, yaitu "Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante", (Bandung: Konstituante Republik Indonesia, 1958), hlm. I: 415.

[17] *Ibid.*

BAB I

KOMUNISME DALAM WACANA IDEOLOGI MASYUMI

A. Latar Ideologis Pembentukan Masyumi

Cara pandang terhadap sejarah sebuah gerakan, baik bersifat sosial, pendidikan, maupun politik, dengan melihat motif atau tujuan dan latar kondisi sosio-ideologis-politis gerakan tersebut adalah sangat penting. Dengan begitu, maka akan diketahui secara jelas bagaimana paradigma, asumsi nilai, pemikiran, dan ideologi untuk mencapai tujuan gerakan tersebut dibangun oleh para tokoh pendiri atau pengambil inisiatif.

Sejarah pembentukan Masyumi pun tidak terlepas dari motif dan faktor-faktor yang melatarinya. Suasana revolusi dan persaingan berbagai kelompok ideologi di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, serta peran tokoh-tokoh yang mengambil inisiatif ikut mewarnai pembentukan Masyumi.

"Partai Politik Islam Indonesia Masyumi" didirikan dan diikrarkan sebagai satu-satunya partai politik Islam pada 7 November 1945 berdasarkan Keputusan Kongres Umat Islam di Yogyakarta yang diselenggarakan 7 – 8 November 1945, bertepatan dengan 1 – 2 Dzulhijjah 1346 H. Inisiatif pembentukan Masyumi berasal dari sejumlah tokoh partai politik dan gerakan sosial keagamaan Islam sejak zaman pergerakan,[1] seperti Agus Salim, Prof. Abdul Kahar Muzakkir, Abdul Wachid Hasjim, Mohammad Natsir, Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Ki Bagus Hadikusumo, Mohammad Mawardi, dan Dr. Abu Hanifah.[2] Organisasi-organisasi para tokoh tersebut ada yang meleburkan diri atau kemudian menjadi penopang utama sebagai anggota istimewa Masyumi.[3]

Keputusan membentuk Masyumi oleh sejumlah tokoh Islam itu tidak sekedar sebagai keputusan tokoh-tokoh tersebut, tetapi keputusan dari seluruh umat Islam melalui utusan wakil-wakil mereka.[4] Penilaian ini cukup beralasan apabila Masyumi dilihat dari susunan kepengurusannya, yang mencerminkan wakil-wakil sejumlah partai politik dan gerakan sosial keagamaan Islam, sebagai berikut:

A. Majelis Syura (Dewan Partai)
Hadratus Syeikh KH. Hasjim Asj'ari (NU), Ketua Umum
Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah), Ketua Muda I
KH. Wahid Hasjim (NU), Ketua Muda II
Mr. Kasman Singodimedjo (Muhammadiyah), Ketua Muda III

Anggota:
RHM Adnan (Persatuan Penghulu dan Pegawainya, PPDP)

H. Agoes Salim (Penjadar)
KH. Abdul Wahab (NU)
KH. Sanusi (PUI)
KH. Abdul Halim (PUI)
Syekh Djamil Djambek (Majelis Tinggi, MIT)

B. Pengurus Besar
Dr. Sukiman Wirjosandjojo (Partai Islam Indonesia, PII), Ketua
Abikusno Tjokrosujoso (PSII), Ketua Muda I
Wali Alfatah (PII), Ketua Muda II
Harsono Tjokroaminoto (PSII), Sekretaris I
Prawoto Mangkusasmito (Muhammadiyah), Sekretaris II
Mr. RA Kasmat (PII), Bendahara.

Pimpinan Bagian:
Bagian Penerangan:
Wali Alfatah (PII)

Bagian Barisan Sabilillah dan Hizbullah:
KH. Masjkur (NU)
W. Wondoamiseno (PSII)
H. Hasjim (Muhammadiyah)
Sulio Hadikusumo (Jong Islamiten Bond, JIB)

Bagian Keuangan:
Mr. RA Kasmat (PII)
R. Prawiro Juwono (Muhammadiyah)
H. Hamid BKN (Muhammadiyah)
Harsono Tjokroaminoto (PSII)

Anggota-anggota:
KH. Dahlan (NU)
HM Farid Ma'ruf (Muhammadiyah)
Junus Anis (Muhammadiyah)
KH. Fathurrachman (NU)
Dr. Abu Hanifah
Mohammad Natsir (Persis)
SM Kartosuwirjo (PSII Baru)
Anwar Tjokroaminoto (PSII)
Dr. Sjamsuddin (Muhammadiyah)
Mr. Mohammad Roem (Penjadar).[5]

Keterwakilan tokoh-tokoh berbagai organisasi Islam dalam Masyumi mencerminkan sifat pluralisme sebagai "partai tunggal Islam" yang menghimpun semua potensi kekuatan politik Islam. Motif itu, menurut Yusril Ihza Mahendra, didorong oleh pandangan-pandangan dasar modernisme yang positif dan optimis dalam memandang pluralisme.[6] Perbedaan pandangan sebagai rahmat Tuhan, karena perbedaan itu "tidak bersifat fundamental", tetapi hanya berhubungan dengan masalah *furu'iyah* (perkara-perkara kecil).[7] Tidaklah mengherankan apabila pada akhirnya tokoh-tokoh tersebut mengambil inisiatif dalam pembentukan Masyumi guna menyatukan golongan-golongan Islam ke dalam satu partai politik yang kuat.[8]

Perkara-perkara besar yang dipandang perlu dan mendesak dilakukan menurut para pembentuk Masyumi adalah menyikapi suasana "revolusi Indonesia" dan persaingan berbagai ideologi politik dalam masyarakat Indonesia.[9] Suasana revolusi sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Suasana ini tampak mempengaruhi rumusan tujuan

dan urgensi program Masyumi yang kelihatan sangat patriotik dan nasionalistik. Tujuan Masyumi pada Kongres Umat Islam itu adalah "Menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan Agama Islam," dengan senantiasa "Melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan."[10] Pencapaian tujuan itu kemudian diterjemahkan oleh Masyumi dengan merumuskan program kerja sebagaimana terbaca pada paparan berikut:

A. Program Dalam Negeri

1. Memperkuat persiapan umat Islam untuk berjihad fi Sabilillah,
2. Memperkuat barisan pertahanan Negara Indonesia dengan berbagai usaha yang diwajibkan oleh Agama Islam
3. Menyesuaikan susunan dan sifat Masyumi sebagai Pusat Persatuan Umat Islam Indonesia, sehingga dapat menggerakkan dan memimpin perjuangan Umat Islam Indonesia seluruhnya.
4. Menghormati dan menghargai jasa para pahlawan, terutama angkatan muda, baik yang tewas maupun yang tidak, dalam perjuangan menegakkan kedaulatan negara.
5. Memohonkan kepada Pemerintah Republik Indonesia supaya mendesak kaum Sekutu menyegerakan perlucutan senjata tentara Jepang dan pengembaliannya, agar bala tentara Sekutu dapat segera pulang ke negaranya.

B. Program Luar Negeri

Menyampaikan putusan ini kepada dunia pada umumnya dan Dunia Islam pada khususnya.[11]

Penjajahan yang dialami bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, telah membawa penderitaan yang sangat berat. Kolonialis Belanda bersama Inggris yang datang seusai proklamasi kemerdekaan Indonesia, telah melakukan "provokasi-provokasi yang senantiasa diarahkan kepada daulat kekuasaan Republik Indonesia dan kemerdekaan bangsa dan agama."[12] Menurut Keputusan Muktamar Pertama Masyumi di Solo pada 1946, imperialisme Belanda menjajah kembali Indonesia telah *"memaksa ... Umat Islam berjuang dalam cara Sabilillah, yakni meninggikan kalimah Allah yang sedang direndah-hinakan dalam pergaulan waktu (revolusi) ini. Bagaimanapun, Umat Islam di bawah pimpinan Masyumi ....telah bulat niat dan tekadnya untuk tetap memiliki negara yang merdeka 100% dan oleh karenanya tidak akan menerima putusan dari siapapun juga yang tak dapat mencukupi tujuan Masyumi...."*[13] Usaha Masyumi untuk mewujudkan tekad tersebut ialah, pertama dengan peperangan kemerdekaan." Kedua, ikut dalam proses penyusunan pemerintah, yaitu anggota Masyumi terlibat di Kabinet, parlemen, dan jabatan-jabatan administrasi pemerintahan. Ketiga, "perjuangan diplomasi" di meja perundingan hingga dicapai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 7 Desember 1949.[14]

Pada usaha pertama telah dibentuk "Barisan Hizbullah bagi para pemuda Islam dan Sabilillah bagi segenap Muslimin dan Muslimat."[15] Terhadap usaha kedua, Masyumi mendukung usaha demokrasi untuk "...mewujudkan susunan negara yang berdasar kedaulatan Rakyat dan masyarakat berdasar keadilan menurut ajaran Islam..." Perwujudan kedaulatan rakyat itu dengan "...adanya hak pilih dan dipilih yang umum dan langsung."[16] Usaha ketiga, selain untuk mendapat pengakuan internasional atas kedaulatan Republik Indonesia, Masyumi juga berupaya agar pemerintah Indonesia menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.[17] Sikap politik luar negeri Masyumi dipertegas oleh *Manifest Politik 1947*, bahwa Masyumi "....berusaha supaya politik umat Islam dapat menempatkan negara Republik Indonesia berdampingan dengan negara-negara Demokrasi, terutama yang berkuasa atau berpengaruh di Pasifik, dan menentang politik yang mungkin dapat merugikan haluan politik itu...."[18]

Proses pembentukan dan mempertahankan kedaulatan negara baru dalam suasana revolusi telah menimbulkan pertarungan kepentingan dari berbagai kelompok yang saling bersaing memperebutkan kekuasan dan pengaruh. Persaingan ini pada gilirannya melibatkan pertarungan kelompok ideologi utama yang telah tumbuh sejak awal zaman pergerakan, yaitu kelompok Islam, Nasionalisme Sekuler, dan Komunisme.[19]

Persaingan aliran ideologi politik mendapat ruang geraknya, terutama setelah Maklumat Pemerintah yang ditandatangani Wakil Presiden Republik Indonesia Mohammad Hatta. Melalui maklumat itulah lahir partai-partai politik yang tumbuh di masyarakat.[20] Bahaya persaingan ideologi politik ini dirasakan juga oleh Masyumi, sehingga dalam *Manifest Politik 1947* ditegaskan perlu "....(2) Menambah tersebarnya ideologi Islam di kalangan masyarakat Indonesia, dengan tidak menghalangi pihak lain yang sejalan memperkokoh sendi ke-Tuhanan Yang Maha Esa; (3) Membentengi jiwa umat Islam dari infiltrasi ideologi-ideologi yang bertentangan dengan agama Islam dengan tekad fi sabilillah."[21]

Latar ideologis Masyumi juga dipengaruhi oleh suasana internasional pasca Perang Dunia II, yang pada gilirannya melahirkan bentuk perang baru berupa Perang Ideologi yang kemudian dikenal dengan sebutan Perang Dingin. Perang ini melibatkan dua kubu ideologi pemenang Perang Dunia II, yaitu Blok Barat yang terdiri atas Amerika Serikat dan Negara-

negara Eropa Barat yang memperjuangkan Kapitalisme, sedangkan Blok Timur yang terdiri atas Uni Soviet beserta Negara-negara Eropa Timur yang memperjuangkan Komunisme.[22]

Pertarungan dua kubu ideologi ini juga memiliki pengaruh terhadap keberpihakan politik internasional partai-partai politik di Indonesia masa revolusi tersebut. Bagi Masyumi, sebagaimana diulas di atas, lebih memilih politik luar negeri bebas-aktif untuk tidak terikat dan memihak salah satu dari kedua blok Perang Dingin. Menurut pernyataan Abu Habifah, salah seorang anggota DPP Masyumi, dalam Muktamar V Masyumi di Jakarta pada 7 – 31 Januari 1951, bahwa "...Politik bebas Indonesia, berarti mengalirkan politik luar negeri dengan aktif dan sadar kepada politik damai di dunia dan politik damai terhadap segala bangsa dan negara di Indonesia."[23] Politik luar negeri ini juga mensyaratkan adanya pengakuan internasional terhadap kedaulatan Republik Indonesia sebagai negara baru merdeka, sehingga terbina kerjasama di lapangan internasional untuk menciptakan kemakmuran, keadilan, dan perdamaian dunia, terutama dengan negara-negara Islam.[24] Dengan demikian, kondisi itu dapat terwujud apabila terdapat "kedudukan sama harga (sederajat) di antara bangsa-bangsa merdeka lainnya dalam pergaulan internasional."[25]

B. Islam di Antara Kapitalisme dan Komunisme

Pilihan Islam sebagai ideologi Partai Masyumi adalah sejalan dengan latar pembentukan Masyumi itu sendiri. Cita Islam sebagai ideologi Masyumi tampak dari rumusan tujuan pertama kali yang diputuskan Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta, 7 – 8 November 1945, yaitu "Pasal II (1)

Menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan Agama Islam (2) melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan ketatanegaraan."[26]

Tujuan ini dipertegas dalam pasal III, yaitu:

a. Menginsafkan dan memperluaskan pengetahuan serta kecakapan umat Islam Indonesia dalam perjuangan politik.
b. Menyusun dan memperkokoh barisan umat Islam untuk berjuang mempertahankan agama dan kedaulatan Negara.
c. Melaksanakan kehidupan sosial rakyat berdasarkan Iman dan Taqwa, perikemanusiaan sosial, persaudaraan dan persamaan hak menurut ajaran Islam
d. Bekerja bersama-sama dengan lain golongan dalam lapangan perjuangan menegakkan kedaulatan Negara.[27]

Tujuan Masyumi tersebut tampak didasari oleh pemikiran bahwa di dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan agama dengan urusan politik (Negara).[28] Dengan demikian, "menegakkan Islam tak dapat dipisahkan dari menegakkan masyarakat, menegakkan negara, menegakkan kemerdekaan."[29] Pemisahan antara agama dengan politik mungkin tepat bagi agama-agama lain di luar Islam, terutama agama Kristen (Katolik) yang mengenal teori "caesaro-papisme."[30] Bagi Mohammad Isa Anshari, salah satu tokoh penting di Masyumi, pemikiran politik sekuler ini merupakan warisan *"cultural imperialism"* yang dibawa oleh agen imperialis, yaitu kelompok aliran "kafir" (yang menolak kebenaran dan kenyataan agama), "aliran netral" yaitu kelompok paham nasionalisme (yang tidak memedulikan agama), dan "aliran munafik"(yang lebih berbahaya daripada aliran kafir).[31]

Perkembangan berikutnya, penjelasan Islam sebagai ideologi Masyumi dipertegas dengan *Tafsir Azas* yang diputuskan oleh Muktamar VI Masyumi di Jakarta, pada 24 – 30 Agustus 1952. Di dalam *Tafsir Asas*, tampak sekali sikap penolakan Masyumi terhadap Kapitalisme yang diperjuangkan Blok Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat dan Komunisme yang diperjuangkan Blok Timur pimpinan Uni Soviet-Rusia.[32] Baik Kapitalisme maupun Komunisme, keduanya adalah paham kebendaan (materialisme), "yang mengutamakan harta daripada manusia, dan oleh sifat dan tabiatnya menguatkan asas berebut hidup, dan memenangkan kekuatan daripada hak kebenaran,"[33] sehingga dipandang "bertentangan dengan perintah dan ajaran Islam."[34]

Dalam tinjauan Islam, menurut Sjafruddin "bukanlah Komunisme yang akan menang, juga bukan Kapitalisme, tapi dalam pergolakan paham dan ideologi di masa sekarang ini akhirnya Islam lah yang akan tampil ke muka dan bertindak sebagai juru-pisah.....[35] Alasannya, pertama karena ajaran-ajaran dan sifat-sifat Islam. Kedua, berdasarkan sejarah Islam."[36]

Sjafruddin Prawiranegara, salah seorang ideolog dan konseptor *Tafsir Asas* Masyumi,[37] menyatakan bahwa "Islam merupakan kompromis antara Komunisme dan Kapitalisme."[38] Beberapa persamaan antara Islam dengan marxisme-Komunisme adalah mengenai "keadilan sosial, pengakuan adanya kelas dan golongan di dalam masyarakat."[39] Persamaan inilah yang menyebabkan antara golongan komunis dan Islam dapat berdampingan melawan imperialisme-Kapitalisme Belanda di zaman pergerakan, sehingga hampir sebagai suatu blok, "(keduanya)...tidak kelihatan siapa komunis yang tulen dan siapa kaum Muslimin yang asli. Berjuang bersama-sama, di-"Digul"kan bersama-sama."[40]

Dari beberapa persamaan, ternyata ada banyak perbedaan mendasar antara Islam dengan Komunisme. Di antara perbedaan tersebut, antara lain, dapat dilihat pada persoalan perjuangan kelas dan pengakuan hak individual. Menurut Sjafruddin, Islam tidak menyetujui adanya perjuangan kelas seperti kaum Marxis untuk membela kaum lemah (proletar), dan tidak mungkin menghapuskan satu golongan (kapitalis), tapi hanya meringankan penderitaan kaum lemah, miskin, dan tertindas dengan meletakkan tanggung jawab yang berat kepada golongan/kelas yang mempunyai kecukupan materi. Terhadap individu, Komunisme mengabaikan individualitas manusia, tetapi menitikberatkan kepada pertentangan-pertentangan di dalam masyarakat. Pada bagian lain, Sjafruddin Prawiranegara menjelaskan bahwa penghargaan terhadap potensi individual; diakui oleh Kapitalisme, hanya saja penghargaan tersebut tidak ada batasnya, sehingga memunculkan adanya liberalisme-Kapitalisme.[41] Berbeda dengan Marxisme yang tidak mengakui individualitas, maka letak Islam adalah di tengah-tengah antara Kapitalisme dan Marxisme.[42]

Terhadap kedua ideologi di luar Islam itu, Sjafruddin Prawiranegara menyimpulkan bahwa sebenarnya "Kapitalisme dan Komunisme adalah sama."[43] Kesamaan itu antara lain karena Komunisme sebenarnya merupakan bentuk lain Kapitalisme seperti yang tampak di Uni Soviet.[44] Selain itu, Kapitalisme dan Komunisme berasal dari atau sangat dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi. Sjafruddin mencontohkan bahwa Karl Marx adalah seorang keturunan Yahudi, di mana ayahnya seorang *rabbi* (pendeta Yahudi), sehingga "agama Komunisme" direduksi sebagai bentuk pembaharuan agama Yahudi.[45] Pendapat Sjafruddin ini tentu saja tidak begitu mengejutkan, tetapi kesimpulannya yang

menyederhanakan sedemikian rupa antara Karl Marx sebagai keturunan Yahudi dengan pemikirannya yang kemudian dikenal dengan Komunisme/Marxisme adalah persoalan tersendiri. Pendapat ini tampaknya banyak dipengaruhi oleh situasi perang Arab-Israel setelah berdirinya negara Israel pada bulan Mei 1948, di mana, baik Amerika Serikat sebagai agen Kapitalisme maupun Uni Soviet sebagai agen utama Komunisme sama-sama menyokong terbentuknya negara Israel.

Dalam penjelasan yang tidak jauh berbeda, menurut Mohammad Natsir, kesamaan antara Kapitalisme dan Komunisme itu dapat dilihat pada masalah kebebasan manusia untuk mencapai kemakmuran, yaitu:

"Komunisme dalam mencapai kemakmuran menekan dan memperkosa tabiat dan hak-hak asasi manusia, sedang Kapitalisme dalam memberikan kebebasan kepada tiap-tiap orang tidak mengindahkan perikemanusiaan dan hidup dari pemerasan keringat orang lain dan membukakan jalan untuk kehancuran kekayaan alam.[46]

Untuk itu, menurut Natsir, umat Islam perlu menjawab persoalan yang ditimbulkan sebagai akibat dari dua ideologi dunia yang dianggap telah menjajah umat Islam selama berabad-abad itu. Sebagai agama fitrah, Islam memberikan tuntunan hidup yang lengkap, serta memberikan kebebasan dan menyuruh manusia berusaha mencari nafkah dan kekayaan sekuat-kuatnya, baik di laut maupun di darat.[47]

Terhadap kepemilikan harta misalnya, Natsir berpendapat bahwa manusia diberi kebebasan untuk berikhtiar secara ihsan, melakukan hak dan kewajiban secara berimbang, dan tidak dipakai sebagai alat pemuas nafsu. Untuk itu, Natsir memandang perlu kewajiban zakat sebagai cara membangun kemakmuran seluruh masyarakat. Dengan mengorganisasi zakat dengan baik, maka dapat dihilangkan

kemiskinan dan kemelaratan di dalam masyarakat. Dengan cara ini, jelas sangat berbeda dengan Komunisme, *"Islam mengakui hak kepribadian dan memberikan kebebasan, bahkan mewajibkan kepada tiap-tiap orang agar mencari rizki sekuat tenaga..."*[48] Sebaliknya berbeda dengan Kapitalisme, dalam Islam *"...kekayaan yang didapat tidak boleh digunakan untuk kepentingan diri sendiri saja, tetapi harus pula dikeluarkan untuk menolong sesama manusia, guna menciptakan kemakmuran bersama."*[49]

Dari uraian tersebut, baik Sjafruddin Prawiranegara maupun Natsir tampak berpikir apologetik dengan memandang kelebihan-kelebihan di dalam pemikiran Kapitalisme dan Komunisme juga terdapat di dalam dan dicita-citakan Islam. Dengan cara demikian, wajar apabila George McTurnan Kahin mengelompokkan keduanya – terutama Sjafruddin – sebagai tokoh sosialis religius di Masyumi.[50]

Dari pertarungan ideologi antara Islam dengan Komunisme dan Kapitalisme, maka tugas dan kewajiban Masyumi adalah *pertama*, mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan oleh bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, dan telah mendapat pengakuan internasional dan mengisinya dengan melaksanakan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan perseorangan, masyarakat, dan negara Republik Indonesia menuju keridlaan Ilahi. Berkait dengan hal ini, Masyumi akan berjuang dengan jalan yang sah dalam negara Republik Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat, melalui jalan demokrasi.[51]

Kedua, mengingatkan umat manusia agar kembali kepada Tuhan dari kesalahan Komunisme dan Kapitalisme dengan menjunjung tinggi kemerdekaan agama dari tekanan dan penindasan oleh siapa pun. Masyumi akan bekerjasama dengan pihak mana pun di luar Masyumi sepanjang berpegang

pada kebenaran dan al-Qur'an.[52] *Ketiga*, menolak kekerasan dalam penyelesaian konflik. Perihal politik dalam negeri, Masyumi menolak adanya paksaan dan kesewenangan dan lebih memilih sarana hukum untuk menyelesaikan setiap konflik. Terhadap hubungan internasional, Masyumi tidak membenarkan suatu bangsa menggunakan kekerasan, paksaan, dan perkosaan untuk mengakhiri konflik terhadap suatu bangsa lain.[53]

C. Sosialisme Religius dan Sosialisme Marxian

Pada masa revolusi, cara pandang negatif terhadap Kapitalisme banyak dianut sejumlah pemimpin Indonesia karena Kapitalisme dianggap sebagai penjelmaan penjajahan Belanda. Aspek negatif Kapitalisme dapat dilihat dari pandangan mereka yang mendasarkan pada kritik Marxis-Leninis.[54] Hal ini berakibat pada anggapan pihak luar negeri terhadap rakyat dan pemerintah Indonesia yang dianggap terpengaruh Moskow (Komunisme), sekalipun bagian terbesar bangsa Indonesia adalah Muslim. Pada gilirannya, anggapan ini berlanjut pada pemahaman bahwa "semangat Islam di Indonesia sangat suka dengan paham-paham Komunisme dan sosialisme."[55] Padahal, "*....bagi orang Amerika dan Philipina, Komunisme dan sosialisme itu dipandang setali tiga uang ....anggapan mereka itu memang tidak salah, apabila sosialisme diartikan sebagai sosialisme yang dianjurkan oleh Karl Marx.*"[56]

Masyumi sebagai partai yang menglaim berideologi Islam menolak asumsi keliru tersebut. Sjafruddin Prawiranegara sebagai fungsionaris DPP merasa perlu untuk meluruskan kekeliruan asumsi-asumsi yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia yang mayoritas muslim telah terpengaruh oleh Komunisme. Pandangan keliru itu tampaknya lebih

disebabkan oleh karena pemerintahan Indonesia di bawah kabinet Amir Sjarifuddin, serta parlemen (KNIP) sebagian besar didominasi sayap kiri dari Partai Sosialis.[57]

Pada masa revolusi bisa terjadi di antara kaum Komunis dengan Sosialis Indonesia adalah pemeluk agama yang taat, baik Islam maupun Kristen. Inilah yang mengherankan sehingga Sjafruddin pun bertanya, "Siapakah yang benar, merekakah (Muslim atau Kristen) dengan menamakan dirinya sosialis atau komunis, atau saya dengan mengikuti Partai Politik Islam Masyumi?"[58]

Menurut Sjafruddin terdapat perbedaan antara Marxisme dengan agama manapun juga. Perbedaannya adalah bahwa dasar-dasar Marxisme dalam bentuk materialisme-historis yang sama sekali bertentangan dengan paham Ketuhanan dari tiap-tiap agama.[59]

Lebih lanjut Sjafruddin mengemukakan perbedaan antara keduanya. Sosialisme-marxian berdasar pada materialisme-historis, sedangkan sosialisme-agama berdasar sosialisme religius. Ajaran-ajaran marxisme seolah-olah ada kemiripan dengan ajaran-ajaran Islam. Ungkapan yang mengajarkan, "Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya..." seolah-olah merupakan suatu dalil marxisme, padahal Islam melanjutkan dengan kalimat, ..." dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari."[60]

Sjafruddin tidak membedakan antara revolusi nasional dengan revolusi sosial sebagaimana dipertentangkan oleh kaum sosialisme-marxisme. Tujuan revolusi bangsa Indonesia adalah keadilan sosial, yaitu keadilan sosial dalam arti ".....suatu sistem masyarakat, suatu sistem susunan politik dan ekonomi yang dapat menjamin terlaksananya keadilan sosial, kemakmuran rakyat dan sebagainya, yang tak dapat

dicapai dalam zaman .... Sistem kolonial-kolonial Belanda.[61]

Dalam revolusi nasional terdapat unsur sosialisme seperti yang disebut dalam pasal 33 ayat (1 – 3) UUD 1945. Namun, sosialisme menurut UUD berbeda dengan sosialisme-marxian. Hal ini tampak pada rumusan pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa," sedangkan Marxisme berdasar kepada materialisme-historis yang menolak adanya Tuhan, serta mengajarkan perjuangan kelas antara kelas proletar dengan kelas kapitalis secara sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan. Dikarenakan tidak ada pertalian batin antara sosialisme dalam UUD dengan sosialisme-marxian, maka tujuan revolusi nasional tak mungkin dapat dipenuhi oleh marxisme.[62]

Dengan mengambil kebaikan sosialisme-marxian dalam kolektivisme lapangan ekonomi, sosialisme-religius justru mengakui individualisme, inisiatif dan pertanggungjawaban perseorangan berdasar nilai-nilai ketuhanan. Dari sini tampak bahwa visi sosialisme-religius dalam mengisi revolusi nasional dengan menjamin *"kemerdekaan seluruh bangsa, tetapi juga kemerdekaan bagi tiap-tiap orang, baik kemerdekaan berpolitik maupun kemerdekaan berusaha dan berniaga,...atas dasar pemufakatan, mengadakan sosialisasi atau nasionalisasi terhadap beberapa perusahaan yang dipandang perlu untuk kepentingan bangsa dan negara,...revolusi nasional kita mengandung terang-terangan anasir-anasir sosialisme, mempunyai sifat-sifat serupa dengan marxis-sosialisme."*[63]

Secara singkat, sosialisme-religius dalam revolusi nasional tidak mendasarkan kepada materialisme historis yang dianut sosialisme-marxian, tetapi disandarkan pada kewajiban manusia terhadap sesama manusia dan kewajiban manusia kepada Tuhannya. Konsekuensi logis pandangan ini adalah bahwa "sosialisasi atau nasionalisasi berbagai alat produksi

dalam masyarakat bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya merupakan alat untuk mewujudkan keadilan sosial atau kemakmuran rakyat."[64] Adapun sosialisme-marxian mempergunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan sosialisasi dan nasionalisasi dengan membasmi suatu kelas atau golongan,"[65] dengan menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan.

D. Fatwa Anti Komunis

Penggunaan kekerasan sebagai implementasi tujuan menghalalkan segala cara yang dianut oleh kalangan sosialisme-marxian dalam paham Komunis tidak dapat diterima dalam pandangan Masyumi dan membahayakan pencapaian tujuan Masyumi. Karena kondisi semacam ini, Majelis Syura Pusat Masyumi mengeluarkan fatwa hukum Islam tentang Komunisme yang diputuskan dalam Muktamar VII Masyumi pada 3 – 7 Desember 1954 di Surabaya.

Fatwa Majelis Syura Masyumi antara lain menyatakan bahwa Komunisme manurut hukum Islam adalah kufur. Bagi orang yang menganut Komunisme dengan pengertian, kesadaran dan meyakini kebenaran paham Komunisme, maka hukumnya adalah kafir. Seseorang yang mengikuti Komunisme atau organisasi komunis tanpa disertai pengetahuan, kesadaran, dan keyakinan pada falsafah, ajaran, tujuan, dan cara-cara perjuangan komunis, maka hukumnya sesat.

Fatwa Majelis Syura Masyumi tersebut dilandasi kenyataan bahwa Komunisme sepanjang sejarahnya "bertentangan, menentang, dan memusuhi hukum Syari'at Islam serta umat Islam."[66] Secara ringkas, beberapa aspek Komunisme yang bertentangan dengan Islam menurut fatwa tersebut tergambar dalam Tabel 1

Tabel 1
Aspek-aspek Ajaran Komunisme
yang Bertentangan dengan Islam[67]

Aspek-aspek Ajaran Komunisme	**Alasan Bertentangan dengan Islam**
Komunisme adalah falsafah yang berdasarkan materialisme-historis (paham kebendaan berdasarkan sejarah)	Ajaran Islam menyatakan bahwa Yang Menjadikan dan Memberi segala sesuatu, baik berwujud kebendaan maupun kerohaniaan adalah Allah (QS 45:22, 25:2, 20:50, 18:84, dan 4:78)
Komunisme memusuhi agama dan mengingkari adanya Tuhan (atheisme)	Ajaran Islam mengakui adanya Allah dan mengakui adanya agama-agama (QS 2:28, 10:99, dan 109:6)
Komunisme melenyapkan ikatan kekeluargaan dan menjadikan wanita milik bersama	Ajaran Islam memelihara dan mengatur serta menganggap suci ikatan keluarga dan perkawinan serta mengharamkan perzinaan (QS 4:3, 17:32, 8:75, dan 47:22)
Komunisme pada dasarnya melenyapkan hak milik perseorangan atas alat-alat produksi dan kekayaan	Ajaran Islam pada dasarnya mengakui hak milik perorangan atas alat-alat produksi dan kekayaan, asal diperoleh dengan cara yang halal. Hak milik diberi beban kewajiban serta dapat diatur dan diarahkan untuk kepentingan umum (QS 13:26, 4:31, 51:19, 2:219, 9:34), serta hadits Nabi ketika di haji wada' yang artinya, *"Sesungguhnya darah kamu dan harta kamu haram diganggu sampai kamu menghadap Tuhanmu, seperti sucinya hari dan bulan haji ini."*
Komunisme memperjuangkan dan melaksanakan cita-cita dengan sistem diktator-proletar	Ajaran Islam menganjurkan syura antar segala golongan rakyat (QS 42:38, dan 3:159)

Sebelumnya, Majelis Syura Masyumi Jawa Barat juga mengeluarkan fatwa yang sangat jelas pada 24 Oktober 1954. Fatwa tersebut selengkapnya berbunyi:

> Setelah mempelajari secara mendalam dan membahas secara luas seluk-beluk ideologi Komunisme-marxisme, baik dari sudut keagamaan, kepercayaan, dan ke-tuhanan, di mana jelas ajaran atau ideologi Komunisme itu anti Tuhan (atheisme) dan anti agama, maupun dari sistem politik kenegaraan dan ekonomi di mana terang ajaran dan ideologi Komunisme itu anti demokrasi dan penghapusan hak perseorangan, dan dalam perikatan kemasyarakatan Komunisme menganjurkan perjuangan kelas dan perang golongan.
>
> MENGINGAT, bahwa ajaran dan ideologi Komunisme-marxisme itu bukan saja bertentangan seluruhnya dengan ajaran dan hukum Islam, akan tetapi merupakan bahaya dan bencana besar bagi kehidupan keagamaan pada umumnya dan mengancam keselamatan Negara Republik Indonesia yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
>
> MENIMBANG, sudah seharusnya umat Islam, terutama para ulama dan zu'ama Islam bersikap tegas terhadap aliran dan keyakinan (ideologi) Komunisme-marxian, sesuai dengan ajaran Islam (Qur'an dan Hadits), bahwa adalah kewajiban hukum bagi umat Islam Indonesia untuk menyelamatkan Negara Republik Indonesia dan umat bangsa ini dari bahaya Komunisme itu.
>
> MENDENGAR, pemandangan-pemandangan dan pembicaraan para utusan yang berdasar kepada nash al-Quran dan Hadits dalam konferensi tersebut di atas.

MEMUTUSKAN

1. Ideologi Komunisme adalah suatu ideologi yang sangat bertentangan dengan ajaran dan hukum Islam, dan merupakan bahaya besar bagi kehidupan agama dan negera Republik Indonesia.
2. Umat Islam yang menganut ideologi Komunisme terang MURTAD dari agama Islam.
3. Haram hukumnya bagi umat Islam masuk menjadi anggota Partai Komunisme Indonesia dan partai-partai dan organisasi yang sudah terang hendak menegakkan hukum Komunisme di Indonesia.
4. Kalau ada orang yang menganut paham Komunisme (PKI) yang meninggal dunia, tidak wajib disembahyangkan dan dikuburkan secara Islam.
5. Menyetujui berdirinya FRONT ANTI KOMUNIS yang dibentuk oleh para pemimpin Masyumi Jawa Barat dan menganjurkan kepada segenap kaum Muslim seluruh Indonesia supaya membentuk FRONT ANTI KOMUNIS di daerah masing-masing, sebagai pernyataan tegas dan perlawanan terhadap ideologi Komunisme.
6. Bersikap diam tehadap aliran dan ideologi Komunisme yang diperjuangkan oleh Partai Komunisme Indonesia (PKI) berarti membiarkan dan ridla berkembang dan berkuasanya satu ideologi yang sangat dimurkai oleh Allah swt.
7. Menyerukan segenap kaum umat Indonesia, terutama para ulama dan zu'ama Islam agar melaksanakan ajaran syari'at Islam, ialah membentuk front persatuan umat Islam yang kuat dan kokoh, guna membendung aliran dan ideologi yang membahayakan itu.

8. Menyerukan kepada segenap aliran partai-partai politik yang anti komunis agar mereka menghentikan kerjasama mereka dengan Partai Komunisme Indonesia...[68]

Sejalan dengan Fatwa Majelis Syura Masyumi, M. Isa Anshary, fungsionaris DPP Masyumi dan aktivis Front Anti Komunis, merinci bahaya Komunisme bagi umat Islam.[69] Bahaya tersebut antara lain *pertama*, bahwa Komunisme dibangun atas filsafat hidup yang belum selesai, yaitu materialisme historis yang sangat bertentangan dengan fitrah kemanusiaan dan aturan alam besar ini. *Kedua*, materialisme ini pada dasarnya adalah menolak adanya Tuhan, wahyu, dan Nabi. *Ketiga*, implikasi penolakan adanya Tuhan adalah Komunisme menjadi anti agama. *Keempat*, implikasi materialisme historis adalah berlakunya hukum rimba dengan adagium *apa yang kamu rampas itulah hakmu*. *Kelima*, Komunisme dibangun tanpa moral karena moral kesusilaan hanyalah pagar bagi kaum borjuis untuk mengekalkan kekuasaannya. *Keenam*, marxisme mempergunakan pertentangan antar kelas (perang golongan) yang berbeda untuk mencapai tujuannya, yaitu masyarakat tanpa kelas. *Ketujuh*, kekuasaan diktator-proletariat pada dasarnya adalah pemerintah teror yang didasarkan pada kekuatan, ancaman, dan ketakutan serta tegak dengan penuh kecurigaan dan kecemburuan antar kelas. *Kedelapan*, Komunisme merupakan neraka dunia karena hak milik perseorangan ditiadakan dengan jalan paksa-kekerasan, sehingga manusia sebagai pribadi terampas kemerdekaannya. *Kesembilan*, Komunisme pada dasarnya anti demokrasi karena tidak diakuinya perbedaan tafsir dan kebebasan berpendapat. *Kesepuluh*, Komunisme adalah anti nasional karena berkiblat dan mengabdi untuk kepentingan Moskow sebagai induk

Komunisme dunia. *Kesebelas*, Komunisme pada dasarnya adalah imperialisme baru karena revolusi dunia yang diidam-idamkan oleh kaum komunis bertujuan untuk melaksanakan penjajahan baru atas umat manusia dengan cara menggulingkan tiap-tiap kekuasaan bukan komunis. *Kedua belas*, Komunisme merupakan penjelmaan agama palsu karena Komunisme atau marxisme tidak terbatas pada epistemologi materialisme historis dalam persoalan kehidupan dan kemasyarakatan manusia belaka, kaidah-kaidah perekonomian dan pembagian rezki, tetapi juga berperan seperti agama baru yang memutarbalikkan pandangan manusia. Agama Komunisme ini disebut sebagai agama kebencian karena hendak memutarbalikkan wajah dan semangat manusia dari menuhankan Tuhan yang Ghaib kepada menuhankan tuhan yang nyata (konkret) berupa alam materi

E. Faksi Masyumi Menghadapi Komunisme

Penyikapan wacana Komunisme di dalam tubuh Masyumi sedikitnya melahirkan dua faksi utama, yaitu faksi Sukiman Wirjosandjojo dan faksi Natsir.[70] Di luar kedua faksi itu, ada faksi Muhammad Isa Anshary yang dikenal sangat radikal dan ekstrim. Faksi tersebut memiliki tanggapan berbeda terhadap Komunisme, meskipun sama-sama menolaknya.

Jusuf Wibisono, sebagai salah seorang yang digolongkan ke dalam faksi Sukiman menyatakan bahwa kewajiban bagi umat Islam Indonesia untuk mengenal lebih dekat Marxisme supaya dapat menyelidiki lebih seksama seberapa jauh perbedaan, kesearahan, dan pertentangannya dengan Islam.[71] Dengan mengenal aliran Marxisme itu, maka dapat dikurangi kesalahpahaman yang tidak perlu, yang merugikan

perjuangan Islam sendiri. Pada gilirannya, sikap demikian akan menumbuhkan penghargaan terhadap anasir-anasir yang dianggap berguna dan dapat memperkaya pengetahuan para kader politik Masyumi.

Dari kelompok radikal, Muhammad Isa Anshary, anggota Masyumi dari Persis, adalah salah satu contoh yang sering disebut sebagai "ekstrimisme Muslim".[72] Isa Anshary membidikkan semua upaya untuk memperluas dan memanfaatkan isu anti Komunisme sebagai senjata politik utama. Isa Anshary membentuk organisasi *Front Anti Komunis* pada tahun 1953. Front ini merupakan pengembangan dari rencana pembentukan *Front Ketuhanan dan Demokrasi* pada tahun 1952. Menurut Isa Anshary, ia merasa bahwa pertumbuhan Komunisme di Indonesia merisaukan sejak lama. Ia menuntut sikap anti Komunisme yang lebih tegas, sehingga dipilihlah nama *Front Anti Komunis*.[73] Organisasi bentukan Isa Anshary ini tidak ada kaitan formal dengan Masyumi, tetapi oleh sebagian tokoh Masyumi dianggap sebagai kelompok penekan yang ditujukan kepadanya. [74]

Berbeda dengan kelompok radikal, kelompok moderat yang cenderung ditunjukkan faksi Sukiman jauh lebih lunak dalam memandang Komunisme di Indonesia. Kalaupun cenderung menentang cara-cara Isa Anshary dan menganggapnya rawan serta bahaya, bukan berarti mereka mengamati pertumbuhan Komunisme secara pasif. Dalam melawan Komunisme, mereka mengutamakan pengembangan suatu program partai yang praksis. Oleh Compton, perbedaan dalam tubuh Masyumi tersebut tidak berkait dengan persoalan "apakah harus memerangi Komunisme", melainkan "bagaimana memerangi Komunisme".[75]

Sikap faksi Natsir yang dikenal sebagai kelompok sosialis-religius dalam Masyumi antara lain dapat dilihat dari

Urgensi Program Masyumi pada awal 1946, yang kemudian dijelaskan oleh Sjafruddin Prawiranegara dalam buku *Politik dan Revolusi Kita* yang diterbitkan pada pertengahan 1948, dan dalam *Tafsir Azas* Masyumi pada 1952 yang konsepnya disusun bersama-sama Mohammad Natsir. Sjafruddin berpendapat bahwa sosialisme Masyumi berbeda dengan sosialisme yang dianut kaum Komunis (Marxis), sekalipun mirip dengan Sosialisme-Marxian. Sosialisme-religius tidak didasarkan pada materialisme historis Karl Marx, tetapi dasarnya kepada tugas manusia terhadap sesamanya dan tugas kepada Tuhannya. Selain itu, perbedaan mencolok tampak pada soal perjuangan kelas yang dipergunakan sosialisme marxian yang cenderung menjadi fasis karena semua ditujukan untuk negara sebagai bentuk kolektivitas-nya, sedangkan sosialisme religius hanyalah salah satu alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat.

Sikap kelompok sosialis religius ini makin keras kepada Komunisme ketika ide Demokrasi Terpimpin mulai dikenalkan Presiden Soekarno pada akhir 1956. Di bawah gagasan ini, PKI dapat merangkul Soekarno untuk melapangkan jalan Komunisme di Indonesia.[76] Sikap keras ini tampak sekali ketika Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap turut bergabung dengan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia), yang diproklamasikan pada 15 Februari 1958 di Padang, yang sejalan dalam melihat ancaman Komunisme (PKI).[77] Keterlibatan mereka dalam PRRI kemudian menjadi alasan bagi Soekarno mengharuskan Masyumi bubar pada Agustus 1960.

Catatan

[1] Partai-partai politik zaman pergerakan yang mengikutsertakan para wakilnya seperti PSII, Partai Islam Indonesia (PII), Penjadar. Sedangkan organisasi sosial keagamaan yang ikut bergabung antara lain NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), PUI, PUII, dan sebagainya. Pada perkembangan berikutnya, PSII keluar dari Masyumi pada 1947, menyusul NU pada 1952. Sekalipun begitu, ada pula yang ikut menyeburkan diri ke dalam Masyumi seperti Partai "SERMI" (Banjarmasin), Partai "USUMI" (Samarinda), Al-Jamiyatul Washliyah (Medan), Nurul Islam (Tanjung Pandan), dan Permi (Pontianak) pada 1950. Lihat, Taufiqurrahman, "Peringatan ke V Partai Politik Islam Masjumi", *Suara Partai Masjumi*, No. 11 th 5 (Desember 1950), hlm. 10, Amanat Prawoto Mangkusasmito, "Dalam Memperingati 6 tahun Masjumi", *Hikmah*, no. 9 th IV (4 November 1951), hlm. 6 dan penulis yang sama dalam "Amanat Wakil Ketua Pimpinan Partai dalam Ulang Tahun VI Masjumi, *Suara Partai Masjumi*, No. 11/12 th. 6 (November-Desember 1951), hlm. 4, "Partai Masjumi" dalam *Kepartaian di Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Penerangan Republik Indonesia, 1950), hlm. 9.

[2] Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan)*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999), hlm. 62- 63.

[3] Pembahasan ini dapat dilihat dalam Tamar Djaja, "Masjumi dengan Anggota Istimewa dan Otonom", *Suara Partai Masjumi*, No.2, th ke-7, (Februari 1952), hlm. 7 – 8.

[4] Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme*, hlm. 64

[5] Abu Barkat, "Peristiwa Penting bagi Umat Islam Indonesia 17-8-1945 – 17-8-1951," *Suara Partai Masjumi*, No. 8 – 9, th ke-6 (Agustus – September 1951), hlm. 14 dan 16,Tamar Djaja, "Masjumi 8 tahun', *Suara Partai Masjumi*, no. 10 – 11, th VII, (Oktober – November 1953), hlm. 8 – 9.

[6] Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme*, hlm.65.

[7] Mohammad Natsir dalam *ibid.*

[8] *Ibid.*

[9] *Ibid.*, hlm. 66.

[10] Lihat Anggaran Dasar Pasal II "Partai Masjumi" dalam *Kepartaian di Indonesia*, hlm. 10, dan Prawoto Mangkusasmito, "Dalam Memperingati 6 tahun Masjumi", hlm. 6.

[11] Abu Barkat, "Peristiwa Penting", hlm. 16.

[12] "Dokumentasi Kaum Muslimin", dalam Muktamar Masyumi VIII 22 – 29 Desember 1956, (Bandung: Panitia Muktamar Masjumi VIII, 1956), hlm. 28.

[13] *Ibid.*, hlm. 29.

[14] Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme*, hlm. 66, 78 - 81.

[15] Taufiqurrahman, "Peringatan Ulang tahun ke V", hlm. 9, Abu Barkat, "Peristiwa Penting", hlm. 16.

[16] "Dokumentasi Masjumi", hlm. 29 – 30.

[17] Kebijakan Politik luar negeri Masyumi ditegaskan berulang-ulang, terutama dalam setiap keputusan Muktamar sejak Muktamar I, Pebruari 1946.

[18] "Dokumentasi Masjumi", hlm. 29 – 30.

[19] Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme*, hlm. 67.

[20] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, (Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1985), I hlm. 55 – 56, George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1952), hlm. 156 – 161.

[21] "Dokuementasi Masjumi", hlm. 33 – 34, Abu Barkat. *Peristiwa Penting*, hlm. 16.

[22] Fred Haliday, "Cold War", dalam Joel Krieger (ed). *The Oxford Companion to Politics of the World*, (New York dan Oxford: Oxford University Press, 1993), hlm. 151- 1513.

[23] Abu Hanifah, "Politik Luar Negeri", dalam *Suara Partai Masjumi*, No. 2 th ke-6 (Februari 1951), hlm. 18.

[24] "Dokumentasi Masjumi", hlm. 29.

[25] *Ibid.*

[26] *Kepartaian di Indonesia*, hlm. 10.

[27] *Ibid.*

[28] Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Ideologi Masjumi*, cet ke-2 (Jakarta: Penerbit Aida, 1950), hlm. 14.

[29] *Ibid.*, hlm. 7.

[30] *Ibid.*, hlm. 25.

[31] M. Isa Anshary, "Garis Pokok Perdjuangan Masjumi (1)", *Suara Partai Masjumi*, no 3, th VIII (Maret 1953), hlm. 18 - 19.

[32] "Tafsir Asas" dalam SU Bajasut (peny). *Alam Fikiran dan Djejak Perdjuangan Prawoto Mangkusasmito*, (Surabaya: Documenta, 1972), hlm. 401

[33] "Tafsir Asas", hlm. 41. Lihat juga dalam Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945 – 1965*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1987), hlm. 137 - 140.

[34] "Tafsir Asas", *Ibid.* Deliar Noer, *Partai Islam*, hlm. 138.

[35] Sjafruddin Prawiranegara, *Islam dalam Pergolakan Dunia* (Bandung: Penerbit Al-Ma'arif, 1950), hlm. 11.

[36] Sjafruddin Prawiranegara menambahkan dengan alasan ketiga yang bersifat subyektif yaitu .."karena Tuhan sendiri telah berfirman bahwa Islam atas pimpinan Rasulullah adalah agama yang penghabisan. *Ibid.*, hlm. 12

[37] Deliar Noer menyebutkan bahwa konseptor Tafsir Asas Masyumi selain Sjafruddin Prawiranegara adalah Mohammad Natsir, Deliar Noer, *Partai Islam*, hlm. 137.

[38] Sjafruddin Prawiranegara, *Islam dalam Pergolakan Dunia*, hlm. 13.

[39] *Ibid.*

[40] *Ibid.*, hlm. 14 – 19.

[41] *Ibid.*, hlm. 29 – 30.

[42] *Ibid.*, hlm. 29.

[43] *Ibid.*, hlm. 40.

[44] *Ibid.*, hlm. 28 – 29.

[45] *Ibid.*, hlm. 36 – 41.

[46] Mohammad Natsir, "Djawab Kita", *Suara Partai Masjumi*, No. 1 th ke-7 (Januari 1952), hlm. 5.

[47] *Ibid.*

[48] *Ibid.*

[49] *Ibid.*

[50] George McTurnan, *Nationalism and Revolution*, hlm. 309 – 311.

[51] "Tafsir Asas", hlm. 411 – 413.

[52] *Ibid.*, hlm. 415 - 417.

[53] *Ibid.*, hlm. 420 - 421.

[54] Helberth Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1962), hlm. 35 - 36.

[55] Sjafruddin Prawiranegara, *Tindjauan Sosial tentang Politiek dan Revolusi Kita*, (Yogyakarta: Badan Peneliti Indonesia Raya, 1948), hlm. 4.

[56] *Ibid.*

[57] Sayap kiri Partai Sosialis berubah menjadi "Front Demokrasi Rakyat" yang menjadi penopang utama PKI dalam pemberontakan Madiun 18 September 1948. Kelompok lainnya di bawah Sjahrir memisahkan diri dengan membentuk Partai Sosialis Indonesia (PSI). *Ibid.*, hlm. 5. Lihat juga bagian 3, Pemerintahan Sayap Kiri" dalam Soe Hok Gie, *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September 1948*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997) hlm. 65 – 126, Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy*, hlm. 129.

[58] Sjafruddin Prawiranegara, *Politiek dan Revolusi Kita*, hlm. 6.

[59] *Ibid.*, hlm. 6 - 7.

[60] *Ibid.*, hlm. 9.

[61] *Ibid.*, hlm. 14.

[62] *Ibid.*, hlm. 14 - 16.

[63] *Ibid.*, hlm. 16.

[64] *Ibid.*, hlm. 16 - 17.

[65] *Ibid.*

[66] *Putusan Kongres PPI Masjumi VII tanggal 3 s/d 7 Desember 1954 dan Fatwa Alim Ulama Majelis Sjura Pusat*, cet ke- 2 (Medan: Pustaka Sedia, 1955), hlm. 12.

[67] Diringkas dari Putusan Kongres PPI Masjumi ke-VII, hlm. 2 - 12.

[68] "Pernjataan Majelis Sjura Masjumi Djawa Barat", *Aliran Islam*, No. 65 th VIII (Oktober, November, Desember 1954), hlm. 56 - 57.

[69] Diringkaskan dari M. Isa Anshary. "Islam Menentang Komunisme," dalam *Bahaja Merah di Indonesia*. (Bandung: Front Anti Komunis, 1954), hlm. 4 - 24

[70] Abu Hanifah, salah seorang anggota DPP Masyumi, mengelompokkan faksi Masyumi menjadi tiga golongan, yaitu faksi konservatif, moderat, dan sosialis-religius. Pembagian Abu Hanifah agak aneh ketika memasukkan Natsir, Sjafruddin, dan Roem ke dalam faksi moderat, sedangkan Sukiman dan Jusuf Wibisono, dan dia sendiri ke dalam

faksi sosialis-religius. Untuk itu, penulis lebih sependapat dengan George Kahin, yang memasukkan faksi Natsir-Sjafruddin sebagai kelompok sosialis-religius. Lihat George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution*, hlm. 309 – 311; Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, cet ke-2 (Jakarta: LP3ES: 1987), hlm. 113.

[71] Jusuf Wibisono, *Islam dan Sosialisme*, cet II (Jakarta: Pustaka Istana, 1951) hlm. 4.

[72] Boyd R. Compton. *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia*. (Jakarta: LP3ES, 1993), hlm. 210.

[73] *Ibid.*, hlm. 211.

[74] *Ibid.*, hlm. 215.

[75] *Ibid.*, hlm. 210 – 211.

[76] Uraian menarik berkait hubungan segitiga Presiden Soekarno, PKI, dan Tentara dapat dibaca dalam Herbert Feith, *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin*, terj. Tim PSH (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1955), hlm. 42- 49 dan 135 - 152.

[77] Herbert Feith. *The Decline of Constitutional Democracy*, hlm. 585 - 586.

BAB II

KEBIJAKAN POLITIK ANTI KOMUNIS

A. Pendahuluan

Perjuangan Masyumi menghadapi gerakan komunisme yang diperjuangkan oleh PKI pada era Demokrasi Liberal (1950-1957) tidak dapat dilepaskan dari faksi-faksi di dalam Masyumi sendiri. Pada masa revolusi, perjuangan Masyumi menghadapi Komunis didominasi oleh kalangan senior pergerakan kemerdekaan seperti Sukiman Wirjosandjojo dan Samsudin. Pada masa Demokrasi Liberal, Masyumi didominasi oleh kalangan muda seperti Mohammad Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara.[1]

Jika diperhatikan, pemilahan ini sebenarnya hanya melihat periode kepemimpinan elit partai. Namun demikian, Masyumi tampak terbagi dalam dua faksi utama, yaitu faksi Sukiman Wirjosandjojo dan faksi Mohammad Natsir.[2] Sukiman

dianggap sebagai kelompok "Masyumi Nasionalis", sedangkan Natsir adalah faksi "Masyumi Sosialis-Demokrasi."[3] Pemilahan ini oleh kalangan Masyumi dianggap sebagai upaya untuk memecah belah internal partai.[4]

Kiprah Masyumi pada era Demokrasi Liberal merupakan konsekuensi logis untuk mewujudkan cita-cita yang menjadi tujuannya, seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar Masyumi. Dari rumusan tujuan Masyumi sejak dibentuk pada 7 November 1945, secara garis besar terdapat tiga (3) lapangan kiprah Masyumi, yaitu lapangan parlementer (badan legislatif), lapangan pemerintahan (badan eksekutif), dan lapangan pembinaan umat.[5]

Dari tiga lapangan perjuangan Masyumi itu, bagian pertama dan kedua merupakan fungsi Masyumi sebagai partai politik di tingkat suprastruktur, sedangkan bagian ketiga merupakan peran di tingkat infrastruktur. Pada lapangan parlementer, Masyumi berperan di lembaga-lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di pusat dan daerah sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat melalui sarana yang lazim dalam negara demokrasi. Di lapangan pemerintahan, Masyumi berjuang untuk mendapatkan kedudukan dalam kabinet dan aparatur pemerintahan lainnya. Di lapangan pembinaan umat, Masyumi membangun fungsi partai politiknya dengan menyusun tenaga umat yang tersebar dalam berbagai organisasi massa Masyumi di tingkat akar rumput (*grass root*).

B. Pemerintahan Parlementer

Peran Masyumi sesungguhnya sudah dimulai sejak didirikan pada 7 November 1945 dalam sebuah Kongres Umat Islam di Yogyakarta, baik dalam bentuk peperangan dengan membentuk laskar Hizbullah dan Sabilillah maupun diplomasi

yang dilakukan dengan pihak Belanda, sehingga tercapai pengakuan kedaulatan negara pada 27 Desember 1949. Selain itu, Masyumi juga turut berperan di bidang pemerintahan dalam beberapa kabinet, Kabinet Syahrir, Kabinet Amir Sjarifuddin, dan Kabinet Hatta.

Peran besar Masyumi dalam percaturan politik Indonesia meningkat setelah kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950 melalui penerimaan Mosi Integral sebagai formatur kabinet. Natsir berhasil membentuk sebuah kabinet, walaupun tanpa mendapat dukungan PNI. PNI tidak ikut dalam kabinet setelah permintaannya mengenai sejumlah pos jabatan menteri ditolak Natsir. Natsir kemudian dapat membentuk sebuah *zaken kabinet* yang bertanggung jawab kepada Parlemen. Dalam kabinet ini, Masyumi menempati empat pos jabatan, yaitu Perdana Menteri (Mohammad Natsir), Menteri Luar Negeri (Mohammad Roem), Menteri Keuangan (Sjafruddin Prawiranegara), dan Menteri Agama (Wachid Hasjim).[6] Dari daftar nama kabinet tersebut, selain nama Wachid Hasjim, tampak bahwa kelompok Sukiman di dalam Masyumi tidak terwakili sama sekali.

Beberapa program Kabinet Natsir antara lain:[7]

1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante dalam jangka dekat
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah serta membentuk peralatan negara yang bulat
3. Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman
4. Mengembangkan dan memperkokoh kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan ekonomi nasional yang sehat

5. Melaksanakan keragaman antara buruh dengan majikan
6. Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha-usahanya yang meninggikan derajat kesehatan rakyat dan kecerdasan rakyat
7. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan bekas anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat
8. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat dalam tahun ini (1950)

Program Kabinet Natsir tersebut mendapat tantangan dari kalangan internal partai maupun dari pihak oposisi. Dari dalam Masyumi, tantangan itu berasal dari Jusuf Wibisono yang dianggap kelompok Sukiman Wirjosandjojo dan Rusjad Nurdin yang segaris dengan Isa Anshary. Dengan tidak ikutnya PNI dan banyaknya anggota Kabinet dari nonpartai membuktikan dugaan Jusuf Wibisono terhadap kelemahan Pemerintahan Natsir tersebut. Selain itu, Kabinet Natsir lebih mementingkan *persoonlijke symen antipathien* dari formatur dengan semboyan *teamwork* sehingga melepaskan pos-pos penting kabinet di luar jabatan perdana menteri, seperti menteri dalam negeri, menteri pertahanan, dan menteri pengajaran.[8]

Di bagian lain, M. Rusjad Nurdin menilai bahwa ada satu kekurangan dalam program Kabinet Natsir dari delapan program yang ditetapkan. Menurutnya, kekurangan pokok, meskipun dianggap kecil, adalah tentang pembangunan rohani. Pemerintah dianggap tidak mempunyai usaha kongkret untuk mewujudkan pembangunan rohani. Upaya pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Pengajaran tidak cukup. Walaupun ada Kementrian Agama, namun perannya masih

sekedar "Kementrian Pembagian Korma" pada saat bulan puasa (Ramadlan).[9]

Meskipun ada perbedaan di kalangan Masyumi sendiri terhadap Kabinet Natsir, justru DPP Masyumi menyetujui sifat *zaken kabinet* (kabinet ahli) bentukan Natsir tersebut. Selain itu, DPP Masyumi juga menyetujui program kabinet dan memberi kesempatan kepada kabinet tersebut untuk bekerja keras sampai terbentuknya Konstituante.[10]

Dari program kabinet tersebut tampak bahwa Natsir membawa program partainya yang telah diputuskan dalam Muktamar IV Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1949 dalam kebijakan pemerintahannya. Politik luar negeri masa Kabinet Natsir ditandai dengan keberhasilan Indonesia diterima sebagai anggota PBB ke-60 pada tanggal 29 Desember 1950. Keberhasilan juga merupakan tanda bahwa *Urgensi Program* Masyumi yang diputuskan dalam Muktamar tersebut telah mencapai sasaran. Menurut Mohammad Roem, keberhasilan Indonesia diterima sebagai anggota PBB juga mencerminkan 'pengakuan kedaulatan' RI oleh masyarakat internasional.[11]

Program pemilu Kabinet Natsir juga mencerminkan adanya semangat menggebu untuk membentuk tatanan pemerintahan demokratis yang terus-menerus diperjuangkan sejak Muktamar I Masyumi tahun 1946. Meski demikian, program ini belum berhasil dilaksanakan. Perhatian nasional banyak dicurahkan pada program pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia sebelum akhir 1950 dan pemulihan keamanan pasca penyerahan kedaulatan berdasar keputusan KMB. Pemerintah Natsir cenderung mengutamakan politik diplomasi seperti yang dilakukan oleh Sjahrir pada masa revolusi, sehingga Presiden Soekarno antara bulan November dan Desember 1950 mendesak agar Irian Barat kembali ke

pangkuan Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 1951.[12] Partai oposisi seperti PNI dan golongan komunis (PKI) memanfaatkan kelemahan Natsir tersebut dengan slogan boikot kepada orang Belanda yang berada di Indonesia, jika Irian Barat belum dikembalikan seperti diserukan Soekarno. Namun, Masyumi sebagai partai penguasa saat itu justru mengecam dan menolak seruan boikot dari "anasir-anasir" yang hanya memperjuangkan kepentingan diri dan golongan saja.[13]

Pemulihan keamanan terutama ditujukan terhadap penyelesaian Darul Islam (DI) Jawa Barat di bawah pimpinan SM Kartosuwiryo. Hal ini dilakukan untuk menepis tuduhan partai oposisi, terutama PKI, bahwa Masjumi memiliki hubungan dengan DI. Jusuf Wibisono selaku Ketua DPP Masjumi menyatakan bahwa terdapat perbedaan pendirian politik antara Masjumi dengan gerakan DI. Masjumi berjuang dengan jalan demokratis-parlementer, sejalan dengan UUD dan semua UU Negara RI, serta tidak dengan jalan kekerasan atau dengan jalan membentuk negara dalam Negara RI.[14]

Kebijakan anti komunis Pemerintah Natsir ditandai oleh adanya larangan rapat-rapat umum dan pengibaran setengah tiang Bendera Merah Putih untuk menghormati pemakaman kembali Amir Sjarifuddin dan kawan-kawannya dari FDR/PKI yang dihukum mati karena keterlibatan mereka dalam Pemberontakan Madiun 1948. Usulan pengibaran bendera disampaikan SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) kepada segenap kantor SOBSI dan organisasi serikat buruh anggota SOBSI pada hari pemakaman kembali tokoh-tokoh tersebut. Pemerintahan Natsir melarang seruan SOBSI tersebut dengan alasan bahwa Amir Sjarifuddin dan kawan-kawannya di FDR dan PKI adalah orang-orang yang mengadakan pemberontakan di Madiun, yang mengakibatkan korban puluhan ribu orang, baik dari kalangan rakyat, para

pemimpin, pamong praja, dan polisi. Pemberontakan Madiun telah melemahkan perjuangan nasional, justru pada saat Bangsa Indonesia harus menghadapi musuh dari luar (Agresi Belanda). Pemerintah Natsir mengartikan seruan SOBSI itu sebagai pernyataan persetujuan SOBSI terhadap pemberontakan tersebut untuk merobohkan negara.[15]

Kabinet Natsir tidak berumur lama, hanya bertahan sampai tanggal 21 Maret 1951. Salah satu penyebab kejatuhan Kabinet Natsir adalah karena mosi Hadikusumo (PNI) pada tanggal 21 Januari 1951 mengenai pencabutan Peraturan Pemerintah No. 39/1950 tentang pembekuan DPRD. Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat tidak setuju dengan Mosi tersebut dan Kabinet sependirian dengan Assaat. Parlemen menerima mosi Hadikusumo, sehingga kabinet harus mengundurkan diri karena menolak mosi tersebut.[16] Selain itu kejatuhan Kabinet Natsir juga disebabkan oleh mundurnya sejumlah menteri dari Partai Indonesia Raya (PIR),[17] serta Abdul Halim (Non Partai)[18] dan Harsono Tjokroaminoto (PSII).[19]

Jatuhnya Kabinet Natsir disikapi oleh PKI sebagai bukti bahwa Pemerintah Natsir tidak didasarkan pada persatuan nasional yang bulat serta politik nasional yang merdeka dan demokratis. Kabinet Natsir dianggap menghambakan diri kepada kepentingan imperialis, karena tidak mau membatalkan persetujuan KMB. Selanjutnya PKI berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk mengatasi persoalan itu adalah perlu dibentuk kabinet nasional bersifat koalisi. Meskipun tidak menyebut Masyumi secara terang-terangan, PKI mengharapkan agar Pemerintah koalisi itu dapat mengakhiri diktator satu partai atau beberapa partai, sehingga berjalan pemerintahan demokratis yang terdiri dari partai-partai, golongan, dan orang-orang tidak berpartai yang demokratis.[20]

Jatuhnya Kabinet Natsir bukan berarti hilangnya kesempatan Masyumi untuk memimpin pemerintahan. Sukiman Wirjosandjojo, Presiden Partai Masyumi, berhasil membentuk kabinet pada tanggal 26 April 1951 setelah Mr. Sartono dari PNI gagal membentuk kabinet baru.[21] Kabinet ini merupakan suatu koalisi dengan mengikutkan PNI masuk di dalamnya, sehingga dianggap dapat mengokohkan Pemerintahan Sukiman. Dari susunan kabinet tersebut, tampak sekali bahwa dari kalangan Masyumi yang ikut menjadi anggota kabinet adalah dari kelompok Sukiman Wirjosandjojo.[22]

PKI menyikapi pemerintah baru itu dengan kesediaannya untuk menghentikan politik oposisi dengan persyaratan pemerintah betul-betul menjalankan politik bebas.[23] Namun tawaran PKI tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah Sukiman. Pada bulan Juni, Juli dan awal Agustus 1951 terjadi pemogokan para buruh menentang Peraturan Militer anti mogok yang ditetapkan pemerintah sebelumnya pada 13 Februari 1951. Para buruh sejumlah industri menuntut bonus lebaran (Hari Raya Idul Fitri) yang harus diberikan, seperti telah dilakukan kepada pegawai negeri sipil. Demikian pula para buruh kargo berada di bawah serikat buruh PKI melakukan aksi mogok serupa. Kondisi demikian diperhangat dengan keadaan Ibukota Jakarta yang akan diramaikan oleh kelompok PKI untuk memboikot peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, dan akan dimanfaatkan sebagai "Madiun Affair" berikutnya.[24]

Situasi panas itu semakin menegangkan ketika Pemerintah Sukiman melakukan "razia Agustus 1951".[25] Razia berbentuk penangkapan anggota-anggota parlemen dan para tokoh PKI serta kelompok kiri lainnya di Jakarta dan daerah-daerah,[26] seperti D.N. Aidit, Lukman, Njoto, Alimin, Tjugito,

dan Ny. Mudigdo (PKI), I. Tedjasukmana (Partai Buruh), Maruto, Pandu K. Wiguna (Murba), Supratono (Sarbupri), Suhardjo (Serikat Buruh Pertjetakan), Situmeang (Perbun), Siaw Giok Tjhan, Sidik Kertapati (Non-Partai).[27] Meskipun demikian, ternyata "Razia Agustus" tidak hanya menimpa kalangan Kiri. Beberapa tokoh Masyumi pun ada yang ditangkapi. Di antara tokoh Masyumi itu adalah Muhammad Isa Anshary, K.H. Abdul Halim, dan K. Hassan karena diduga terlibat gerakan pengacau DI/TII di Jawa Barat.[28]

Ketua Fraksi PKI Sakirman memprotes keras tindakan razia oleh pemerintah tersebut.[29] Ia menganggap tindakan pemerintah tersebut sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia dan hak-hak demokrasi. Sebaliknya, Masyumi meminta Pemerintah Sukiman agar memperhatikan kritik Masyumi dengan tenang. Karena pemerintah telah disesatkan oleh "kaca mata yang dipakainya" untuk menghadapi situasi keamanan, terutama di Jawa Barat yang masih diliputi gerilya DI, sehingga tokoh-tokoh Masyumi yang diduga mempunyai hubungan dengan DI tersebut ditangkapi. Padahal, menurut Masyumi, semenjak proklamasi kemerdekaan hingga masa pemerintahan Sukiman, Masyumi berjuang melalui "garis undang-undang negara".[30]

Keputusan untuk memelihara keamanan dalam negeri mengalami ancaman dari berbagai aliran. Gerombolan bersenjata telah mengacau keamanan mulai ekstrim kanan seperti DI di Jawa Barat, "Angkatan Umat Islam (AUI)" dan "Batalyon 426" di Jawa Tengah, dan dari ekstrim kiri seperti gerakan "Republik Rakjat Indonesia" di Cirebon Jawa Barat dan "Merapi-Merbabu Complex" di Jawa Tengah. Juga adanya APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di bawah Westerling dan Pemberontakan Andi Azis yang dianggap membahayakan keamanan dalam negeri. Belum lagi ditambah situasi

keamanan sebelum "Razia Agustus" yang makin mengkhawatirkan, sehingga terjadi penangkapan seperti tersebut di atas. Keadaan demikian telah "menjebak" pemerintah untuk mendapatkan bantuan militer untuk mengatasi gerombolan bersenjata tadi, sehingga Menteri Dalam Negeri Achmad Subardjo membuat kesepakatan mengenai "*Mutual Security Act* (MSA)" dengan pemerintah Amerika Serikat.[31]

MSA ini selain meliputi bantuan peralatan senjata juga bantuan ekonomi. Oleh Pemerintah Amerika Serikat, seperti dikatakan oleh Presiden Truman, MSA dimaksudkan untuk memerangi bahaya komunis di masa Perang Dingin. Bagi partai oposisi di Indonesia, persetujuan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bentuk MSA dianggap telah meninggalkan politik bebas yang dianut Pemerintah Indonesia sendiri, sehingga ikut memihak salah satu Blok Perang Dingin yaitu Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat.[32] Tindakan kabinet tersebut sebenarnya dapat dikatakan sebagai upaya represi terhadap PKI.[33] Namun dampak politiknya berimbas pada Masyumi sendiri karena dianggap telah menyimpang dari politik luar negeri RI. Ketua DPP Masyumi Mohammad Natsir menyatakan bahwa partainya tidak bertanggungjawab atas penandatanganan persetujuan penerimaan bantuan berdasarkan MSA. Meskipun demikian, Pimpinan Masyumi tidak akan menarik para menterinya dari Kabinet.[34]

Pada akhirnya, Kabinet Sukiman jatuh dengan disetujuinya Mosi Mr. Djodi Gondokusumo oleh parlemen yang menolak MSA itu. Kabinet memutuskan secara bulat untuk menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno pada tanggal 23 Pebruari 1952.[35] Kabinet Sukiman hanya dapat bertahan selama 10 bulan, lebih lama dibanding Kabinet Natsir.

Kabinet Sukiman digantikan oleh Kabinet Wilopo, yang berhasil dibentuk pada tanggal 30 Maret 1952. Sebelum

Kabinet ini terbentuk, mulai terasa *bargaining position of power* dari setiap formatur kabinet yang ditunjuk, sehingga dua kali formatur ditunjuk oleh Presiden Sukarno tidak berhasil membentuk kabinet. Pada tanggal 1 Maret 1952 Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) ditunjuk sebagai formatur kabinet. Akan tetapi kedua formatur itu gagal melaksanakan tugas, sehingga menyerahkan mandatnya kepada presiden pada 19 Maret 1952. Kemacetan formatur terjadi ketika menentukan kursi kepemimpinan kabinet (Perdana Menteri) dan pos-pos kementerian strategis, seperti kementerian dalam negeri, pertahanan, keuangan dan pendidikan, selalu menjadi rebutan antara Masyumi dan PNI yang memiliki kursi mayoritas di parlemen. Kemudian ditunjuklah Wilopo dari PNI sebagai formatur dan berhasil dibentuk sebuah kabinet dengan dirinya sebagai Perdana Menteri dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) sebagai Wakil Perdana Menteri.[36]

Di dalam Kabinet Wilopo, selain jabatan Wakil Perdana Menteri, Masyumi menduduki posisi Menteri Dalam Negeri (Mohammad Roem), Menteri Pertanian (Moh. Sardjan), dan Menteri Agama (K.H. Faqih Usman).[37] Meskipun tidak mendapatkan posisi Perdana Menteri, ternyata Masyumi memiliki posisi tawar *(bargaining position)* yang sangat kuat. Ini tampak pada program kabinet yang memprioritaskan pemilu Konstituante dan DPR di urutan pertama dari enam programnya.[38] Program tersebut berhasil diwujudkan dengan UU No. 7/1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hingga pemilu dijalankan menurut UU tersebut, DPRD masih berjalan berdasar PP. No. 39/1950.[39]

Posisi kuat Masyumi di kabinet Wilopo ternyata tidak sekuat menyelesaikan konflik internal partai dari unsur

Anggota Istimewa, yaitu NU, yang tidak puas menempatkan pos Kementerian Agama untuk kelompok Muslim Modernis (Muhammadiyah). Tidak seorang pun dari Kabinet Wilopo berasal dari kalangan NU. Puncak ketidakpuasan NU tersebut adalah dengan penarikan diri NU sebagai anggota istimewa Masyumi pada 6 April 1952.[40] Keputusan NU keluar dari Masyumi dikuatkan dengan keputusan Muktamar XIX yang dimulai 26 April 1952 di Palembang.[41] Selanjutnya, NU menjadi partai politik tersendiri dan ikut berperan dalam Kabinet Ali I-II dan Pemilu 1955, serta berjalan terus sebagai partai hingga Pemilu 1971 pada era Orde Baru.

Pendirian PKI terhadap Kabinet Wilopo, sebagaimana telah dilakukannya sejak Kabinet Hatta hingga Kabinet Natsir dan Sukiman, adalah menolak Masyumi dalam kabinet tersebut. PKI menyatakan akan mendukung Kabinet Wilopo sepanjang kabinet menjadi "progresif dan nasional". PKI pun aktif dalam Badan Permusyawaratan Partai (BPP) dan menerima Masyumi dikeluarkan dari Kabinet. Selain itu, PKI menuntut kebebasan bergerak yang diwujudkan antara lain dalam bentuk pembebasan para tahanan politik, termasuk korban "Razia Agustus" semasa Kabinet Sukiman, dan pencabutan *Staat Oorlog en Beleg* (SOB, Undang-undang Darurat Perang).[42]

Pada periode Kabinet Wilopo ini pula, PKI mulai menerapkan strategi baru, yakni mendekati PNI untuk mendepak Masyumi dari percaturan politik parlementer dengan memecah belah satu sama lain di kabinet tersebut. Selain itu, PKI juga "membersihkan" sejarah kelabunya pada peristiwa Madiun 1948. PKI pun mendekati Presiden Soekarno yang telah mengecam peristiwa tersebut dengan pernyataan "memilih Soekarno atau Muso". Presiden mulai mengakui peran kaum komunis yang peduli terhadap persatuan

nasional.[43]

Kendatipun posisinya lemah, PKI tetap puas dengan kabinet itu karena yang memimpin kabinet adalah PNI, bukan Masyumi.[44] Pada kabinet sebelumnya, Kabinet Sukiman, PKI menganggap kabinet telah didominasi agen-agen imperialis Amerika Serikat (Sukiman, Subardjo dan Yusuf Wibisono), karena ketiga orang itu dianggap menjalankan razia anti komunis. Meskipun demikian, Masyumi memberikan kesempatan Kabinet untuk menjalankan program tersebut.[45]

Hanya saja, Kabinet Wilopo menghadapi sandungan hebat ketika terjadi "Peristiwa Tanjung Morawa" yang mengakibatkan pemerintah tersebut jatuh.[46] Peristiwa diawali ketika Mosi Tidak Percaya dari Sidik Kertapati, anggota SAKTI (Serikat Tani Indonesia) yang menjadi simpatisan PKI, tentang pembagian tanah konsesi di Tanjung Morawa (Sumatera Timur) yang diajukan pada 23 Mei 1953. Sasaran utama mosi itu adalah kebijakan Menteri Dalam Negeri Mohammad Roem, dan menuntut daerah-daerah perkebunan Belanda supaya tidak dikembalikan. Ia juga meminta agar orang-orang yang sudah ditahan berhubungan dengan peristiwa bentrokan dengan polisi di Tanjung Morawa supaya dibebaskan.[47]

Mosi Sidik Kertapati itu menimbulkan perpecahan di tubuh Kabinet. Kalangan PNI mendukung Mosi tersebut dan PNI Sumatera Utara malah mengancam akan memisahkan diri apabila PNI dalam parlemen tidak mendukung mosi itu. Pada akhirnya Pimpinan PNI memutuskan untuk membubarkan kabinet pada 2 Juni 1953, karena baik Masyumi maupun Wilopo sendiri keberatan untuk memberhentikan Mohammad Roem dari kabinet.[48]

Usai kejatuhan Kabinet Wilopo, ada dua pendapat untuk mengatasi krisis pemerintah tentang siapa yang harus ditunjuk Presiden Seokarno sebagai formatur kabinet.

Pendapat pertama supaya Wakil Presiden Mohammad Hatta memimpin tugas formatur untuk memimpin kabinet presidensial dengan pengalaman pada masa darurat sebagaimana pada zaman revolusi. Pendapat ini didukung oleh semua kelompok Masyumi dan PSI. Alasannya, seperti dikemukakan Natsir, karena negara dalam keadaan bahaya, meskipun tak ada bukti yang tampak.[49]

Oleh kalangan oposisi, kecuali PKI, usulan ini ditolak karena kabinet presidensial waktu itu adalah tidak konstitusional, bertentangan dengan UUDS yang menganut sistem parlementer. PNI pun, melalui Sidik Djojosukarto tidak menerima kabinet presidensial dan Hatta untuk membentuk kabinet, kecuali dia mundur dari jabatan wakil presiden. Sidik tidak melihat ada tanda-tanda bahwa negara dalam keadaan bahaya, dan setiap negara pasti mempunyai kesulitan-kesulitan.[50]

Alternatif usulan kedua datang dari pimpinan PKI. Aidit mengusulkan agar dibentuk Pemerintahan Front Persatuan. Pemerintahan itu tidak memasukkan Masyumi dan PSI dalam kabinet, karena keduanya dianggap terlalu mengutamakan kepentingan asing.[51] Anggota parlemen dari Perti dan Parindra serta PNI mengusulkan dengan nama yang berbeda, yaitu "Kabinet Perdamaian Nasional," tetapi Masyumi dan PNI tetap dapat membentuk kabinet, yang disebut sebagai "Kabinet Inti."[52] Kesepahaman mengenai susunan dan posisi jabatan yang harus diberikan satu sama lain. [53]

Di dalam Kabinet Ali I Masyumi tidak ikut, dan menyatakan diri sebagai partai oposisi.[54] Pada kabinet ini masuk menteri-menteri kelompok Komunis atau sedikitnya telah di bawah pengaruh PKI yaitu Fraksi Progresif dan BTI, seperti Iwa Kusumasumantri (Fraksi Progresif, Menteri Pertahanan) dan Sadjarwo (BTI). Dari kalangan Islam, adalah

partai-partai yang tergabung dalam Liga Muslimin Indonesia, yaitu NU dan PSII.[55]

Masyumi menyatakan diri sebagai oposisi terhadap Kabinet Ali I, dengan berlandaskan kepada prinsip *"amar Ma'ruf nahyi munkar"*.[56] Oposisi yang dimaksudkan Masyumi adalah sama seperti yang terdapat di negara-negara penganut demokrasi, yakni sebagai *oposisi loyal*. Tanggung jawab sebagai oposisi adalah sama ketika duduk dalam pemerintahan yaitu bertanggung jawab terhadap perbaikan nasib rakyat dan kesejahteraan.[57] Untuk memperkuat peran sebagai partai oposisi, Natsir selaku ketua umum partai meminta agar segenap elemen partai memperkuat dan mengatur organisasi partai lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, ia mengatakan agar anggota Masyumi selalu waspada dan mengawasi supaya tidak terprovokasi oleh pihak lain.[58] Natsir tidak secara terang-terangan menyebutkan PKI sebagai biang provokasi yang mengakibatkan Masyumi memilih tidak ikut Kabinet Ali, tetapi PKI justru mempengaruhi proses pembentukannya.

Pada bagian lain Natsir melihat dukungan PKI terhadap Pemerintah Ali telah menjadikannya meninggalkan asas-asas demokrasi yang dipegang teguh oleh pemerintahan sebelumnya seperti terkandung dalam UUDS RI. Natsir mencontohkan, antara lain, ketika pemerintah mencoba untuk memberangus suara oposisi. Radio Republik Indonesia (RRI) dilarang menyiarkan pendapat dan berita dari pihak oposisi yang dipandang dapat merugikan kedudukannya. Kebebasan pers terhalangi. Aparat keamanan diberi instruksi untuk melarang para pembicara pada rapat-rapat umum yang membicarakan pemberontakan Madiun dan melancarkan kritik terhadap pemerintah.[59]

Sikap oposisi Masyumi ini secara internal menjadikan partai semakin solid, bahkan pada taraf tertentu telah

melahirkan radikalisme seperti ditunjukkan pada figur seperti Mohammad Isa Anshary. Isa Anshary bersama-sama pimpinan Masyumi Jawa Barat, seperti Rusjad Nurdin, membentuk *Front Anti Komunis* (FAK) pada 12 September 1954. FAK mendapat dukungan luas terutama dari para Pimpinan Masyumi di Jawa Barat. Bahkan para ulama di Majelis Syura Masyumi Jawa Barat,[60] berdasarkan konferensi 23-24 Oktober 1954, menganjurkan agar di seluruh Indonesia dibentuk FAK sebagai pernyataan pendirian secara tegas dan tantangan perlawanan terhadap ideologi Komunisme.

FAK bertujuan untuk membendung bahaya komunisme dan menyelamatkan negara dari kebangkrutan dan perbudakan. Rupa-rupanya waktu pendirian FAK bersamaan dengan peringatan peristiwa Pemberontakan Madiun 1948. Melalui FAK Isa Anshary mengarahkan semua upaya untuk memperluas dan memanfaatkan isu anti komunisme sebagai senjata politik utama. Alasan mendesak perjuangan anti komunisme adalah pertumbuhan komunis yang pesat di masa Kabinet Ali I. Menurut Isa Anshary,[61] PKI tumbuh pesat karena dua sebab. *Pertama*, Kabinet Ali Sastroamidjojo melindungi PKI. PKI memegang "posisi penggerak" di parlemen, sebab dukungannya mutlak diperlukan oleh Kabinet. *Kedua*, dibukanya kedutaan oleh Moskow dan Peking di Jakarta, yang memberi nasehat dan dukungan kepada PKI.

Pendapat Isa Anshary ini sejalan dengan apa yang disimpulkan Donald Hindley[62] ketika mengamati pertumbuhan pesat PKI pada masa Kabinet Ali I. Sedikitnya ada tujuh keuntungan yang diperoleh PKI selama Pemerintahan Ali I. *Pertama*, PKI dan ormas-ormasnya dibiarkan berjalan dengan larangan yang minim dari gangguan-gangguan pemerintah selama periode Kabinet Ali tersebut. PKI di bawah kepemimpinan Aidit telah mengembangkan ormas-ormas

terbesar di Indonesia: PKI tumbuh dari 130 ribu anggota menjadi sekitar satu juta; SOBSI telah mengonsolidasikan organisasinya; organisasi-organisasi petani komunis berfusi, dan mengklaim anggotanya meningkat dari sekitar 400 ribu hingga 3,5 juta; Pemuda Rakyat meningkat anggotanya dari 70 ribu hingga 500 ribu; dan GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia) dari 75 ribu anggota meningkat hingga 400 ribu.

Kedua, keuntungan kerjasama antara kaum Nasionalis dan komunis ditunjukkan dengan suatu seksi penting PNI serta dengan Soekarno. *Ketiga*, kerjasama dengan kaum Nasionalis membiarkan PKI mendapatkan kembali kehormatan nasionalisnya. *Keempat*, sebuah persetujuan dengan partai-partai pemerintah untuk tidak menyerang satu sama lain selama masa kampanye –yang menuntut tugas kaum komunis untuk memperoleh kemenangan dukungan massa menjadi lebih mudah. *Kelima*, dukungan komunis terhadap Kabinet Ali membiarkan kabinet untuk menduduki masa jabatannya dengan bulan-bulan yang lebih lama daripada yang akan dijalani, dan tiap-tiap bulan kabinet pimpinan PNI yang mengeluarkan telah meningkatkan kerenggangan di antara dua partai tersebut. Ini secara khusus terjadi ketika kabinet tergantung secara langsung atas suara PKI. *Keenam*, dukungan komunis membiarkan kabinet untuk menduduki jabatan lebih lama, dan juga membiarkan PNI untuk mengonsolidasikan jabatannya atas pegawai negeri sipil, khususnya pegawai pemerintahan di pedesaan, hingga menjadikan PNI partai tunggal dalam pemilu September dan Desember 1955. Ini berarti bahwa masa depan keseimbangan parlementer akan dijauhkan dari Masyumi. *Ketujuh*, dukungan PKI terhadap pemerintah memberikan PKI kebebasan penuh untuk menyerang kaum anti komunis, khususnya Masyumi dan PSI, dengan mengurangi kekhawatiran tindakan

pemerintah melawan serangan-serangan tersebut. Pada bagian lain, pemerintah pada September 1953 melarang demonstrasi-demonstrasi oleh kaum anti komunis atas peristiwa Pemberontakan Madiun.

PKI merasa terancam oleh serangan ofensif aktivis Masyumi di FAK. Aidit menuduh FAK sebagai "anak-anak buah Van der Plas".[63] FAK telah menyalahi lambang Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun begitu, Aidit menawarkan kepada Masyumi juga terhadap PSI untuk bekerjasama dalam persatuan nasional.[64] Usulan tersebut tidak mendapat sambutan sama sekali. Bahkan, tawaran kerjasama itu dianggap akan merugikan Masyumi sendiri karena PKI bertentangan dengan ideologi dan cita-cita Masyumi. Sejalan dengan penolakan FAK itu, dengan sarkastis PKI itu sendiri ditahbiskan menjadi partai orang-orang kafir yang singkatannya menurut pers Masyumi sebagai "Sekali PKI tetap P(artai) K(afir) I(ndonesia)".[65] Pemikiran FAK di atas tampaknya masih memiliki kaitan di masa revolusi fisik, di mana kalangan Masyumi mencurigai setiap upaya merangkul kelompok politik Islam oleh kalangan Kiri. Hal ini bisa dilihat ketika Tan Malaka, tokoh Komunis sejak masa pergerakan kemerdekaan sebelum Perang Dunia II dan ikut pula di dalam *Comintern,* berusaha mempersatukan kelompok Nasional, Islam dan Komunis dalam ***Persatuan Perjuangan.*** Organisasi ini mengingatkan kita pada upaya Josef Broz Tito membentuk *triplexplatform* antara Nasionalisme, Sosialisme dan Islam.[66] Penolakan Masyumi terhadap uluran tangan Aidit tersebut di atas pun, nampaknya diwarnai oleh kekhawatiran seperti dialami pada masa revolusi.

Pada bagian lain, pernyataan Isa Anshary di atas juga didukung oleh anggota DPP Masyumi lainnya, yaitu Jusuf Wibisono.[67] Ia mengatakan bahwa kabinet Ali I ini sebenarnya

telah menjadi kuda tunggangan PKI, meskipun kalangan PNI menolak anggapan demikian. Jusuf Wibisono mengritik "Manifes Pemilihan Umum" PKI yang menyatakan bahwa rakyat sudah tidak suka lagi terhadap Masyumi dan PSI. Pernyataan ini merupakan suatu kepalsuan untuk menjatuhkan Masyumi-PSI di mata rakyat, yaitu dengan ketidakikutsertaan Masyumi dan PSI dalam Kabinet Ali I. Dengan begitu, seolah-olah rakyat tidak percaya lagi kepada Masyumi dan PSI.

Pada awal berdiri Kabinet Ali I santer ide pembentukan "barisan sukarela" untuk mengatasi gangguan keamanan di daerah-daerah oleh gerombolan bersenjata seperti DI/TII, MMC, dan Bambu Runtjing. Ide tersebut muncul sebagai reaksi terhadap prioritas pertama program pemerintah di bidang keamanan dalam negeri. Di kalangan Kiri muncul usulan dari Persatuan Bekas Pejuang Seluruh Indonesia (Perbepsi) supaya dibentuk "Batalyon Sukarela" untuk membantu pemerintah mengatasi gangguan keamanan tersebut. Bahkan Perbepsi menyatakan sanggup menyiapkan satu batalyon untuk tiap satu karesidenan. [68]

Ketika Jusuf Wibisono mangajukan mosi tidak percaya terhadap kebijakan pemerintah tentang Irian Barat,[69] Aidit mengejek Masyumi (dan PSI) dengan menyatakan bahwa Kabinet Ali (I) itu 10 kali lebih baik dari Kabinet Masyumi-PSI.[70] Keburukan Kabinet Masyumi menurut Aidit ditunjukkan dengan adanya kebijakan anti komunis dalam "Razia Agustus" pada masa Kabinet Sukiman, Front Anti Komunis yang didukung sayap Masyumi Jawa Barat, dan Muhammad Roem (saat menjabat Mentri Dalam Negeri Kabinet Wilopo) telah memerintahkan bawahannya untuk mentraktor kaum petani demi kepentingan perkebunan asing di Tanjung Morawa.

Jusuf Wibisono meminta Kabinet Ali I bubar, karena

tidak lagi didukung oleh PIR dan pemberhentian Menteri Ekonomi Isqak Tjokrohadisurjo dengan diterimanya Mosi Tjikwan (Masyumi). Namun, Kabinet Ali justru tetap mempertahankan diri, dengan dukungan utama dari PKI. Seharusnya, pemerintah Ali belajar kepada tiga kabinet sebelumnya, yaitu apabila salah satu menteri dikenai mosi tidak percaya oleh perlemen karena dianggap telah melakukan kesalahan maka kabinet semestinya solider dengan menteri bersangkutan untuk mundur bersama-sama dari kabinetnya.[71]

Pada akhirnya Kabinet Ali I pun bubar, bukan karena oposisi di dalam parlemen, melainkan karena pertentangannya dengan pemimpin Angkatan Darat. Pejabat Angkatan Darat menolak campur tangan politik dari pemerintah terhadap Angkatan perang, terutama dari Iwa Kusumasumantri selaku Menteri Pertahanan. Partai oposisi melihat Iwa Kusumasumantri sebagai kawan dekat Soekarno dan kaum Komunis. Ketika Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mundur, Iwa tanpa berkonsultasi dengan Petinggi Angkatan Darat lainnya telah menunjuk Kolonel Bambang Utojo sebagai KSAD baru. Ketidaksukaan terhadap Bambang Utojo oleh kalangan pejabat Angkatan Darat lainnya adalah karena dia diyakini tidak memiliki kualifikasi profesional untuk menduduki jabatan tertinggi di Angkatan Darat. PKI menyambut penunjukan itu dengan pernyataan di *Harian Rakyat* (22 Juni 1955) sebagai "Taktik Kelompok '17 Oktober' Kembali Kalah", dan Partai meminta Kolonel Zulkifli Lubis (Wakil KSAD) dipecat karena anti komunis.[72] Saat pelantikan Bambang Utojo sebagai KSAD pada 27 Juni 1955, para perwira memboikot tidak hadir, sebagai bentuk penolakan pengangkatan tersebut. Zulkifli Lubis sebagai salah seorang yang menolak penunjukan Bambang Utojo menyebut "peristiwa 27 Juni" sebagai

rongrongan terhadap TNI.[73]

Krisis di tubuh Angkatan Darat itu pada gilirannya membawa krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pada 29 Juni 1955 Zainul Baharuddin, ketua Seksi Pertahanan di perlemen, mengajukan mosi tidak percaya kepada kebijakan Iwa Kusumasumantri, dan mosi itu ditandatangani oleh seorang anggota dari partai pemerintah yaitu Hadjarati dari Parindra.[74] Pada 12 Juli 1955 Parindra menyerukan menterinya di kabinet untuk mundur, kemudian diikuti oleh PSII (13 Juli 1955), NU (20 Juli 1995). Partai Rakyat Nasional dan Partai Buruh (20 Juli 1995). Iwa Kusumasumantri jauh sebelumnya, pada tanggal 13 Juli 1955, sudah mengundurkan diri dari kabinet. Kemudian pada tanggal 24 Juli 1955 Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandat kabinet kepada Wakil Presiden Hatta.[75]

Segera setelah menerima pengembalian mandat dari Kabinet Ali, Wakil Presiden menunjuk Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi), Wilopo (PNI) dan Mr. Assaat (Non Partai) sebagai formatur kabinet. Ketiga orang tersebut dianggap memiliki hubungan dekat dengan Hatta ketika ia menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Ketiga anggota formatur gagal membentuk kabinet, ketika PNI-Masyumi merumuskan perlu tidaknya Hatta kembali sebagai Perdana Manteri dan menanggalkan jabatan Wakil Presiden.[76]

Selanjutnya Hatta menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai formatur tunggal. Burhanuddin merundingkan susunan Kabinet dengan PNI, dengan pihak Masyumi sebagai perdana manterinya. Namun PNI tidak setuju dengan tawaran pos-pos jabatan menteri yang ditawarkan formatur dan selanjutnya menyatakan diri sebagai Partai Oposisi Kabinet Burhanuddin. Pada akhirnya Burhanuddin beralih kepada partai-partai kelompok Liga Muslimin Indonesia (NU dan PSII)

serta partai-partai kecil nasionalis. Masyumi mendapat empat kursi kabinet (Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian, Menteri Negara). Lainnya, dua kursi kabinet masing-masing untuk NU, PSII, PSI, PIR Hajairin, PRN, Partai Buruh, dan Parindra. Satu kursi kabinet masing-masing diberikan kepada Partai Katolik, Parkindo, PIR, Partai Rakyat Indonesia (PRI), dan Fraksi Demokratik.[77]

Prioritas program kabinet yang dicanangkan pemerintah Burhanuddin adalah pemulihan kewibawaan moral pemerintah khususnya kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat setelah "peristiwa 27 Juni". Program lainnya yang dianggap mendesak adalah penyelenggaraan pemilu untuk membentuk parlemen dan pemerintahan baru.

Sejak peristiwa 27 Juni hingga terbentuknya kabinet baru, telah memunculkan penghinaan dan kemarahan para pendukung Kabinet Ali yang tercermin dalam ekspresi perasaan mereka dalam bentuk bahasa yang kuat di media pers. PKI sendiri merasa menjadi terisolasi dari PNI. Kedua partai itu menjadi takut terhadap Angkatan Darat, dan PKI menduga kemungkinan besar akan terjadi serangan seperti pada masa Kabinet Sukiman dalam "Razia Agustus" 1951. Pada saat krisis Kabinet Ali, dilaporkan bahwa sejumlah pemimpin PKI meninggalkan ibukota dan menghilang ke tempat yang tidak diketahui. Akan tetapi, setelah kabinet dibentuk dan Presiden Soekarno kembali ke tanah air sepulang dari ibadah haji, alasan-alasan untuk keraguan mereka menjadi banyak menghilangkan beban berat mereka.[78]

Pers dari dua partai oposisi tersebut, yaitu *Harian Seluruh Indonesia* (PNI) dan *Harian Rakyat* (PKI), menyuarakan kebencian terhadap Kabinet Burhanuddin. Integritas pribadi menteri-menteri baru menjadi sasaran mereka. Tujuh minggu di antara masa pembentukan kabinet dan pemilihan anggota

parlemen, pers PNI dan PKI secara sinis menyebut kabinet sebagai tradisi atas "orang-orang jujur dan disegani", frasa kalimat Hatta ketika membentuk komisi formatur (Sukiman, Wilopo dan Assaat). Dengan frasa itu, pers kedua partai oposisi mengejek Kabinet Burhanuddin sebagai "Kabinet B.H." Inisial nama perdana menteri sekaligus eufemisme orang Belanda (*buste houder)* atau dalam bahasa orang Indonesia yang berarti "kutang payudara perempuan."[79] Secara tidak langsung Kabinet Burhanuddin menurut partai oposisi adalah "Kabinet Banci".

Pemerintah Burhanuddin membuat prestasi besar dalam memulihkan kepercayaan Angkatan Darat, melalui pengangkatan kembali Abdul Haris Nasution sebagai KSAD baru setelah sebelumnya dipecat karena peristiwa 17 Oktober 1952. Namun, kondisi demikian turut memberikan kesempatan tentara dalam dunia politik. Prestasi lainnya adalah terselenggaranya pemilu untuk anggota DPR dan Konstituante pada 29 September dan 15 Desember 1955. Hasil pemilu telah menepis dugaan bahwa Masyumi sebagai partai pemerintah akan mendulang suara melalui kecurangan-kecurangan. Akan tetapi ternyata perolehan suara Masyumi menduduki urutan kedua di bawah PNI dari empat besar partai perolehan suara tertinggi (yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI), meski menang di 10 dari 15 daerah pemilihan. Hubungannya dengan Belanda, Kabinet Burhanuddin secara sepihak telah membatalkan Uni Indonesia-Belanda. Pada saat bersamaan juga dipertimbangkan langkah serupa untuk membatalkan keputusan Perjanjian KMB.[80]

Seusai pengumuman hasil pemilu dan pembagian kursi DPR, Kabinet Burhanuddin pada 2 Maret 1956 mengundurkan diri dan menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno, untuk selanjutnya dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil

pemilu. Sebenarnya kabinet ini seandainya terus bekerja tidak apa-apa selagi tidak ada mosi tidak percaya dari parlemen. Akan tetapi secara etika politik Demokrasi Parlementer, kabinet ini dengan sukarela menyerahkan mandatnya setelah berhasil melaksanakan pemilu baik untuk anggota DPR maupun Konstituante.[81]

Tiadanya partai pemenang mayoritas dalam pemilu 1955 menjadi kesulitan tersendiri dalam proses pembentukan kabinet. Masyumi yang sudah lama tidak menginginkan PKI dalam kabinet, mengusulkan agar hanya tiga besar perolehan suara pemilu yang harus memimpin kabinet berikutnya. Sikap Masyumi itu berarti bahwa ia dapat bekerjasama dengan semua partai, kecuali PKI. Natsir mengatakan bahwa partainya menginginkan kabinet nanti susunannya dapat menjamin kestabilan pemerintah. Oleh karena itu, kabinet koalisi antara Masyumi-PNI-NU akan menjadi jaminan bagi stabilitas pemerintahan disebabkan oleh tidak adanya perselisihan yang prinsip dibandingkan apabila PKI ikut bergabung. Dengan demikian, infiltrasi dalam kabinet hasil pemilu harus diberantas apalagi masuknya Komunis (PKI) dalam kabinet.[82]

Menurut Natsir, faktor prinsipil yang ditekankan Masyumi untuk menolak PKI masuk kabinet adalah karena PKI tidak menghormati paham agama. Hal ini ditegaskan untuk menolak pernyataan bahwa PKI menerima Pancasila.[83] Padahal sudah diketahui bahwa sangat tidak mungkin PKI yang dalam ajaran komunisnya menganut paham atheis dan "agama adalah sebagai candu" dapat menerima sila Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila.

Lama sebelum Natsir menolak PKI masuk kabinet hasil pemilu, Aidit mengusulkan agar dibentuk suatu kabinet yang terdiri atas PNI, NU, PSII dan Perti dengan dukungan Komunis walaupun tidak masuk kabinet. PKI hanya akan memberi

dukungan "real dan kritis" sepanjang program kabinet dapat diterima.[84]

Usulan Masyumi menolak PKI diajak dalam kabinet bertentangan sama sekali dengan gagasan Presiden Soekarno yang mengharapkan kabinet hasil pemilu adalah "kabinet berkaki empat", yang ditopang oleh empat partai besar. Ternyata, desakan Masyumi berhasil ketika Ali Sastroamidjojo sebagai formatur kabinet menyusun kabinet tanpa PKI. Kabinet Ali II yang dilantik pada 24 Maret 1956 terdiri atas PNI (5 kursi menteri), Masyumi (5 kursi), NU (5 kursi), sedangkan Parkindo, PSII, dan Partai Katolik masing-masing memperoleh dua kursi jabatan menteri. Satu jabatan menteri diberikan kepada IPKI, Perti dan nonpartai.

Masyumi sangat menyambut baik susunan kabinet baru tersebut. Menurut Masyumi, Kabinet Ali-Roem –untuk menyebut Kabinet Ali II- bertugas sangat penting untuk menghancurkan anasir komunis dalam pembangunan, yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Contoh pembangunan yang dapat menghancurkan anasir komunis adalah dengan politik perburuhan sedemikian rupa, sehingga organisasi-organisasi buruh komunis tidak mendapat paksaan lagi di Indonesia. Demikian pula terhadap politik pertanian, kabinet mampu membangun sedemikian rupa, sehingga orang-orang yang bersarang dalam serikat-serikat tani dapat dengan sendirinya gulung tikar.[85]

Taktik PKI yang menginginkan apabila "Masyumi turut, PKI turut, PKI tidak, Masyumi tidak", menurut Masyumi merupakan taktik yang tidak memiliki kesopanan politik.[86] PKI dianggap tidak punya malu karena menuduh menteri-menteri Masyumi "tidak akan bersungguh-sungguh melaksanakan program Kabinet Ali-Roem" dan bahkan akan menyabotase kabinet tersebut, yaitu menghancurkan

pemerintah dari dalam. Upaya PKI tersebut dianggap sebagai upaya mengadu domba antara Masyumi dengan PNI-NU.[87]

PKI sebagai oposisi betul-betul merisaukan Masyumi. Propaganda-propaganda PKI banyak merugikan citra Masyumi, seperti dengan mengatakan bahwa dengan tidak ikutnya PKI dalam kabinet adalah karena "Masyumi sejalan dengan politik kolonialisme Belanda," "Masyumi tidak menginginkan perdamaian nasional".[88] Menyikapi serangan gencar dari PKI yang ditujukan hanya kepada Masyumi saja dari Pemerintah Ali II, maka Ketua Umum DPP Masyumi Mohammad Natsir menjelaskan bahwa:

"Setiap serangan dari pihak mereka yang dilakukan dengan secara *zakelijk* akan dilayani sepenuhnya oleh Masyumi. Sebab kalau serangan mereka didiamkan saja atau tidak digubris, akibatnya akan menguntungkan PKI, ... adalah menjadi kewajiban Masyumi untuk membalas serangan PKI, karena partai-partai lainnya rupa-rupanya tidak akan melayaninya."[89]

Pembentukan Kabinet Ali II tersebut mengundang kerisauan Presiden Soekarno, karena PKI sebagai salah satu empat besar pemenang pemilu tidak diikutkan dalam pemerintahan. Ia sangat tidak suka dengan "kuda kaki tiga", untuk menyindir Kabinet Ali II itu.[90] Menurut Mohammad Roem, pendirian Soekarno tersebut bertentangan dengan UUDS yang masih berlaku ketika itu. Alasannya, pertama, Soekarno adalah Presiden Konstitusional, sehingga tidak boleh mencampuri urusan pemerintahan begitu saja. Kedua, secara biologis (fisik) kuda berkaki empat adalah benar, karena kuda kaki empat lebih baik dari kuda kaki tiga. Tetapi dari perumpamaan "kuda kaki tiga" menunjukkan Soekarno tidak menginginkan sistem demokrasi parlementer, tetapi sistem totaliter yang tidak menghendaki oposisi. Selain itu, ungkapan

Soekarno itu juga dalam rangka mendapatkan dukungan PKI.[91]

Ketidakpuasan Presiden Soekarno terhadap sistem pemerintah parlemen ditandai dengan beberapa pernyataannya yang ingin "mengubur partai-partai" dan dibentuk sebuah Kabinet Gotong Royong yang mencakup semua golongan dan partai politik. Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno mengajukan konsepsinya bahwa Indonesia lebih cocok dengan "Demokrasi Terpimpin" sebagai "Demokrasi Indonesia asli" yang berdasarkan musyawarah dan gotong royong. Demokrasi Parlementer yang tengah diterapkan dianggap sebagai model Barat, sehingga tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Demokrasi Parlementer mensyaratkan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang tinggi, sementara penduduk Indonesia tidak demikian.[92] Ide penguburan partai-partai dan dibentuknya Kabinet Gotong Royong sebagai konsekuensi menuju Demokrasi Terpimpin diucapkan ulang Presiden Soekarno pada 22 Februari 1957 yang terkenal dengan sebutan "Konsepsi Presiden."[93]

Natsir menanggapi konsepsi Presiden itu dengan mengatakan bahwa "Demokrasi Parlementer Barat" tidak tergantung kepada tingkat pengetahuan dan taraf kehidupan rakyat. Menurut Natsir, pada hakikatnya demokrasi bersandar pada kesatuan rakyat, cinta kebenaran dan rasa keadilan yang kuat.[94]

Pada artikelnya di salah satu edisi *Suara Masjumi*, Natsir mengatakan bahwa "Demokrasi dalam anggapan saya adalah salah satu falsafah yang tidak terbatas kepada sistem pemerintahan, tetapi demokrasi adalah *way of life* yang melingkupi segi rohani dan jasmani."[95] Perihal ide Soekarno tentang "penguburan partai-partai" Natsir menganggap pemikiran itu merupakan tindakan intimidasi untuk menekan

jiwa perjuangan demokrasi karena oposisi dalam rangka sistem Demokrasi Parlementer Barat dalam anggapan Bung Karno sebagai penyakit, suatu perintang yang harus diberantas,[96] harus dilawan.

Tanggapan pedas dari kalangan Masyumi perihal Konsepsi Presiden Soekarno itu disampaikan pula oleh Mohammad Isa Anshary, tokoh garis keras dan radikal di Masyumi. Ia menyatakan bahwa konsepsi Bung Karno mengancam kehidupan agama, karena dalam konsepsi pembentukan Kabinet Gotong Royong akan pula memasukkan PKI ke dalamnya. Padahal, PKI adalah "partai anti Ketuhanan".[97] Penolakan Isa Anshary juga didukung oleh organisasi induknya, Persis, yang juga anggota istimewa Masyumi.[98]

Di tengah-tengah pertarungan wacana "Demokrasi Terpimpin" itu, Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil Presiden pada akhir 1956. Di daerah-daerah juga meletus pemberontakan menandai sikap ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Baik konsepsi presiden maupun pemberontakan daerah mengakibatkan kinerja Kabinet Ali II tidak optimal. Selain itu, di dalam tubuh kabinet juga terjadi keretakan dengan mundurnya sejumlah Menteri dari Masyumi, PSII dan Partai dari Kabinet. Kondisi demikian mempercepat kejatuhan kabinet hasil pemilu tersebut. Akhirnya, Kabinet Ali II jatuh pada 14 Maret 1957. Sejak Kabinet Ali II itu Masyumi tidak ikut Konsepsi Presiden dalam kabinet Gotong Royong yang dipimpin Juanda (Non-Partai), sampai akhirnya Masyumi dipaksa bubar pada Agustus 1960 karena ada sebagian pimpinan Masyumi yang ikut terlibat dalam PRRI di Sumatera Barat.

Catatan

[1] Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1915 – 1965*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1987), hlm 118.

[2] Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1962), hlm 137.

[3] "Pernjataan Samsuridjal: Pendjelasan tentang Masjumi", *Berita Masjumi*, No 72/II (25 April 1951), hlm 2. Selain faksi Sukiman dan Natsir, Herbert Feith melihat bahwa dalam kedua faksi Masyumi tersebut terdapat kelompok kepemimpinan administrator dan *solidarity maker*. Herbert Feith juga melihat bahwa faksi Sukiman didukung dan lebih dipercaya oleh kelompok NU Jawa yang secara umum tidak mempercayai Natsir. Anggota-anggota kelompok Sukiman sangat berhubungan dekat secara pribadi dengan para pemimpin PNI dan Presiden Soekarno. Faksi Natsir sendiri memiliki hubungan baik dengan kelompok fundamentalis radikal yang kebanyakan non-Jawa, terutama Minangkabau, dan secara khusus lebih dekat dengan Partai Sosialis Indonesia. Lihat Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy*, hlm 137.

[4] "Pernjataan Sjamsuridjal", hlm 2.

[5] "Ulang Tahun ke XI Masjumi: Masjumi dan Revolusi Indonesia, *Suara Masjumi*, No. 30/31 th ke XI (10 November 1956), hlm 2

[6] "Susunan Kabinet Pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Suara Masjumi*, No. 7 – 8 tahun ke 5 (Agustus – September 1950), hlm. 5.

[7] Bibit Suprapto. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985) hlm 128

[8] Soebagijo I.N., *Jusuf Wibisono*, hlm 89. Pidato Natsir di hadapan peserta Muktamar kelima Masyumi di Jakarta (27 Januari sampai 1 Februari 1951) berlawanan dengan kritik Jusuf Wibisono tersebut. Ketika menjadi formatur Kabinet, Natsir sebagai pimpinan Masyumi meminta kursi Perdana Menteri, Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Pertahanan, dan Kementrian Pendidikan dan Pengajaran (PPK). Di luar kelima pos kementrian tersebut, Kementrian Agama secara otomatis diserahkan kepada formatur. Hanya saja, PNI sebagai partai kedua mayoritas di parlemen yang diajak ikut oleh Masyumi dalam kabinet Natsir justru meminta jabatan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian PPK. Lihat, Mohammad Natsir. "Politik Beleid DPP Masyumi 1950". *Suara Partai Masjumi*, No. 2 th ke-6 (Februari 1951), hlm. 22 – 23.

[9] M. Rusjad Nurdin. "Suatu Kekurangan dalam Program Kabinet

Natsir". *Suara Partai Masjumi.* No. 9 – 10 th ke-5 (Oktober – November 1950), hlm 21.

[10] Mohammad Natsir, "Politik Beleid", hlm 23, "Statemen Dewan Pimpinan Masjumi", tanggal 25 September 1950, *Suara Partai Masjumi,* No 9 – 10 th. ke-5 (Oktober – November 1950), hlm 26.

[11] Moehammad Roem. "Politik Luar Negeri Republik Indonesia Selama 6 tahun." *Suara Partai Masjumi.* No 8 – 9 th ke-6 (Agustus 1951) hlm 9

[12] "Masjumi dan Boicot Irian." *Suara Partai Masjumi,* no.12 th ke-6 (Januari 1951) hlm 3.

[13] "Pokok Perhatian," *Suara Partai Masjumi,* No. 12 th ke-6 (Januari 1951), hlm. 3.

[14] "Keterangan Dewan Pimpinan Partai Masjumi" tanggal 20 Djanuari 1951 dalam *Suara Partai Masjumi,* No. 61 th. ke-1 (23 Pebruari 1951), hlm 5.

[15] "Pemberontakan Madiun Bukan Pahlawan Bangsa," *Tanah Air* (1 November 1950), hlm 1; "Amir CS Pemberontak", *Tanah Air* (November 1950), hlm. 1.

[16] Soebagijo IN, Jusuf Wibisono, hlm 93, Bibit Suprapto, *Perkembangan Kabinet,* hlm 133, Burhanuddin Harahap. "Sedjarah PP 39-51, *Suara Partai Masjumi,* No. 1 th ke-7 (Februari 1952), hlm 6. M. Junan Nasution, salah seorang anggota Masyumi, melihat keganjilan setalah mosi Hadikusumo berhasil menjatuhkan Kabinet Natsir, yaitu bahwa partai yang menjatuhkan seharusnya membentuk satu kabinet baru menurut aturan Demokrasi Parlementer untuk melaksanakan isi mosi tersebut. Lihat, M. Junan Nasution, "PP No.39 dalam Parlemen", *Suara Partai Masjumi,* No. 1 th. ke-7 (Januari 1952), hlm 8.

[17] Menteri-menteri dari PIR tersebut yaitu Wongsonegoro (Menteri Kehakiman) dan Prof. H. Johanes (Menteri Pekerjaan Umum).

[18] Abdul Halim menduduki jabatan Menteri Pertahanan. Setelah pengunduran dirinya, jabatan kementerian ini dirangkap oleh Natsir.

[19] Harsono Tjokroaminoto menduduki jabatan Menteri Negara.

[20] "Pemerintahan Nasional Koalisi dan Bebas dari KMB Keinginan PKI". *Tanah Air* (24 Maret 1951) hlm. 2.

[21] M. Junan Nasution, "PP No. 39 dalam parlemen", hlm. 8

[22] Di luar Wachid Hasjim (Anggota Istimewa Masyumi dari NU) yang menjabat Menteri Agama, nama-nama menteri tersebut adalah Mr. Achmad Subardjo (Menteri Luar Negeri), Jusuf Wibisono (Menteri Keuangan), dan

Samsudin (Menteri Sosial). Lainnya yang dianggap di luar kubu Natsir atau Sukiman di dalam faksi Masyumi yang tetap menjabat. Lihat, Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy,* hlm. 180, 182; "Kabinet Dr. Sukiman Terbentuk", *Berita Masjumi,* No. 73, Th. II (31 April 1951), hlm. 1.

[23] "PKI Sanggup Hentikan Oposisinja", *Suara Merdeka* (24 Mei 1951) hlm. 1.

[24] Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy,* hlm. 187-188.

[25] *Ibid.,* hlm. 187 – 192.

[26] Lihat, "Tangkapan dan Geledahan di Jogja", *Nasional* (21 Agustus 1951), hlm. 1; dan "Tangkapan di Jogja/Magelang", *Nasional* (22 Agustus 1951), hlm. 1.

[27] "Tangkapan Besar2an Anggota2 Parlemen, Pemimpin2 Kiri", *Nasional* (17 Agustus 1951), hlm. 1

[28] "Penangkapan Atas Orang2 Masjumi", *Suara Partai Masjumi,* No. 11/12 Th. Ke-6 (November-Desember 1951), hlm. 2.

[29] *Ibid.*

[30] *Ibid.*

[31] "Kabinet Sukiman-Suwirjo Djatuh", *Suara Partai Masjumi,* No. 3 Th. ke-7 (Maret 1952), hlm. 2.

[32] *Ibid.* Lihat pula Moh. Roem, "Indonesia dan MSA", *Suara Partai Masjumi,* No. 3 Th. Ke-7 (Maret 1952), hlm. 3-4, 23.

[33] Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy,* hlm. 201.

[34] "Putusan Pimpinan Masjumi Tentang Penandatanganan "Mutual Security Act", *Berita Masjumi,* No. 127 Th. II (21 Februari 1951), hlm. 1; Lihat Juga Soebagjo IN, *Wilopo 70 Tahun,* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1979), hlm. 103.

[35] *Ibid.,* hlm. 205; "Kabinet Sukiman-Suwirjo Djatuh", hlm. 2.

[36] Wilopo sebagai formatur sekaligus sebagai Perdana Menteri, dianggap lebih dekat hubungannya dengan Prawoto dibandingkan dengan Sidik Djojosukarto yang menjadi Ketua PNI. Pengaruh Prawoto juga tampak dari rekruitmen sejumlah menteri dari kelompok Natsir dan Sjahrir. Lihat, Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy,* hlm. 228.

[37] *Ibid.,* hlm. 228-229.

[38] *Ibid.,* hlm. 230.

[39] *Ibid.,* hlm. 231.

[40] Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, penerjemah Farid Wajidi (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 65, menyebutkan bahwa PBNU mengeluarkan pernyataannya pada tanggal 8 April 1952. Bandingkan dengan Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy*, hlm. 236. Kajian menarik untuk melihat perpecahan Masyumi-NU serta restrospeknya di masa kemudian, dapat dibaca Remy Madiner dan Andree Feilard,"At the Sources of Indonesian Political Islam's Failure: The Split Between the Nahdhatul Ulama and The Masjumi in Restrospect," *Studia Islamica*, hlm. 3, No. 2 Vol. 6 (1999), hlm. 1-38.

[41] Greg Fealy, "Wahab Chasbullah, Traditionalism and the Political Development of Nahdhatul Ulama," dalam Greg Berton dan Greg Fealy, *Nahdhatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia*, (Clayton, Australia: Monash Asia Institute, Monash University, 1996), hlm. 25. Lihat pula, "Kongres Nahdhatul Ulama Setudju Pisahkan Diri dari Masjumi", *Berita Masjumi*, No. 135 Th. II (6 Mei 1952), hlm. 1; "Nahdhatul Ulama Resmi Memisahkan Diri dari Masjumi", *Suara Masjumi*, No. 142 Th II, (6 Agustus 1952), hlm. 1.

[42] Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy*, hlm. 238

[43] *Ibid.*, Hlm. 242-244.

[44] Soebagijo. I.N. Yusuf Wibisono hlm. 119.

[45] D.N. Aidit (1963) dalam *Ibid.*

[46] Sandungan hebat lainnya yang dialami Kabinet Wilopo adalah (1) "Peristiwa 17 Oktober" yakni aksi Angkatan Darat yang menuntut Pembubaran Parlemen di Jakarta pada 17 Oktober 1952, karena dianggap mencampuri urusan angkatan bersenjata; dan (2) Mosi Rondonuwu yang mengusulkan agar dibuka Kedutaan Besar RI di Moskow, yang dikecam sebagai merugikan politik luar negeri yang bebas aktif. Lihat, *Ibid.*

[47] *Ibid.*, hlm. 120-121.

[48] *Ibid.*, hlm. 122. Lihat pula. Herbet Feith, *The Decline of Canstitutional Democracy*, hlm. 296.

[49] *Harian Abadi* (9 Juni 1953) dalam Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy*, hlm. 332.

[50] *Harian Antara* (9 Juni 1953) dalam *Ibid.*

[51] *Harian Abadi* (9 Juni 1953) dalam *Ibid.*

[52] *Ibid.*

[53] Mula-mula ditunjuk Mukarto Notowidigdo (PNI). Setelah Mukarto gagal, ditunjuk formatur lainnya dari Masyumi yaitu Burhanuddin pun

gagal. Barulah ketika Wongsonegoro menjadi formatur, kabinet berhasil dibentuk. Jalannya proses pembentukan Kabinet Ali I dari sudut pandang Masyumi dapat dibaca dalam "Sekitar Pembentukan Kabinet", *Suara Partai Masjumi*, No. 8 Tahun. VIII (Agustus 1953), hlm. 5-7.

[54] "Seruan Ketua Umum Masjumi Moh. Natsir", *Suara Partai Masjumi*, No. 8, Tahun. VIII (Agustus 1953), hlm. 3.

[55] Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy*, hlm. 339-340.

[56] "Seruan Ketua Umum Masyumi Moh. Natsir", hlm. 3.

[57] Mohammad Natsir, "Kemerdekaan Membawa Tanggung Djawab djuga untuk Partai Oposisi", *Suara Partai Masjumi*. No. 8 Tahun. VIII (Agustus, 1953). hlm. 4.

[58] Seruan Ketua Umum, Moh. Natsir". hlm. 3

[59] Mohammad Natsir, "Bela Dasar Demokrasi Yang Sedang Terantjam". *Suara Masjumi*, No. 2. Tahun. IX (20 Juli 1954) hlm. 4

[60] "Perjataan Madjelis Sjura Masjumi Djawa Barat", *Aliran Islam*. No. 65, Tahun. VIII (Oktober – November – Desember 1954), hlm. 56-57.

[61] Donald Hindley, *The Communist Party of Indonesia 1951-1963* (Berkeley dan Los Angeles: University of California Press, 1964), hlm. 251. *Ibid.*, hlm. 213.

[63] "Tinjauan Dalam Negeri", *Suara Masjumi*, No. 9 Tahun. IX (10 Oktober 1954), hlm. 2.

[64] "Aidit; PKI Sedia Ulurkan Tangan Kpd. Masjumi-PSI:, *Suara Merdeka* (30 Desember 1954), hlm. 3.

[65] "Untuk Diperhatikan". *Suara Merdeka*,No. 9 Tahun. IX (10 Oktober 1954), hlm. 6.

[66] Josef Karbel, *Tito's Communism*. (N.P: The University of Denver Press. 1951, hlm. 48.

[67] Jusuf Wibisono. "Kabinet Ali-Wongso Harus Bubar". *Suara Partai Masjumi*, No. 10 Tahun. IX (20 Oktober 1954) hlm.1

[68] D.P. Perbepsi Menyambut Baik Keterangan Pemerintah, Snggup Siapkan 1 Bataliyon Tiap Keresidenan", Nasional (2 september 1953), hlm. 2; "Statemen Perbepsi: Madju Terus Membasmi Teror DI, TII dan agen-agennya". *Nasional* (18 Agustus 1953), hlm. 2.

[69] "Tindjauan Dalam Negeri". *Suara Partai Masjumi*. No. 16/17 Th. X (20 Desember 1954) hlm. 10.

[70] "D.N. Aidit: Kita Menginginkan Pemerintah yang 10 kali Lebih Baik dari Pemerintah Ali. Tetapi Pemerintah Ali 10X Lebih Baik dari Masyumi PSI". *Harian Rakyat* (9 Desember 1954), hlm. I.

[71] Jusuf Wibisomo, "Pemerintah Ali timbulkan kemelaratan Lebih Banyak Pada Rakyat", *Suara Masjumi*, No. 16/17 Th. X (20 Desember 1954) hlm. 5.

[72] Herbert Feith. *The Decline of Constutional Democracy*, hlm. 399. lihat pula, Donald Hindley. *The Communist*, hlm. 250.

[73] "Peristiwa 27 Juni Disebabkan karena Rongrongan Politik terhadap TNI", *Suara Merdeka* (11 Juli 1955), hlm. 2.

[74] Herbert Feith, *The Decline of Constutional Democracy.*

[75] Pengembalian mandat Kabinet Ali I kepada Wapres Hatta, karena pada saat bersamaan Presiden Soekarno sedang menunaikan ibadah haji. *Ibid.*, hlm. 401-402.

[76] *Ibid.*, hlm. 416.

[77] *Ibid.*, hlm. 417-419.

[78] *Ibid.*, hlm. 423-424.

[79] *Ibid.*, hlm.424.

[80] *Ibid.*, hlm. 455.

[81] Bibit Suprapto, *Perkembangan Kabinet*, hlm. 175.

[82] "Tiga Besar Harus Memimpin Kabinet Nanti" *Suara Masyumi.* No. 2 Tahun. XI (10 Januari 1956) hlm. I.

[83] *Ibid.*

[84] Donald Hindley. *The Communist*, hlm. 225.

[85] "Tinjauan Dalam Negeri". *Suara Masjumi.* No. 8, Tahun. XI (20 Maret 1956), hlm.4.

[86] *Ibid.*, hlm.5.

[87] *Ibid.*, hlm.5.

[88] "Tindjauan Dalam Negeri". *Suara Masjumi.* No. 10, Th XI (1 April 1956), hlm. 3-4.

[89] "Tindjauan Dalam Negeri". *Suara Masjumi.* No. 13, Th XI (12 Mei 1956) hlm. 2.

[90] Mohammad Roem. *Tindjauan Pemilihan Umum I dan II dari Sudut Hukum.* (Surabaya: Budaya Documenta. 1971), hlm. 16.

[91] *Ibid.*, hlm 17.

[92] M. Isa Anshary, "Natsir Kontra Bung Karno tentang Demokrasi" *Daulah Islamiyah*, No. 2 Th. I (Februari 1957) hlm. 3-4.

[93] Herbert Feith dan Lance Castles (Ed.). *Indonesian Political Thinking 1945-1965*, (Ithaca. New York: Cornell University Press. 1970), hlm. 81-89.

[94] M. Isa Anshary, "Natsir Kontra Bung Karno," hlm. 6.

[95] Mohammad Natsir. "Beberapa Pikiran tentang Demokrasi". *Suara Masjumi.* No. 1, Th. XII (1 Maret 1957), hlm. 1.

[96] *Ibid.*

[97] M. Isa Anshary. "Konsepsi Bung Karno Mengancam Kehidupan Agama", *Daulah Islamiyah*, No. 3 Th. I (Maret 1957) hlm. 4-6.

[98] "Persatuan Islam (Persis) Menolak Konsepsi Bung Karno", *Suara Masjumi*, No. 1, Th. XII (1 Maret 1957), hlm. 8.

BAB III
PERTARUHAN IDEOLOGIS PEMILU 1955

PEMILIHAN UMUM (PEMILU) bagi Masyumi telah menjadi perhatian khusus sejak Muktamar III di Kediri pada 1947, sehingga ditetapkan sebagai salah satu urgensi programnya.[1] Karena suasana Revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajah kembali oleh Belanda, program tersebut menjadi terkatung-katung. Sejak penyerahan kedaulatan, Masyumi diberi kesempatan memimpin pemerintahan, pemilu menjadi program penting tiap kabinet sampai dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR. UU ini berhasil ditetapkan pada masa Kabinet Wilopo, dimana Mohammad Roem dari Masyumi menjabat sebagai Menteri dalam Negeri yang bersama-sama Menteri Kehakiman harus bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemilu.

Masyumi memandang strategis pelaksanaan pemilu.

Selain sebagai bentuk kesanggupan bahwa Masyumi berjuang di atas dasar legal-parlementer, juga menjadikannya sebagai sarana demokrasi guna mewujudkan tujuan Masyumi. Lebih jauh dikatakan bahwa tanpa DPR yang dipilih oleh rakyat, maka demokrasi akan menjadi hampa.[2] Apalagi sampai dengan delapan tahun Indonesia merdeka, saat UU Pemilu itu dibuat, DPR yang bersifat sementara ini dianggap belum mencerminkan perimbangan yang sesungguhnya dari perwakilan rakyat.

Karena strategis dan pentingnya pemilu untuk tujuan Masyumi, maka pada 24 Februari 1953 Majelis Syura Masyumi mengeluarkan fatwa tentang hukum pemilu.[3] Fatwa menyebutkan bahwa pemilu untuk membentuk parlemen dan konstituante adalah wajib hukumnya. Untuk kemenangan Islam dan umatnya, maka wajib (*fardhu*) *'ain* hukumnya atas tiap-tiap Muslim dan Muslimat yang *mukallaf* (dari segala golongan, kalangan, dan tingkatan) untuk turut serta berjuang dalam pemilihan tersebut. Karena prasyarat tersebut, Fatwa Majelis Syura mewajibkan kepada tiap-tiap Muslim agar hanya memilih calon-calon yang memperjuangkan dan mendukung cita-cita politik Islam.

Tujuan dan strategi pemilu itu tentu saja tidak akan terwujud dengan sendirinya, sehingga perlu diperjuangkan. Masyumi melihat gelagat adanya pihak-pihak yang tidak menginginkan pemilu berjalan baik seperti dimaksudkan UU Pemilu. Gelagat itu pertama-tama datang dari Pemerintah Ali Sastroamidjojo, yang dipimpin oleh PNI. Perdana Menteri Ali Satroamidjojo merencanakan pemilu baru akan dilaksanakan dalam waktu 16 bulan terhitung sejak Januari 1954, sehingga pemerintah terkesan tidak serius. Padahal, dalam Program Kabinet Wilopo sebelumnya direncanakan pemilu akan dilaksanakan pertengahan 1954.[4] Dengan begitu, kabinet Ali

I akan berjalan sekitar dua tahun. Padahal, menurut Mohammad Natsir,[5] Kabinet Ali hanyalah bersifat darurat sebelum dibentuk pemerintah baru berdasarkan pemilu.

Pemerintah Ali ini mendapat dukungan PKI, walaupun PKI sendiri berkedudukan sama seperti Masyumi yaitu tidak ikut Kabinet Ali I. Namun oleh Masyumi dikatakan bahwa kedudukan PKI bukannya sebagai oposisi, melainkan menjadi "kepala dapur" Kabinet Ali.[6] Sikap oposisi Masyumi terhadap Kabinet Ali berakibat langsung dalam sebagian kampanye pemilu. Setiap kali Masyumi mengisolasi Komunis (PKI) atau mencap mereka ekstrimis, memperkuat hubungan Kabinet Ali dengan PKI.[7]

Kampanye Pemilu dimulai 31 Mei 1954. Ketika tanda gambar partai disahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), pada saat itulah terbuka jalan untuk kampanye berdasarkan tanda gambar.[8] Pada saat pengajuan tanda gambar partai, persoalan muncul ketika PKI mengajukan nama daftar "PKI dan Orang-orang Yang Tak Berpartai" dengan tanda gambar "Palu Arit" dan kemudian disahkan PPI.

Masyumi mengajukan protes kepada PPI atas pengesahan tanda gambar PKI tersebut dengan beberapa alasan. *Pertama*, dianggap bertentangan dengan UU Pemilu. *Kedua*, dengan pengesahan PPI, seolah-olah orang-orang yang tidak berpartai hendak digolongkan secara *de facto* ke dalam lingkungan PKI dengan cara manipulasi. Karena itu PKI dianggap memperkosa kebebasan dan kemerdekaaan serta menjual sendi-sendi Demokrasi. *Ketiga*, PKI akan mempergunakan kesempatan itu untuk menyarankan kepada rakyat yang belum tinggi kecerdasannya, di kampung, bahwa tanda gambar "palu arit" sudah disahkan oleh yang berwajib buat PKI dan orang-orang yang tidak berpartai. *Keempat*, merujuk pasal 41 ayat (1) UU No. 7/1953 harus dibedakan

yang mengajukan tanda gambar adalah partai dan organisasi atau calon perseorangan. Dalam PP No. 9/1954 pasal 23 ayat (20) dijelaskan bahwa "nama yang diajukan oleh partai adalah nama partai itu atau singkatan daripada itu."[9]

Singkatnya, alasan penolakan Masyumi tersebut adalah bahwa pertama, secara yuridis keputusan PPI mengesahkan tanda gambar PKI bertentangan dengan UU No. 7/1953 dan PP No. 9/1954. Kedua, dari sudut politis, maksud PKI dengan membawa-bawa nama "orang tak berpartai" dalam daftarnya adalah satu bentuk manipulasi yang pasti akan disalahgunakan dalam menghadapi pemilu.[10]

Demi melihat pengalaman sejak Pemberontakan Madiun pada bulan September 1948, maka manipulasi yang telah diperbuat dalam pengajuan tanda gambar sebagai peserta pemilu oleh PKI, dianggap sebagai ancaman tersendiri buat Masyumi. Di dalam brosur *Waspadalah Menghadapi Pemilihan Umum,*[11] Masyumi menguraikan perilaku di masa lampau dan rencana jahat PKI di masa depan menghadapi pemilu, serta alasan PKI mendukung Pemerintah Ali meskipun bukan bagian dari kabinet. PKI merupakan "hambatan yang besar bagi tercapainya cita-cita Umat Islam Indonesia yag hendak melaksanakan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan perseorangan, masyarakat, dan negara.[12]

Brosur Masyumi tersebut ditanggapi oleh PKI dengan mengatakannya sebagai "pemalsuan dan kepalsuan" Masyumi.[13] Dengan begitu, brosur Masyumi itu dianggap telah membenarkan "Manifes Pemilihan Umum PKI" yang memperingatkan bahwa dengan pemilu Masyumi (dan PSI) berarti "membiarkan Indonesia dikuasai oleh mereka yang membela kaum Imperalis, komprador dan tuan tanah... membiarkan penindasan, penghisapan, korupsi, dan kekacauan terus berlangsung."[14]

Serangan anti komunis para tokoh Masyumi gencar dilakukan, baik di lapangan kampanye maupun perdebatan di media cetak. Sjarif Usman, ketua dewan redaksi *Suara Masyumi* dan ketua bidang penerangan di DPP Masyumi, di depan massa Islam Kota Solo pada 10 April 1955 menyerukan kepada orang-orang Islam yang menjadi anggota PKI, SOBSI atau organisasi-organisasi Komunis yang lainnya agar meninggalkan partai atau organisasi Komunis dan kembali ke dalam partai/organisasi Islam. Seruan itu, oleh Sjarif Usman dimaksudkan bukan karena membenci Komunis, melainkan "sayang dan sedih jika umat Islam itu hanyut terus dalam kesesatannya sampai ke akhir hayatnya" lantaran memasuki partai/organisasi Komunis.[15]

Tokoh Masyumi lainnya, yaitu Sukiman Wirjosandjojo di hadapan massa kampanyenya di Alun-alun Kota Garut pada 11 September 1955, mengingatkan agar umat Islam waspada terhadap pengkhianatan kaum Komunis. Ia mengingatkan supaya umat Islam berjaga-jaga dari kemungkinan PKI mengacaukan jalannya pemilu.[16] Pada bagian lain Muhammad Isa Anshary,[17] salah seorang faksi radikal di Masyumi dan pendiri Front Anti-Komunis, dalam kampanyenya mengutuk Komunis sebagai "kafir", bahkan mendorong agar orang Komunis tidak dikuburkan secara Islam.

Di luar arena kampanye, Muktamar VII Masyumi di Surabaya pada 23-27 Desember 1954, Majelis Syura mengeluarkan fatwa bahwa komunisme itu "kufur", dan penganutnya dihukum sebagai "kafir" apabila dengan pengetahuan, keyakinan, dan kesadaran mengikuti komunisme.[18] Menurut Masyumi, fatwa tersebut bukan semata-mata untuk mencapai kemenangan jangka pendek ketika menghadapi pemilu. Fatwa dikeluarkan sebagai kewajiban mengingatkan umat Islam dari bahaya Komunisme.[19]

Di dalam media terbitan resminya, Masyumi mengimbangi kampanye yang dilakukan PKI terhadap massa petani, nelayan, dan kaum buruh.[20] Berita pelantikan Pengurus Serikat Nelayan Islam Indonesia Tanjung Priok sangat menonjolkan perhatian besar Ketua DPP Masyumi terhadap nasib kaum nelayan. Demikian pula terhadap nasib kaum buruh dan tani, Masyumi perlu memperhatikan ketentraman kemakmuran kedua golongan tersebut agar tercapai kemenangan dalam pemilu. Menurut Masyumi, "ketentraman mereka (petani dan buruh) adalah ketentraman dan kestabilan politik, dan kuburan (bagi) kaum komunis.[21]

Pada dasarnya pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPR dan Konstituante berhasil diselenggarakan oleh kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu 29 September untuk memilih 257 anggota DPR, sedangkan pada 15 Desember 1955 untuk memilih 514 anggota Konstituante. Pemilu diikuti oleh 118 peserta (partai, calon perorangan dan golongan) untuk pemilihan DPR dan 91 peserta untuk konstituante. Dari para peserta tersebut tidak semua ikut di daerah pemilihan, sehingga tidak semua surat suara memuat 118 tanda gambar.

Keberhasilan pelaksanaan pemilu oleh kabinet yang dipimpin Masyumi tersebut ternyata tidak bisa menghasilkan kekuatan mayoritas partai. Pada Tabel II tampak bahwa pemilu pada gilirannya telah memetakan partai politik pada tiga aliran ideologi politik baik di DPR maupun Konstituante. Di DPR masing-masing aliran kelompok partai perolehannya sebagai berikut: Islam 45,2% (116 dari 257 kursi), Nasional 27, 6% (71 dari 257 kursi), dan Sosialis Kiri (Komunis) 15,2% (39 dari 257 kursi). Kursi-kursi selebihnya dibagi kepada partai-partai kecil beraliran nasionalis atau sosialis/marxis.[22]

Tabel II

Keseluruhan Perolehan Suara dan Persentase Empat Besar Peserta Pemilu 1955 untuk DPR serta Peringkat Masyumi[23]

No	Daerah Pemilihan	PNI		Masyumi		NU		PKI		Urutan Masyumi	Ket.
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
1	Jawa Timur	2.251.069	22,8	1.109.742	11,2	3.370.554	34,1	2.299.602	23,2	Ke-4	
2	Jawa Tengah	3.019.568	33,5	902.387	10,0	1.772.306	19,6	2.326.108	25,8	Ke-4	
3	Jawa Barat	1.541.927	22,1	1.844.442	26,4	673.552	9,6	775.634	10,8	Ke-1	
4	Jakarta Raya	152.031	19,6	200.460	26,0	120.667	15,7	96.363	12,0	Ke-1	
5	Sumatera Selatan	213.766	14,6	628.386	43,1	115.938	7,2	176.900	12,1	Ke-1	
6	Sumatera Tengah	42.558	2,7	797.692	50,7	71.959	4,6	90.513	5,8	Ke-1	
7	Sumatera Utara	329.657	14,0	789.910	36,4	87.773	4,2	258.875	10,8	Ke-1	
8	Kalimantan Barat	64.195	13,7	155.173	33,2	37.945	8,1	8.526	1,8	Ke-1	
9	Kalimantan Selatan	46.440	5,9	252.296	31,9	380.874	48,6	17.210	2,24	Ke-2	
10	Kalimantan Timur	43.067	25,0	44.347	25,7	20.796	10,7	8.209	4,8	Ke-1	
11	Sulawesi Utara-Tengah	102.855	13,6	189.198	25,1	21.619	2,9	33.204	4,4	Ke-1	
12	Sulawesi Tenggara-Selatan	46.334	4,2	446.255	40,0	159.193	14,3	17.831	1,6	Ke-1	
13	Maluku	30.218	9,1	117.440	35,4	-	-	4.792	1,4	Ke-1	
14	Nusa Tenggara Timur	65.027	5,8	157.972	13,9	17.684	1,6	5.008	0,5	Ke-3	Partai Katolik (1), Parkindo (2)
15	Nusa Tenggara Barat	464.398	37,1	264.719	21,1	104.282	8,3	66.067	5,3	Ke-2	
Jumlah Seluruh Indonesia		8.434.653	22.3	7.903.886	20.9	6.955.141	18.4	6.179.914	16.4	Ke-2	

Masyumi sendiri dalam pemilihan anggota DPR hanya mendapat 57 kursi (naik 29,5% dari 44 kursi sebelumnya DPRS), sedangkan di Konstituante Masyumi mendapatkan 112 kursi anggota. Rincian perolehan jumlah kursi Masyumi di DPR dan Konstituante dapat dilihat pada Tabel III.

Tabel III
Keseluruhan Jumlah Suara dan Kursi Pemilu 1955
Untuk DPR dan Konstituante[24]

No	Partai	Suara di DPR	Jumlah Kursi	Suara di Konstituante	Jumlah Kursi
1	Partai Nasional Indonesia	8.434.653	57	9.070.218	119
2	Masyumi	7.903.886	57	7.789.619	112
3	Nahdlatul Ulama	6.955141	45	6.989.333	91
4	Partai Komunis Indonesia	6.176.914	39	6.232.512	80
5	Partai Serikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	8	1.059.922	16
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.325	8	988.81	16
7	Partai Katolik	7.70.740	6	748.591	10
8	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	5	695.932	10
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	539.824	4	544.803	8
1C	Persatuan Tarbijah Indonesia (Perti)	483.014	4	465.359	7
11	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	2	152.892	2
12	Partai Rakyat Nasional	242.125	2	220.652	3
13	Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPRI)	200.419	2	179.346	3
14	Partai Murba	199.588	2	248.633	4
15	Partai Buruh	224.167	2	332.047	5
16	Partai Rakjat Indonesia (PRI)	206.261	2	134.011	2
17	Partai Rakjat Indonesia (PRI) Wongsonegoro	178.481	1	162.42	2
18	Partai Indonesia Raya (PIR)-Hazairin	114.644	1	101.509	1
19	Persatuan Marhaen Indonesia (Perinai)	149.287	1	164.386	2
20	Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki)	178.887	1	160.456	2
21	Gerakan Rakyat Indonesia (Gerinda)	154.792	1	157.976	2
22	Partai Persatuan Daya	146.054	1	169.222	3
23	Partai Rakjat Indonesia Merdeka (PRIM)	72.532	1	143.907	2
24	Angkatan Kebangkitan Umat Islam Indonesia (AKUI)	81.532	1	84.862	1
25	Angkatan Communis Muda (Acoama)	64.514	1	55.844	1
26	Partai Persatuan Tharikat Indonesia (PPTI)	85.131	1	74.913	1
27	Partai Rakjat Desa (PRD)	77.919	1	39.278	1
28	R. Soedjono Prawirosoedarmo dan Kawan-Kawan	53.305	1	38.356	1
29	Gerakan Pilihan Sunda (Gerpis)	18.227	-	35.035	1
30	Partai Tani Indonesia	33.894	-	30.06	1
31	Radja Keprabonan dan Kawan-Kawan	42.27	-	33.66	1
32	Gerakan Banteng RI	35.632	-	39.874	1
33	Partai Indonesia Raja (PIR)-Nusa Tenggara Barat	33.457	-	33.823	1
34	Panitia Pendukung Pencalonan (PPP) L.M. Idrus Effendi	46.835	-	31.988	1
	Irian Barat		3		-
	Jumlah		260		514

Secara nasional Masyumi menduduki urutan kedua[25] dari empat besar perolehan suara partai, meskipun Masyumi dikatakan sebagai *"All Indonesian Party"* karena memenangkan perolehan suara di 10 dari 15 daerah pemilihan yang berhasil melaksanakan pemilu.[26] Kesepuluh daerah pemilihan itu adalah Jawa Barat, Jakarta Raya, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Tengah, Sulawesi Tenggara dan Selatan, dan Maluku.

Pemilu 1955 sungguh mengecewakan Masyumi. Harapannya untuk meraih suara mayoritas dengan dukungan umat Islam Indonesia, ternyata tidak terwujud. Hasil pemilu memperlihatkan bahwa ternyata PNI dan PKI yang tidak memperjuangkan dan tidak mendasarkan perjuangannya kepada Islam mendapat suara banyak. Sungguhpun demikian, Masyumi masih menyimpan harapan yang banyak terhadap keberhasilan perjuangan membentuk UUD di Konstituante. Dengan keyakinan penuh, Masyumi berpendirian bahwa "hanya Undang-Undang Dasar Islam yang bisa melenyapkan Komunis di Indonesia.[27]

Catatan:

[1] Urgensi Program 1947 bagian I butir (b) "Menuntut supaya Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen) yang benar-benar berdasar atas kedaulatan Rakyat selekas-lekasnya dibentuk dengan jalan pemilihan umum dan tidak melalui Dewan-Dewan Perwakilan di daerah-daerah. Empat bulan setelah tuntutan ini diajukan, Dewan Perwakilan Rakyat itu harus sudah dibentuk." Lihat. "Dokumentasi Masjumi", hlm. 34; Mohammad Natsir, "Detik-Detik Sedjarah Menghadapi Pemilihan", *Suara Partai Masjumi.* No. 3, Th. Ke-VIII (Maret 1953). hlm. 10.

[2] Amanat Pimpinan Partai Masjumi pada 7 November 1953 dalam *Inilah Chittahku: Hendak Kemana Masjumi?* (Jakarta: Departemen Penerangan Pimpinan Partai Masyumi, 1953), hlm. 7.

[3] "Putusan Madjelis Sjura". *Suara Partai Masjumi.* No. 3. Th. VIII (Maret 1953), hlm. 28.

[4] "Pidato Moh. Isa Anshary", pada Pemandangan Umum Babak I di Parlemen. 31 Agustus 1953 dalam *Suara Partai Masjumi.* No. 9. Th. Ke-VIII (September 1953), hlm. 23.

[5] "Pidato Moh. Natsir", pada Pemandangan Umum Babak I di Parlemen. 28 Agustus 1953 dalam *Suara Partai Masjumi.* No. 9, Th. Ke-VIII (September 1953) hlm. 6.

[6] "Pidato Moh. Natsir", pada Pemandangan Umum Babak II di Parlemen. 6 September 1953 dalam *Suara Partai Masjumi.* No. 9, Th. Ke-VIII (September 1953), hlm. 8.

[7] Herbert Feith. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia.* penerjemah Nugroho Katjasungkana, Masri Maris dan Parakitri T. Simbolon. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 1999). hlm. 20.

[8] Herbert Feith mencatat bahwa "kampanye tahap pertama" sudah dimulai sejak Rancangan UU Pemilu disahkan menjadi UU. Sedangkan "kampanye tahap kedua" dimulai pada 31 Mei 1954 seperti telah dikemukakan. *Ibid.*, hlm. 10

[9] Protes Masyumi itu mendapat dukungan dari Nahdhatul Ulama dan PSII, yang juga ikut sebagai salah satu peserta pemilu. Lihat, "Nama Daftar PKI dan Orang jg Ta' Berpartai". *Suara Masjumi.* No. 2. Th. Ke-IX (20 Juli 1954). hlm. 4.

[10] "Latar Belakang Penghapusan nama 'PKI dan Orang Tak Berpartai", *Suara Masjumi,* No. 3, Th. Ke-X (Februari 1955), hlm. 1.

[11] "Waspadalah Menghadapi Pemilihan Umum," hlm. 6-21.

[12] *Ibid.*, hlm. 17.

[13] Depagitrop CC PKI, *Masjumi Mendjelang Pemilihan Umum dengan Pemalsuan dari Kepalsuan,* (Jakarta: Departemen Agitasi dan Propaganda Central Komite PKI, 1955).

[14] *Ibid.*, hlm. 2.

[15] "Rapat Samudera Masjumi Jg. Luar Biasa di Solo", *Suara Masjumi,* No. 11/12, Th. Ke-X (25 April 1955), hlm. 3. Menjelang pemungutan suara anggota DPR, DPP Masjumi mengeluarkan sebuah buku yang berisi seruan agar kaum Muslim yang memasuki partai komunis (PKI) atau ikut golongan komunis seperti SOBSI, BTI, GERWANI, GERWIS, supaya meninggalkan mereka dan kembali ke dalam Islam. Lihat. *Kami Memanggil!* (Jakarta: DPP Masyumi Bagian Penerangan, 1955). hlm. 3.

[16] Asbiran Aswad, "Tinjauan Dalam Negeri", *Suara Masjumi,* No. 26. Th. Ke-X (20 September 1955). hlm. 5.

[17] Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955.* hlm. 20.

[18] *Putusan Kongres P.P.I. Masjumi Ke-VII tanggal 23 s/d 27 Desember 1954 dan Fatwa 'Alim Ulama Madjlis Sjura Pusat.* Cet. Ke-2 (Medan: Pustaka Sedia, 1955). Hlm. 12.

[19] *Kami Memanggil!,* hlm. 15-16.

[20] "Amanat Ketua Umum Pimpinan Partai Masjumi". *Suara Masjumi,* No. 25 Th. Ke-X (10 September 1955). hlm. 8

[21] "Buruh dan Tani sebagai Saluran Pengembalian Kepertjajaan Masjarakat", *Suara Masjumi.* No. 25 Th. Ke-X (10 September 1955). hlm. 7

[22] Alfian (1971) dalam Ahmad Syafi'i Ma'arif. *Islam dan Politik Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965).* (Jakarta: Gema Insani Press. 1996). hlm. 42-43.

[23] Diolah dari Herbert Feith, *Pemilu 1955,* hlm. 114-115.

[24] Diolah dari A.Van Marle (1956) dalam *Ibid.*, hlm 94: *Harian Pedoman.* 17 Juli 1956 dalam Badruzzaman Busyairi. *Boerhanudin Harahap Pilar Demokrasi.* (Jakarta: PT Bulan Bintang. 1956), hlm. 212-213: dan "Perperincian Kursi2 dalam DPR Baru", *Suara Masjumi,* No. 7, Th. XI (1 Maret 1956) hlm. 1.

[25] PNI (8.434.653 suara Parlemen: 9.070.218 Konstituante). Masyumi (7.903.886 suara parlemen: 7.789.619 suara Konstituante). Nahdlatul Ulama (6.955.141 suara Konstituante). Lihat. Herbert Feith. *Pemilihan Umum 1955.* hlm. 94.

[26] M. Isa Anshary. "Masjumi adalah All Indonesian Party". *Suara Masjumi*. No. 5 Th. Ke-XI (10 Maret 1956) hlm. 1. Jumlah daerah pemilihan seluruhnya berjumlah 16. Hanya daerah pemilihan Irian Barat saja yang tidak bisa melaksanakan pemilu, sehingga diangkat 3 orang anggota DPR dari wilayah pemilihan tersebut.

[27] "Hanja Undang-Undang Dasar Islam jang bisa Melenjapkan Komunis di Indonesia." *Suara Masjumi*. No. 10. Th. XI. (1 April 1956) hlm. 6.

BAB IV

PERDEBATAN IDEOLOGIS DI KONSTITUANTE

ASPEK penting lainnya dari pemilu 1955 adalah terpilihnya anggota-anggota Konstituante. Pasal 134 UUDS 1950 menyatakan bahwa Konstituante bersama-sama Pemerintah bertugas membentuk UUD RI yang baru untuk menggantikan UUD Sementara 1950 itu sendiri.[1] Sebagaimana di DPR, di Konstituante pun terdapat aliran besar lainnya seperti nasionalisme, komunisme dan sosialisme di samping Islam, yang sama-sama tidak memperoleh suara mayoritas dalam pemilu. Seusai pelantikan anggota Konstituante pada 10 November 1956, ternyata persidangannya lebih banyak diwarnai perdebatan tentang dasar negara. Hingga kemudian dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan salah satu keputusannya kembali kepada UUD 1945, persoalan dasar negara masih mengalami kebuntuan dalam pengambilan keputusan Konstituante.

Perdebatan tentang dasar negara di Konstituante secara garis besar terbagi ke dalam tiga golongan pembela gagasan dasar negara, yaitu Islam, Pancasila dan Sosial-Ekonomi. Paling mencolok dari ketiga golongan tersebut, ialah perdebatan antara kelompok pembela dasar negara menurut Islam dan Pancasila. Masyumi bersama partai politik Islam lainnya sama-sama memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Namun yang patut dikemukakan di sini adalah perdebatan anggota-anggota Konstituante dari Masyumi mengenai pembelaan terhadap Pancasila sebagai negara oleh PKI.

Mohammad Natsir memulai pembicaraan di Konstituante dengan menyatakan pendirian Masyumi untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara, yaitu "negara Demokrasi berdasarkan Islam."[2] Menurut Natsir, analisis akhir manusia mengenai dasar negara pada prinsipnya terbagi ke dalam dua bagian yaitu (1) paham sekularisme tanpa-agama dan (2) paham agama.[3] Sekularisme tidak mampu memberikan keputusan jika ada pertentangan pikiran dengan konsepsi masyarakat, hidup sempurna dan sebagainya. Pertentangan konsep itu tidak mungkin diselesaikan dengan paham sekularisme yang pada hakikatnya merelatifkan semua pandangan hidup. Paham sekularisme di Indonesia telah menyuburkan ateisme. Di bagian lain, sebaliknya paham agama telah memberikan dasar negara yang terlepas dari relativisme.[4] Ibarat satu pohon, maka historis-materialisme, ataupun ateisme dan komunisme adalah cabang-cabang dari sekularisme.[5]

Tanggapannya terhadap penerimaan Pancasila sebagai dasar negara oleh kaum Komunisme, Natsir mengatakan bahwa itu menandakan Pancasila lemah secara prinsipil. Pancasila dapat diterima sebagian dengan menolak bagian sila yang lainnya, atau hanya dapat diterima tetapi tidak dipercaya,

karena Pancasila hanya sebagai titik pertemuan lima ide. Akan tetapi tidak ditemukan "*relationship of interdependence*" dari sila yang lima tersebut. Jadi, sangat beralasan apabila Pancasila pun diterima oleh suatu golongan (yaitu PKI) meskipun ada satu sila dari lima sila itu yang tidak dipercayainya.[6]

Sakirman dari PKI mengatakan alasan PKI menerima Pancasila sebagai dasar negara, dan bukannya Komunisme itu sendiri adalah karena menginginkan supaya sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" diganti dengan sila "Kemerdekaan beragama dan berkeyakinan". Alasan lainnya, Pancasila secara obyektif dapat dijadikan sebagai "alat perjuangan... guna mewujudkan tuntutan Revolusi Agustus yang anti imperalisme dan anti feodalisme, guna mewujudkan Keadilan Sosial..."[7]

Penggantian kalimat sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan "Kemerdekaan Beragama", menurut Njoto, wakil Sekretaris Jendral Comite Central PKI sebagai lebih bijaksana.[8] Dengan merujuk kepada sejarah agama, Njoto mengatakan bahwa "politeisme mendahului monotheisme dan sampai detik ini pun monotheisme bukan satu-satunya aliran agama, bahwa di samping monotheisme selalu tetap ada politeisme.[9] Perihal ateisme, ia menyatakan bahwa kaum Atheis tidak hanya ada di dalam Partai Komunis Indonesia, tetapi ada juga dalam PSI, Partai Murba, PNI dan banyak anggota yang beragama Islam, juga Nasrani dan Hindu-Bali. Sekurang-kurangnya, menurut Njoto, anggaran dasar partai-partai tersebut tidak menolak orang-orang atheis untuk menjadi anggotanya.[10]

Dugaan Njoto bahwa di kalangan orang beragama juga ada kaum atheis mendapati kebenarannya ketika seorang K.H. Achmad Dasuki Siradj menjadi salah satu juru bicara Fraksi PKI di Konstituante. Tokoh PKI ini mengingatkan kepada figur di masa pergerakan kemerdekaan yang membela Islam

sekaligus membela Komunisme, yaitu Haji Misbach.[11] Menurut Achmad Dasuki Siradj, alasan Fraksi PKI di Konstituante menolak Islam sebagai dasar negara adalah bukan karena partainya anti agama sebagaimana dituduhkan "oleh para pemakai agama sebagai topeng menuduhnya", melainkan melihat praktik yang dijalankan oleh pembela Islam dari Masyumi yang jelas-jelas merugikan negara dan rakyat.[12] Ia mencontohkan sikap Masjumi yang tidak tegas terhadap gerombolan pengacau DI/TII di Jawa Barat maupun di Aceh. Menurut Ahmad Dasuki Siradj, usulan agar Masyumi memberikan pengampunan umum dianggap sebagai bukti hipokrisi Masyumi, yaitu bertentangan antara apa yang dikatakan para tokoh Masyumi dengan Qur'an yng selalu dijadikan argumentasi menghadapi kelompok Komunis.[13]

Tafsir PKI terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai "kebebasan beragama" yang juga memuat pengertian ateisme dan politeisme di samping arti monotheisme, menurut Kasman Singodimedjo dianggap sama dengan mengartikannya "kebebasan tidak beragama" atau "kebebasan anti Tuhan" atau "kebebasan anti agama."[14] Kasman menambahkan bahwa tidak mungkin menyatukan dan menyamakan arti dari perbedaan antara "beragama" dengan ateisme.

Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara oleh PKI dan bukannya Komunisme dalam pandangan Kasman Singodimedjo merupakan bukti bahwa Komunisme oleh PKI sendiri dianggap tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar negara. Namun ia mengingatkan bahwa PKI tidak konsekuen terhadap ismenya sendiri, sehingga ismenya (ideologi komunisme) ditinggalkan begitu saja saat menghadapi persoalan penting mengenai tegak-tidaknya negara yang ditentukan oleh dasarnya. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara oleh PKI dapat dianggap sebagai siasat saja. PKI hendak

membonceng lewat penerimaan tersebut.[15]

Anggota Masyumi lainnya, M. Rasjad Nurdin, meragukan keseriusan PKI menerima Pancasila karena semestinya PKI menolak Pancasila yang memuat sila pertamanya. PKI tidak mungkin sepenuh hati menerima sila Ketuhanan Yang Maha Esa karena bertentangan dengan Komunisme itu sendiri.[16] Rusjad Nurdin merasa kecewa terhadap sikap PKI itu, karena Pancasila hanya dipakai sebagai "tabir asap" dalam operasi mempraktekkan ideologi Komunismenya.[17] PKI tidak secara jujur menyatakan bahwa mereka sebenarnya memperjuangkan Komunisme sebagai dasar negara. Dengan begitu seharusnya yang berhadapan di Konstituante bukan antara pembela Islam dengan pembela Pancasila, tetapi antara Islam dengan Komunisme.[18]

Pada bagian lain, Mohammad Isa Anshary yang dikenal sebagai faksi radikal di dalam Masyumi menjelaskan mengapa partainya menolak Pancasila sebagai dasar negara. Ia menjelaskan, "Pancasila yang sekarang ini secara keseluruhannya, bukan saja tidak mempunyai daya perlawanan terhadap Komunisme, melainkan justru dalam udara Pancasila aliran komunisme tambah lama tambah kuat dan mendapat tempat.[19] Ini disebabkan oleh karena kehampaan Pancasila, "...sehingga sang penciptanya sendiri, Bung Karno dalam rangka menawar-nawarkan Pancasila dalam kampanye pribadinya, hendak mempertemukan Islam dengan Komunisme, hendak mempertemukan Komunisme dengan Islamisme, hendak mencampurkan antara yang hak dengan batil," atau "hendak mengkompromikan antara kebenaran agama dengan kebatilan anti-agama."[20] Isa Anshary menegaskan bahwa jika tidak cepat "...bayi Pancasila diserahkan ke pangkuan Islam," maka "...dalam waktu yang singkat Pancasila ini akan habis ditelan oleh Buto Terong-

nya imperalisme dan Komunisme. Pancasila itu sendiri tidak kuat dan kuasa mempertahankan diri (dari) ancaman maut ... komunisme dan ateisme.[21] Pernyataan Isa Anshary ini menunjukkan betapa ia tidak sekedar pandai mempergunakan retorika dengan meminjam istilah Jawa, tetapi sekaligus menunjukkan kelemahan Pancasila yang siap dimanfaatkan Komunisme, makhluk raksasa yang rakus dalam mitos Jawa, yaitu makhluk Buto Terong.

Perdebatan tentang dasar negara tersebut pada gilirannya tidak dapat mencapai kompromi. Tugas Konstituante untuk menetapkan sebuah UUD baru menemukan jalan buntu. Pertarungan ideologi yang mengemuka antara Masyumi sebagai barisan utama *(avant garde)* kelompok Islam melawan kelompok pembela Pancasila, terutama PKI, harus menelan kekecewaan. Konstituante sebagai arena perjuangan menjadikan Islam sebagai dasar negara tidak berhasil mencapai tujuannya, setelah beberapa kali pemungutan suara untuk kembali ke UUD 1945 tidak mencapai kompromi. Meskipun Konstituante telah berhasil menyelesaikan 90% tugas konstituante,[22] akhirnya harus dibubarkan lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Catatan:

[1] A. K. Pringgodigdo, *Tiga Undang-Undang Dasar,* cet. Ke-5 (Jakarta: PT. Pembangunan, 1981), hlm. 26.

[2] *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante,* (Bandung: Konstituante Republik Indonesia, 1958), hlm. I: 113.

[3] *Ibid.*, hlm. I: 116.

[4] *Ibid.*, hlm. I: 124.

[5] *Ibid.*, hlm. III: 437.

[6] *Ibid.*, hlm. I: 127.

[7] *Ibid.*, hlm. I: 19-21.

[8] *Ibid.*, hlm. III: 88.

[9] *Ibid.*

[10] *Ibid.*

[11] Lihat "Bab 7, Islamisme versus Komunisme" dalam Takashi Siraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926,* penerjemah Hilmar Farid (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 343-468.

[12] *Ibid.*, hlm. II: 332.

[13] *Ibid.*, hlm. II: 331-332.

[14] *Ibid.*, hlm. I: 167.

[15] *Ibid.*, hlm. I: 180-181.

[16] *Ibid.*, hlm. I: 180-181.

[17] *Ibid.*, hlm. III: 112.

[18] *Ibid.*, hlm. III: 113.

[19] *Ibid.*, hlm. II: 242

[20] *Ibid.*

[21] *Ibid.*, hlm. II: 243.

[22] Ahmad Syafii Maarif. *Islam dan Politik Teori Belah Bambu,* hlm. 44.

BAB V

MEDIA PENDIDIKAN POLITIK ANTI KOMUNIS

DARI uraian-uraian pada Bab II sampai dengan Bab IV, tampak bahwa Masyumi telah memainkan peranan penting sebagai sebuah partai politik yang berusaha mewakili cita-cita politik Islam. Meskipun pada akhirnya Masyumi harus menghadapi situasi tragis karena dipaksa bubar pada Agustus 1960, perjuangannya menghadapi komunisme di Indonesia yang didasari oleh satu kesadaran adanya bahaya ideologi tersebut dengan prinsip-prinsip Islam dan juga demokrasi, pada satu sisi telah memberi makna bagi pendidikan politik bangsa. Dari sinilah penulis berusaha untuk melihat bagaimana paradigma dan materi pendidikan politik yang dijalankan Masyumi, yang patut diambil pelajaran bagi perjuangan demokrasi di Indonesia pada masa yang akan datang.

A. Materi Pendidikan Politik Masyumi

Secara eksplisit tidak ada sistematika pendidikan politik yang disusun oleh Masyumi. Hanya saja sebagai partai politik, upaya pendidikan politik yang diperankan Masyumi tidak terlepas dari fungsi-fungsi lainnya seperti artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, seleksi kepemimpinan, dan komunikasi politik. Secara implisit upaya pendidikan politik Masyumi dapat dilihat dari salah satu usaha mencapai tujuannya, yakni dengan cara "menginsyafkan dan memperluas pengetahuan serta kecakapan Umat Islam Indonesia dalam perjuangan politik.[1]

Perjuangan politik Masyumi yang sangat kuat adalah perjuangan ideologis menghadapi komunisme yang diperjuangkan oleh PKI. Propaganda PKI yang didasarkan atas "Teori-teori Marx, Engels Lenin, Stalin dan fikiran Mao Tse Tung serta koreksi besar Musso,"[2] diyakini oleh Masyumi sebagai propaganda ideologi yang bisa menyesatkan.[3] Propaganda PKI itu antara lain disebarkan melalui media cetak seperti buku-buku tentang Marxisme dan surat kabar resmi mereka, *Harian Rakjat*. Kesesatan dan bahkan kakufuran komunisme secara terang telah dipaparkan di pembahasan Bab II buku ini.

Untuk mengantisipasi propaganda tersebut DPP Masyumi telah mengeluarkan kebijakan bagi para anggota, yang disebut pula sebagai keluarga Masyumi agar membaca buku-buku dan media terbitan mereka seperti majalah dan brosur-brosur politik. Ini merupakan suatu tindakan wajar sebagai sebuah partai yang tidak ingin basis pendukung (massa) partainya ikut terpengaruh ideologi yang merugikan cita-cita perjuangan Masyumi itu sendiri. Pertimbangan dikeluarkan kebijakan itu adalah banyaknya buku yang

tersebar di masyarakat berisi berbagai propaganda ideologi yang menyesatkan, sehingga perlu ditetapkan buku-buku dan bacaan-bacaan partai bagi keluarga Masyumi.[4]

Buku-buku bacaan yang ditetapkan partai hampir semuanya dari kalangan DPP Masyumi sendiri, dan ada salah satunya dari Muhammad Hatta, yang dianggap dekat dengan garis pemikiran "sosialisme-religius" kelompok Natsir-Sjafruddin dan dalam aspek tertentu sejalan dengan garis politik Masyumi. Daftar buku tersebut dapat dilihat pada tabel IV

Tabel IV

Daftar Buku Bacaan Keluarga Masyumi[5]

No.	Judul Buku	Nama Pengarang	Keterangan
1	Kebudajaan Islam	Muhammad Natsir	Masyumi
2	Konsepsi Tata Negara Islam	Zainal Abidin Ahmad	Masyumi
3	Falsafah Perdjoeangan Islam	M. Isa Anshary	Masyumi
4	Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam	M. Sj. Ibnu Amatillah	Masyumi
5	Dasar Perdjoeangan Islam	(tidak disebut)	
6	Soal Agama dalam Negara Modern	Abu Hanifah	Masyumi
7	Politik dan Revolutie	Sjafruddin	Masyumi
8	Beberapa Fasal Ekonomi	Mohammad Hatta	
9	Ekonomi: Teori dan Praktek	Mohammad Hatta	
10	Dari Ekonomi Pendjadjahan ke Ekonomi Kebangsaan	Mr. Th. F.Fruin	(?)
11	Islam Sebagai Ideologie	Mohammad Natsir	Masyumi
12	Pribadi	Hamka	Masyumi
13	Panti Pengetahuan Politik	Tamar Djaja	Masyumi

Pada bagian lain media penerbitan Masyumi yang menjadi bacaan bagi keluarga Masyumi adalah:[6]

1. ***Suara Partai Masjumi***,[7] majalah bulanan Partai. Isinya mengenai garis-garis perjuangan Masyumi, juga pemikiran-pemikiran anggota DPP Masyumi berserta instuksi-instruksi yang perlu untuk seluruh (intern) partai Masyumi.
2. ***Berita Masyumi***,[8] terbit dua kali seminggu. Isinya memuat keterangan langkah politik Masyumi secara singkat serta berita-berita pertumbuhan dan perjuangan Masyumi, dari tingkat pusat sampai ke seluruh daerah.
3. ***Kader Kursus Politik Tertulis (KPPT)***, terbit sekali sebulan. Isinya berupa pengetahuan politik baik umum ataupun politik Islam yang dianggap penting untuk menjadi bahan pengetahuan bagi keluarga Masyumi.
4. ***Pendidikan Politik Islam (Pepolis)***, berupa brosur-brosur politik yang terbit satu bulan sekali. Isinya memuat pemecahan masalah-masalah politik dari segi ke-Islaman dengan tuntas satu masalah setiap terbit.

Di luar keempat media di atas, sebenarnya ada pula media yang menjadi "bacaan wajib" keluarga Masyumi yaitu majalah *Hikmah*[9] yang pemimpin redaksinya adalah Mohammad Natsir, serta Harian *Abadi*. Selain itu, ada brosur bulanan bertajuk "Kursus Politik" yang sebenarnya merupakan perwujudan dari pepolis, di bawah pimpinan Mr. Moh. Daljono dan Tamar Djaja. Edisi perdana "kursus politik" itu memuat bahasan seri Konstitusi Negara, yaitu *Konstitusi*

Sovijet Rusia yang ditulis Mr. Moh. Daljono. Kemudian disusul dengan brosur-brosur kursus politik lainnya, seperti *Konstitusi Negara Turki* (Dr. A. Y. Hilmi) *Politik-Diplomasi Djudjur* (Moh. Natsir), *Islam dan Sosialisme* (Jusuf Wibisono), *Politik Dalam Negeri* (Dr. Sukiman Wirjosandjojo), *Partai dan Organisasi* (Tamar Djaja).[10] Di luar itu, ada pula buku-buku yang dianggap sebagai "buku penting" untuk setiap warga Masyumi, Muslimat, GPII, STII SDII dan SBII, yaitu buku *Islam dan Parlementerisme* (Zainal Abidin Ahmad) serta *Ideologie Islam* (Muhammad Hasbi Asshidiqy).[11]

Perihal pendidikan politik dalam bentuk kursus perkaderan, hanya satu kali dilaporkan secara singkat dalam *Berita Partai Masyumi*.[12] Kegiatan "*Kader Cursus*" tersebut merupakan upaya pertama kali DPP Masyumi bagi para kadernya dari seluruh Indonesia. Kursus yang diselenggarakan selama satu bulan di kantor DPP Masyumi, Jakarta, 1-30 Juni 1950 menyajikan materi ideologis mencakup masalah negara Islam dan perbandingan ideologi Masyumi dengan ideologi partai-partai lain; strategi dan taktik perjuangan mencakup perjuangan partai dalam masyarakat dan parlementer, Pemilihan Umum; Keuangan Umum dan Keuangan Partai, Administrasi Partai; Tata Negara; Organisasi; Filsafat; Perjuangan Umat Islam; Politik Luar Negeri, Politik Dalam Negeri; Muslimat, STII-SBII-SDII, dan lain-lain. Para pemateri kursus tersebut antara lain: Mohammad Natsir, Mr. Jusuf Wibisono, Sjarif Usman, Mr. Suwahjo, M. Isa Anshary, Hamka, Mr. A. Subardjo, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Moh. Ngali, Kiai Taufiq (GPII), Ibu Abu Hanifah (Muslimat), M. Junan Nasution, Ismail Banda (Kementerian Luar Negeri), Djamaluddin Nagum, Mr. Moh Daljono, Burhanuddin Harahap, Wachid Hasjim (Menteri Agama), dan K.H. Abdul Halim.

Kursus kader tersebut sebenarnya akan ditindaklanjuti pada bulan Agustus 1950. Namun, sampai buku ini dibuat, penulis tidak berhasil memperoleh informasi yang cukup perihal tersebut. Dalam kursus kader pertama pun penulis tidak berhasil memperoleh gambaran peserta kursus, seperti dari jumlah peserta, jenis kelamin, jabatan dalam struktur organisasi partai di daerah serta metode dan evaluasi keberhasilan kursus itu sendiri.

Dari beragam pendidikan politik Masyumi, terutama untuk menghadapi pengaruh ideologi lain khususnya pengaruh komunisme, nampaknya Masyumi cenderung reaktif terhadap keadaan yang diciptakan oleh suasana Demokrasi Liberal pasca revolusi fisik. Bahkan sebagai bagian terbesar bangsa Indonesia, umat Islam umumnya dan khususnya Masyumi, ia mewarisi sindrom era kolonialisme sebagai bangsa (umat) yang tertindas selama masa penjajahan bangsa Eropa (Barat). Gejala ini terutama tampak pada gagasan-gagasan pembaharuan dari para pemikir muslim modernis di Timur Tengah, seperti Jamâl al-Din al-Afghani (1839-1897) dan Muhammad 'Abduh (1849-1905), yang mula-mula berkutat pada persoalan fiqh tarekat dan tasawuf. Kemudian aspek pemikiran mereka merambah pada masalah pendidikan, sosial, politik dan ekonomi.

B. Makna Pendidikan Politik Masyumi

Sungguhpun demikian, Masyumi sebagai partai politik modern telah memainkan fungsinya sebagai partai politik dengan cara yang demokratis dan legal. Serangkaian perjuangan Masyumi menghadapi komunisme sepanjang era Demokrasi Liberal memiliki arti penting bagi pendidikan politik bangsa terutama umat Islam Indonesia sendiri. Arti penting

itu dapat dilihat dari perlawanan Masyumi terhadap komunisme yang didasari oleh sistem keyakinan bersifat ideologis bahwa komunisme selain bertentangan dengan prinsip Islam tauhid, juga bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Perjuangan Masyumi tersebut ditempuh dengan cara-cara sebagaimana fungsi partai politik dalam Demokrasi Liberal yang sesungguhnya, baik di lingkungan suprastruktur maupun di infrastruktur politik. Di tingkat suprastruktur, Masyumi menjalankan perannya di bidang eksekutif dan legislatif. Di tingkat infrastruktur, Masyumi menjalankan fungsi-fungsi seleksi kepemimpinan, komunikasi politik, dan sosialisasi politik.

Di bidang eksekutif, selama periode 1950-1957 Masyumi memimpin pemerintahan sebanyak tiga kali yaitu pada masa kabinet Natsir kabinet Sukiman Wirjosandjojo dan kabinet Burhanuddin Harahap. Perannya di bidang legislatif sangat menonjol terutama pada saat Masyumi menjadi oposisi terhadap pemerintahan kabinet Ali I, yakni ketika Masyumi menjadi oposisi loyal terhadap pemerintah yang telah diperalat oleh PKI.

Partisipasi politik yang menonjol sebagai bentuk pendidikan politik yang paling mengesankan dari perjuangan Masyumi di panggung Demokrasi Liberal adalah penyelenggaraan pemilu yang memuaskan pada 1955. Dengan dukungan sistem politik Demokrasi Liberal yang dijamin oleh UUDS, Masyumi secara terbuka menghadapi komunisme yang diperjuangkan PKI di arena kampanye pemilu. Pemilu selain untuk mendulang suara dukungan massa pemilih, juga menjadi arena transmisi politik, sikap-sikap dan pola tingkah laku politik terhadap ancaman bahaya komunisme.

Penyampaian informasi adanya bahaya komunisme,

oleh Masyumi tidak terbatas pada penggunaan media kampanye pemilu, tetapi juga penerbitan pers resmi Masyumi yang berisikan keputusan partai dan pemikiran aktivis/ pengurus partai. Kondisi ini menciptakan penyebaran komunikasi politik yang lebih luas dan permanen dalam bentuk media cetak. Pers yang bebas dan forum kritik terhadap pemerintah di alam Demokrasi Liberal yang cukup luas telah menciptakan ruang utama pendidikan politik bagi rakyat.

Kegagalan Masyumi di panggung parlementer adalah karena begitu tingginya kepercayaan politik elit Masyumi terhadap aturan main (*the rule of the game*) sistem Demokrasi Liberal. Dukungan PKI terhadap presiden Soekarno telah berhasil menghancurkan Masyumi, yang dianggap sebagai "kepala batu". Masyumi terlalu kaku memerankan permainan politik sedangkan PKI dengan siasat politiknya yang "menghalalkan segala cara" telah berhasil memainkan peran politiknya, dengan didukung oleh budaya politik yang paternalistik dan parokhial.

Catatan

[1] Lihat, Pasal IV ayat (1) Anggaran Dasar Masjumi dalam Kepartaian dan Parlementaria Indonesia, (Jakarta: Kementerian Penerangan RI, 1954), hlm. 443.

[2] "Program Umum" PKI (1954) antara lain mengatakan bahwa "seluruh pekerjaan PKI didasarkan atas teori-teori Marx, Angels, Lenin, Stalis dan fikiran Mao Tse Tung serta koreksi besar Musso". Di dalam pasal 4 konstitusi PKI tentang sumpah bagi calon anggota dan anggota PKI dinyatakan bahwa setiap calon anggota dan anggota bersumpah untuk ".....berusaha memperdalam kesadaran dan menguasai prinsip Marxisme-Leninisme..." pasal 6 butir (a) konstitusi PKI juga menyebutkan bahwa anggota PKI berkewajiban untuk "berusaha mempertinggi kesadarannya dan memperdalam pengertian dasar-dasar daripada teori-teori Marx, Angels, Lenin, Stalis dan fikiran Mao Tse Tung serta koreksi besar Musso...." Lihat. " Partai Komunis Indonesia (PKI)." Dalam *Ibid.*, hlm. 492 dan 496-497.

[3] *Suara Partai Masjumi.* No. 11, Th. Ke-5. Desember 1950, hlm. 15.

[4] *Ibid.*

[5] Data diolah dari *Ibid.*

[6] "Surat Terbuka" dalam *Ibid.*, hlm.13-14.

[7] Majalah suara partai Masjumi merupakan nama pengganti sebelumnya yaitu Berita Partai Masjumi sehinga akhirnya pada edisi 10 Juli 1954 majalah *Suara Partai Masjumi* dan *Berita Masjumi* digabungkan menjadi satu dan berubah nama menjadi *Suara Masjumi* dalam bentuk tabloid yang terbit tiap bulannya pada tanggal 1, 10 dan 20, sampai dengan edisi (terakhir?) 20 Juli 1957 yang peneliti peroleh dari Perpustakaan Nasional RI, Jakarta. Lihat, *Suara Partai Masjumi,* No. 7-8, th. Ke-6, Agustus-September 1950, hlm. 21 dan *Suara Masjumi,* No. 1, Th. IX. 10 Juli 1954, hlm. 1.

[8] *Berita Masjumi,* semacam "*newslatter*" yang sebelumnya bernama *Suara Masjumi.* Lihat, No. 7-8, Th. Ke-6, Agustus-September 1950. hlm. 21

[9] Majalah *Hikmah* berada pada masa krisis setelah para pemimpin Masyumi seperti Mohammad Natsir, Burhanuddin Harahap dan Sjafruddin Prawiranegara bergabung dengan PRRI, yang oleh presiden Soekarno dianggap "pemberontak". Pemimpin redaksi diambil alih oleh Nawawi Duski sampai dengan edisi terakhir setelah Masyumi dinyatakan membubarkan diri Agustus 1960.

[10] "Kursus Politik" dalam *Berita Partai Masjumi*, No. 3-4, April-Mei 1950, hlm. 11.

[11] *Ibid.*, hlm. 9.

[12] "Kursus Kader Masjumi di Djakarta." *Berita Partai Masjumi*. No. 5-6, Th. Ke-5 (Juni-Juli 1950), hlm. 7.

PENUTUP

"KEGAGALAN" Masyumi memperjuangkan cita-cita politik Islam di panggung politik Demokrasi Liberal hingga pada akhirnya terpaksa bubar pada Agustus 1960, ternyata telah meninggalkan warisan nilai-nilai politik yang terus-menerus diteladani oleh generasi berikutnya khususnya kalangan muda Islam "Keluarga Bulan Bintang" di Indonesia.[1] Pada pemilihan umum 1999, pemilu demokratis sepanjang sejarah politik Indonesia modern setelah pemilu 1955, nama besar partai Masyumi telah mendorong lahirnya partai-partai baru yang mengklaim telah memiliki hubungan dengan Masyumi, seperti Partai Bulan Bintang (PBB) partai Masyumi Baru (PMB) dan Partai Politik Islam Indonesia Masyumi (PPIIM). PBB mengaku memiliki hubungan psikologis dengan Masyumi terutama karena pembentukannya banyak didukung bekas eksponen Masyumi di Dewan Dakwah

Islamiyah Indonesia (DDII) seperti Anwar Harjono.[2]

Partai Masyumi baru merasa pembentukannya telah diilhami oleh moralitas politik yang tinggi dari para tokoh Masyumi seperti Mohammad Natsir, Prawoto Mangkusasmito dan Muhammad Roem.[3] Hal paling mengherankan adalah pembentukan PPIIM diakui sebagai *reinkarnasi* "Masyumi Lama" yang didirikan pada 7 November 1945 di Yogyakarta dan dihidupkan kembali pada 28 Agustus 1998.[4] Sayangnya nostalgia politik partai-partai tersebut dalam politik real tidak meyakinkan diri sebagai "pewaris sejarah" Masyumi di era Demokrasi Liberal, yang meraih posisi suara terbanyak kedua dalam pemilu 1955, karena PBB hanya mendapatkan 13 kursi dan satu kursi untuk PPIM, sedangkan PMB sama sekali tidak mendapatkan kursi di DPR.[5]

Fakta di atas menggambarkan betapa peran penting Masyumi di masa Demokrasi Liberal tidak pernah tergantikan kebesarannya oleh "partai-partai penerus" Masyumi dalam sejarah politik Indonesia modern. Di awal orde baru, misalnya, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) telah dibentuk dan ikut pemilu 1971, yang sebagian besar pengurusnya masih memiliki akar genealogis dengan Masyumi, namun tidak berhasil "menandingi kebesaran Masyumi lama" dalam perolehan suara dan kursi di DPR.

Sungguhpun begitu, makna penting dari aspek pendidikan politik yang patut dikemukakan di sini adalah apakah yang patut diteladani dari pelajaran politik perjuangan Masyumi menghadapi komunisme di panggung Demokrasi Liberal itu. Dari situ keterbukaan terhadap setiap wacara pemikiran di luar Islam sudah seharusnya dimiliki oleh umat Islam sehingga tidak terjebak pada demagogi dan apologi ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan konkret kebangsaan dan keumatan. Demikian pula terhadap ideologi

komunisme sudah sewajarnya apabila umat didewasakan melalui perluasan penyebaran pengetahuan, pemahaman dan keyakinan bahwa Islam itu tidak sekedar di atas dan dapat mengatasi tawaran-tawaran ideologis ataupun pragmatis ajaran komunisme.

Pengalaman perjuangan Masyumi menghadapi komunisme seharusnya menjadi pelajaran bahwa memperjuangkan Islam tidak semata-mata harus melalui forum politik formal sebagai sarana utama, tetapi juga dapat dilakukan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik di bidang pendidikan ekonomi, sosial maupun budaya.

Kesopanan politik (*fatsoen politik*) yang dicontohkan para tokoh Masyumi dalam menghadapi perbedaan ideologi/kelompok sudah seharusnya menjadi teladan dalam proses pendidikan politik umat sehingga menjadikan umat semakin dewasa dengan segenap perbedaan dan dinamika politik.

Di luar masalah pertarungan politik Masyumi dengan PKI, dan kegagalan dari keduanya untuk mewujudkan cita-cita politiknya masing-masing, maka ada beberapa hal yang perlu dikemukakan di sini. Kedua partai (Masyumi dan PKI) sama-sama mengalami nasib tragis. Masyumi dipaksa membubarkan diri dengan alasan politis. Selain karena sebagian kecil elit Masyumi turut PRRI, juga ada stigma berupa ancaman atas ide pembentukan negara Islam sebagaimana tergambar dalam retorika anggota-anggota Masyumi di Konstituante.

Stigma "Negara Islam" yang melekat di kalangan Masyumi terutama karena sejumlah individu Masyumi yang memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh Darul Islam di Jawa Barat, sebagaimana disebut pada Bab II, diperkukuh dalam materi kampanye Pemilu 1955 dan perdebatan tentang dasar

negara di Konstituante. Stigma ini, pada masa Orde begitu ampuh dipakai untuk melumpuhkan kekuatan-kekuatan Islam politik dengan cap "ekstrim kanan." Di era reformasi, ancaman ide "Negara Islam" sering diarahkan kepada gagasan menghidupkan kembali "Piagam Jakarta" yang menyuarakan agar syariat Islam diberlakukan bagi para pemeluk Islam di Indonesia.

Nasib yang sangat buruk justru menimpa PKI. Selain dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia, para anggota, simpatisan, dan anggota keluarganya mengalami penderitaan lahir dan batin sebagai manusia dan warga negara. Tidak hanya mengalami perlakuan yang tidak adil di bidang hukum, karena dipenjara atau dihukum tanpa proses pengadilan yang sah, mereka juga "dimatikan" hak-hak politik dan hak-hak perdatanya.

Sejak dinyatakan sebagai partai terlarang pada 12 Maret 1966 setelah PKI dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965 (G 30 S),[6] tidak hanya anggota partai (PKI), para anggota keluarganya, dan anak-anak keturunannya pun menderita stigma komunis. Selain tidak memiliki hak-hak politik seperti menjadi anggota legislatif di masa Orde Baru hingga Pemilu 2004, hak-hak perdata (ekonomi) mereka seperti bekerja di sektor publik (sebagai PNS atau TNI/Polri) maupun di sektor swasta pun dicabut. Mereka yang dicap sebagai "anggota PKI atau anak-keturunan PKI", tampak seperti warga negara yang berada di bawah "pengampuan negara" karena dipandang "disabled" atau "cacat" sebagai warga negara.

Perihal stigma komunis tersebut, menarik sekali pendapat Franz Magnis-Suseno[7] yang menyatakan bahwa keterlibatan apa pun partai sebagai organisasi (partai) seharusnya tidak dibebankan kepada anggota-anggotanya. Menurut Franz Magnis-Suseno, jika betul versi[8] yang

menyatakan bahwa PKI terlibat G 30 S, hal itu tidak berarti bahwa orang yang menjadi anggota PKI dinyatakan bersalah. Kecuali mereka terbukti terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan peristiwa G 30 S.[9]

Kembali kepada topik utama buku ini, persoalan komunis yang selalu dianggap ancaman bagi bangsa ini, khususnya bagi umat Islam yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia, tampaknya perlu refleksi dan kaji ulang terhadap relevansi "ancaman komunis." Untuk itu perlu disadari bahwa ancaman bahaya komunis adalah sama bahayanya dengan kejahatan korupsi atau kejahatan kemanusiaan dalam bentuk apapun. Dengan tanpa mengabaikan prosedur hukum, maka hukuman sosial bagi para pelaku korupsi (apalagi oleh pejabat publik) atau pelaku kejahatan kemanusiaan seharusnya akan sama dengan yang telah diterima terhadap mereka yang dicap komunis/PKI, sampai anak-keturunannya tetap dicap sebagai anak koruptor atau penjahat kemanusiaan.

Dalam kehidupan bernegara, kekhawatiran atas bangkitnya komunisme seharusnya dimulai dari upaya menghapus kondisi yang menyuburkan komunisme itu sendiri. Kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, dan diskriminasi perlakuan hukum adalah beberapa contoh kondisi yang memungkinkan hadirnya komunisme sampai kapan pun di negeri ini. Sebagai ide, komunisme telah menawarkan sejumlah gagasan perlawanan terhadap ketimpangan dan ketidakadilan sistem sosial. Bagi kelompok (umat) Islam sendiri, ancaman bahaya komunis tidak seharusnya hanya diujudkan dengan fatwa-fatwa anti-komunis, tetapi perlu langkah konkret menghapus biang yang menyuburkan komunisme: kemiskinan dalam aspek yang luas.

Catatan

[1] Kelompok organisasi yang dikelompokkan sebagai bagian "Keluarga Bulan Bintang" adalah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Pelajar Islam Indonesia (PII) dan kadang-kadang—diakui atau tidak— termasuk pula Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

[2] "Partai Bulan Bintang" dalam API, Almanak Parpol Indonesia Pemilu 1999, (Jakarta : Almanak Parpol Indonesia 1999), hlm. 168

[3] "Partai Masyumi Baru" dalam *Ibid.*, hlm. 342.

[4] "Partai Politik Islam Indonesia" dalam *Ibid.*, hlm. 466.

[5] Secara nasional PBB meraih 2.049.708 (1,94%), PPIM 456.718 suara (0,43%), dan PMB 152.589 suara (0,14%). Jika dijumlah, maka secara keseluruhan ketiga partai "pewaris Masyumi" ini hanya memperoleh 2,51 % (2.659.015 suara) saja. Sumber Komisi Pemilihan Umum (1999) sebagaimana dilaporkan dalam "1999 General Election - Provisional Results for DPR", *The Jakarta Post,* 16 Juli 1999, hlm. 7.

[6] PKI sebagai partai terlarang di Indonesia diperkuat oleh Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966. Tap MPRS ini hingga sekarang belum dicabut dan ditafsirkan sebagai alasan untuk melarang bekas anggota PKI menduduki jabatan-jabatan publik.

[7] Pernyataan Franz-Magnis Suseno ini disampaikan pada 18 Pebruari 2004 dalam posisinya sebagai saksi ahli di dalam kasus *Judicial Review* atas Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Deliar Noer dkk. serta Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru kepada Mahkamah Konstitusi. Lihat, *Kompas,* 19 Pebruari 2004, hlm. 7.

[8] Versi "resmi" tentang keterlibatan PKI dalam G 30 S terutama dapat dijumpai dalam buku Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, 1968. *The Coup Attempt of the September 30 Movement* (Djakarta: PT. Pembimbing Massa). Versi lainnya yang popular, yang membuktikan bahwa G 30 S adalah konflik dan intrik internal kalangan elit tentara (ABRI) saat itu, adalah versi Cornell Paper, yang ditulis Benedict R. Anderson, Ruth T. McVey dan Frederick P. Bunnel, 1971. *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia (Prepared in January 1966).* (Ithaca, NY: Cornell University Press).

[9] *Kompas,* 19 Pebruari 2004, hlm. 7.

DAFTAR PUSTAKA

"1999 General Election – Provisional Result for DPR" 1999. Dalam *The Jakarta Post,* (16 Juli)

Anderson, Benedict R., Ruth T. McVey dan Frederick P. Bunnel, 1971, A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia (Prepared in January 1966), (Ithaca, NY: Cornell University Press).

"Aidit: PKI Sedia Ulurkan Tangan Kpd. Masjumi-PSI". 1954. Dalam *Suara Merdeka,* (30 Desember)

" Amir cs. Pemberontak". 1950. Dalam *Tanah Air.* (4 Nopember).

Anshary, M. Isa. 1953. "Garis Pokok Perdjuangan Masjumi (I)". Dalam *Suara Partai Masjumi.* No.3. Th. VIII (Maret).

_____ 1954. "Islam Menantang Komunisme". Dalam *Bahaja-Merah di Indonesia.* Bandung: Front Anti Komunis.

_____ 1956. "Masjumi adalah All Indonesian Party". Dalam *Suara Masjumi.* No.8, Th. VI (10 Maret).

_____ 1957. "Natsir Kontra Bung Karno tentang Demokrasi". Dalam *Daulah Islamiyah,* No.2, Th. I (Pebruari).

_____ 1957. "Konsepsi Bung Karno Mengancam Kehidupan Agama". Dalam *Daulah Islamiyah,* No.3, Th. I (Maret).

Aswad, Asbiran. 1955, "Tindjauan dalam Negeri" Dalam *Suara Masjumi.* No. 26 Th. X (20 Nopember).

Bajasut, S.U. (Penyunting). 1972. *Alam Fikiran dan Djedjak Perdjuangan Prawoto Mangkusasmita,* Surabaya: Documenta.

Barkat, Abu. 1951. "Peristiwa Penting Bagi Umat Islam Indo-

nesia 17-8-1945 - 17-8-1951". Dalam *Suara Partai Masjumi.* No. 8-9. Th. Ke-6 (November).

Bruinessen, Martin van, 1994. *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Penerjemah Farid Wadjidi. Yogyakarta: LKiS.

"Buku Batjaan Keluarga Partai". 1950. Dalam *Suara Partai Masjumi,* No. 11 Th. Ke-5, (Desember).

"Buruh dan Tani Sebagai Saluran Pengembalian Kepertjajaan Masjarakat". 1955. Dalam *Suara Masjumi,* No. 25 Th. X (10 September).

Busyairi, Badruzzaman. 1989. *Boerhanoeddin Harahap Pilar Demokrasi.* Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Compton, Boyd R. 1993. *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-Surat Rahasia.* Jakarta: LP3ES.

Depagritop CC PKI. 1955. *Masjumi Mendjelang Pemilihan Umum dengan Pemalsuan dan Kepalsuan.* Jakarta: Departemen Agitasi dan Propaganda Central Comitte PKI.

Djaja, Tamar. 1952. "Masyumi dengan Anggota Istimewa dan Otonom". Dalam *Suara Partai Masjumi.* No. 2, Th. Ke-7 (Februari).

_____ 1953. "Masyumi 8 Tahun". Dalam *Suara Partai Masjumi.* No. 10-11, Th. VIII (Oktober-November).

_____ 1956. "Menyambut Muktamar Masjumi". Dalam *Suara Masyumi.* No. 32, Th. XI (20 Desember).

"D.N. Aidit: Kita Menginginkan Pemerintah Jang 10 Kali Lebih Baik Dari Pemerintah Ali, Tetapi Pemerintah Ali 10 X Lebih Baik dari Masjumi-PSI". 1954. Dalam *Harian Rakjat* (9 Desember).

"D.P. Perbepsi Menjambut Baik Keterangan Pemerintah,

Sanggup Siapkan I Bataljon Tiap Karesidenan". 1953. dalam *Nasional* (2 September).

"Dokumentasi Masyumi". 1956. Dalam *Muktamar Masyumi Ke-VIII 22-29 Desember 1956.* Bandung: Panitia Muktamar Masyumi Ke-VIII.

Fealy, Greg. 1996. "Wahab Chasbullah, Traditionalism and the Political Development of Nahdlatul Ulama'," dalam Greg Barton dan Greg Fealy. *Nahdlatul Ulama: Traditional Islam and Modernity in Indonesia.* Clayton, Australia: Monash Asia Institute, Monash University.

Feith, Herbert, dan Lance Castles (Penyunting). 1970. *Indonesian Political Thinking 1945-1965.* Ithaca, New York: Cornell University Press.

Feith, Herbert,. 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia.* Ithaca: Cornell University Press.

_____ 1970. "Introduction". Dalam Herbert Feith, dan Lance Castles (Penyunting). *Indonesian Political Thinking 1945-1965.* Ithaca, New York: Cornell University Press.

_____ 1995. *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin.* penerjemah TIM PSH. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

_____ 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia.* penerjemah Nugroho Katjasungkana, Masri Ramis, dan Parakitri T. Simbolon. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia

"Franz Magnis Suseno: Tap MPRS XXV/1966 Tidak Bisa Jadi Dasar UU Pemilu," 2004, *Kompas,* (19 Pebruari).

Haliday, Fred. 1993. "Cold War" Dalam Joel Krieger (Penyunting). *The Oxford Companion to Politics of the World.* New York dan Oxford University Press.

Hanifah, Abu. 1951. "Politik Luar Negeri". Dalam *Suara Partai Masjumi.* No. 11-12 Th. Ke-6 (Pebruari), hal. 18

"Hanya Undang2 Dasar Islam Jang Bisa Melenjapkan Komunis di Indonesia". 1956. dalam *Suara Masjumi*, No. 10, Th. XI (1 April).

Harahap, Burhanudin. 1952. "Sedjarah PP. 39-51". Dalam *Suara Partai Masjumi.* No. 1, Th. Ke-7 (Pebruari).

"Hasil Perolehan Kursi DPR". 1999. Dalam *Kompas.* (16 Juli).

Hindley, Donald. 1964. *The Comunist Party of Indonesia 1951-1963.* Berkeley dan Los Angeles: University of California Press.

Inilah Chittahku: Hendak Kemana Masjumi? 1953. Jakarta: Departemen Penerangan Pimpinan Partai Masyumi.

Ismail, Faisal. 1999. *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila.* Yogyakarta: PT . Tiara Wacana.

"Kabinet Dr. Sukiman Terbentuk". 1951 Dalam *Berita Masjumi.* No. 73 Th. II (13 April).

"Kabinet Sukiman-Suwirjo Djatuh". 1952 Dalam *Suara Partai Masjumi.* No. 3 Th. Ke-7 (Maret).

Kahin, George Mc Turnan. 1996. *Nationalism and Revolution in Indonesia.* Itacha: Cornell University Press. Cet. Ke-7.

Kami Memanggil !. 1955. Jakarta: DPP Masyumi Bagian Penerangan.

Keputusan2 M.P.R.S. Sidang Umum ke-IV 20 Djuni-6 Djuli 1996. 1996. Yogyakarta: U.P. Indonesia.

"Keterangan Dewan Pimpinan Partai Masjumi". 1951. Dalam *Berita Masjumi.* No. 61 Th. Ke-I (26 Pebruari).

Kompas, 19 Februari 2004.

"Kongres Nahdlatul Ulama' Setudju Pisahkan Diri dari

Masjumi". 1951. Dalam *Berita Masjumi.* No. 135 Th. II (6 Maret).

"Kursus Kader Masjumi di Djakarta". 1950. Dalam *Berita Partai Masjumi.* No. 5-6 Th. Ke-5 (Juni-Juli).

"Kursus Politik". 1950. Dalam *Berita Partai Masjumi.* No. 3-4 (April-Mei).

"Latar Belakang Penghapusan "Nama PKI dan Orang Tak Berpartai". 1955. Dalam *Suara Masjumi.* No. 3, Th. Ke-X (1 Pebruari).

Maarif, Ahmad Syafii. 1987. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstitusi.* Cet ke-2 Jakarta: LP3ES.

_____ 1997. *Islam dan Politik Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965).* Jakarta: Gema Insani Press.

Madiner, Rêmy dan Andrèe Feilard. 1999. "At the Sources of Indonesian Political Islam's Failure: The Spilt between the Nahdlatul Ulama' and the Masyumi in Retrospect". Dalam *Studia Islamika.* No. 2 Vol. 6.

Mahendra, Yusril Ihza. 1999. *Modernisme dan Fundamentalisme Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-Islami (Pakistan).* Jakarta: Penerbit Paramadina.

Mangkusasmita, Prawoto. 1951. "Amanat Wakil Ketua Pimpinan Partai dalam Ulang Tahun Ke VI Masjumi". Dalam *Suara Partai Masjumi.* No. 11/12. Th. Ke-6 (November-Desember).

_____ 1951. "Dalam Memperingati 6 Tahun Masjumi". Dalam *Hikmah.* No. 9. Th. Ke IV, (24 November).

"Masjumi dan Boicot Irian". 1951. Dalam *Suara Partai Masjumi.*

No. 12, Th. Ke-6 (Januari).

"Nahdatul Ulama Resmi Memisahkan Diri dari Masjumi". 1952. Dalam *Berita Masjumi.* No. 142, Th. II, (6 Agustus).

"Nama Daftar PKI dan Orang Jg. Tak Berpartai". 1954. Dalam *Suara Masjumi.* No. 2, Th. IX, (20 Juli).

Nasution, M. Junan. 1952. "PP No. 39 dalam Parlemen". Dalam *Suara Partai Masjumi.* No. 1, Th. Ke-7 (Januari).

Nastir, Mohammad. 1950. *Islam Sebagai Ideologi.* Jakarta: Penerbit Aida. Cet. Ke-2

_____ 1951. "Politik Beleid DPP Masjumi 1950". Dalam *Suara Partai Masjumi.* No. 2, Th. Ke-6 (Pebruari).

_____ 1952. "Djawab Kita". Dalam *Suara Partai Masjumi.* No. 1, Th. Ke-7 (Januari).

_____ 1952. "Soal Keamanan". Dalam *Suara Partai Masjumi.* No. 2, Th. Ke-7 (Pebruari).

_____ 1953. "Detik-Detik Sedjarah Menghadapi Pemilihan". Dalam *Suara Partai Masjumi.* No. 3, Th. ke VIII (Maret).

_____ 1953. "Kemerdekaan Membawa Tanggung Djawab djuga untuk Partai Oposisi". Dalam *Suara Partai Masjumi.* No. 2, Th. ke VIII (Agustus).

_____ 1954. "Bela Dasar Demokrasi Jg. Sedang Terantjam". Dalam *Suara Masjumi.* No. 2 Th. Ke IX (20 Juli).

_____ 1955. "Amanat Ketua Umum Pimpinan Partai Masjumi". Dalam *Suara Masjumi.* No. 25 Th. X (10 September).

_____ 1957. "Beberapa Pikiran Tentang Demokrasi". Dalam *Suara Masjumi.* No. 1 Th. XII (1 Maret).

Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965.* Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Nurdin, M. Rusjad. 1950. "Satu Kekurangan dalam Program

Kabinet Natsir". Dalam *Suara Partai Masjumi.* No. 9-10 Th. Ke-5 (Oktober-Nopember).

"Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)". 1954. Dalam Kementrian Penerangan RI. *Kepartaian dan Parlementaria Indonesia,* Jakarta: Kementrian Penerangan RI, hal. 491-513.

"Partai Masjumi". 1950. Dalam *Kepartaian di Indonesia.* Jakarta: Kementrian Penerangan Republik Indonesia, hlm. 9-21.

"Pembrontak Madiun Bukan Pahlawan Bangsa". 1950. Dalam *Tanah Air.* (1 Nopember).

"Pemerintah Nasional Koalisi dan Bebas dari KMB Keinginan PKI". 1951. Dalam *Tanah Air* (24 Maret).

"Penangkapan2 Atas Orang2 Masjumi". 1951. Dalam *Suara Partai Masjumi.* No. 11/12, Th. Ke-6 (Nopember-Desember).

"Peristiwa 27 Djuni Disebabkan Karena Rongrongan Politik Terhadap TNI". 1955. Dalam *Suara Merdeka* (11 Juli).

"Peristiwa2 Penting dalam Perdjuangan Masjumi Selama 9 Tahun". 1954. dalam *Suara Masjumi.* No. Hari Ulang Tahun IX, (7 Nopember).

Pernjataan Madjlis Sjura 'Masjumi' Djawa Barat". 1954. dalam *Aliran Islam,* No. 65, Th. VIII (Oktober-Nopember-Desember).

"Penjataan Sjamsuridjal: Pendjelasan tentang Masjumi". 1951. Dalam *Berita Masjumi.* No. 72/II, (25 April).

"Perperincian Kursi2 dalam DPR Baru". 1956. Dalam *Suara Masjumi.* No. 7 Th. XI, (1 Maret).

"Persatuan Islam (Persis) Menolak Konsepsi Bung Karno". 1957. Dalam *Suara Masjumi.* No. 1, Th. XII (1 Maret).

"Pidato Moh. Natsir". 1953. Dalam *Suara Partai Masjumi*. No. 9, Th. VIII (September).

"Pidato Moh. Isa Anshary". 1953. Dalam *Suara Partai Masjumi*. No. 9, Th. VIII (September).

"PKI Sanggup Hentikan Opposisinja". 1951. Dalam *Suara Merdeka*. (24 Mei).

"Pokok Perhatian". 1951. Dalam *Suara Partai Masjumi*. No. 12, Th. Ke-6 (Januari).

"Presiden Buka Kongres PDI-P, Pemerintah Usulkan Pemilihan Presiden Langsung". 2000. Dalam *Kompas*. (28 Maret).

Prawiranegara, Sjafrudin. 1948. *Tindjauan Singkat tentang Politiek dan Revolusi Kita*. Yogyakarta: Badan Penerbit Indonesia Raya.

______ 1950. *Islam dalam Pergolakan Dunia*. Bandung: Penerbit Al-Ma'arif.

Pringgodigdo, A. K. 1981. *Tiga Undang-Undang Dasar*. Jakarta: PT. Pembangunan. Cet. Ke-5.

Putusan Konggres P.P.I. Masyumi Ke-VII Tanggal 3 s/d 7 Desember 1954 dan Fatwa 'Alim Ulama' Madjlis Sjuro Pusat. 1955. Medan: Pustaka Sedia. Cet. Ke-2.

"Putusan Madjelis Sjura". 1953. dalam *Suara Partai Masjumi*. No. 3, Th. VIII (Maret).

"Putusan Pimpinan Partai Masjumi tentang Penandatanganan 'Mutual Security Act". 1952. dalam *Berita Masjumi*. No. 127, Th. II (21 Pebruari).

"Rapat Samudra Masjumi Jg. Luar Biasa di Solo". 1955. dalam *Suara Masjumi*. No. 11/12, Th. X (25 April).

Roem, Muhammad. 1951. "Politik Luar Negeri Republik Indonesia Selama 6 Tahun". Dalam *Suara Partai Masjumi*,

No. 8-9, Th. ke-6 (Agustus-September).

______ 1952. "Indonesia dan MSA". Dalam *Suara Partai Masjumi*, No. 3 Th. Ke-7 (Maret).

______ 1971. *Tindjauan Pemilihan Umum I dan II dari Sudut Hukum*. Surabaya: Hudaya Documenta.

______ 1972. *Bunga Rampai dari Sedjarah*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.

"Sekitar Pembentukan Kabinet". 1953. Dalam -*Suara Partai Masjumi*. No. 8 Th. VIII (Agustus).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1985. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta:PT. Citra Lamtoro Gung Persada.

"Seputar Penghapusan Tap MPRS No. XXV". 2000. dalam *Suara Merdeka* (8 April).

"Seruan Ketua Umum Masjumi Moh. Natsir". 1953. Dalam *Suara Partai Masjumi*. No, 8. Th. VIII (Agustus).

Shiraishi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926*. penerjemah: Hilmar Farid. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Soe Hok Gie, 1997. *Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September 1948*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Soebagijo, I.N. 1979. *Wilopo 70 Tahun*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

______ 1980. *Jusuf Wibisono: Karang di Tengah Gelombang*. Jakarta: Gunung Agung.

Soekarno. 1963. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Penerbit di Bawah Bendera Revolusi Jilid I

"Statemen Perbepsi: Madju Terus Membasmi Teror DI, TII dan

Agen2nja". 1953. Dalam *Nasional* (18 Agustus).

"Statemen Dewan Pimpinan Partai Masjumi". 1950. dalam *Suara Partai Masjumi*. No. 9-10 Th. Ke-5 (Oktober-Nopember).

"Susunan Kabinet Pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia" 1950. Dalam *Suara Partai Masjumi*. No. 7-8 Th. Ke-5 (Agustus-September).

Suprapto, Bibit. 1985. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

"Surat Terbuka". 1950 *Suara Partai Masjumi*, No. 11 Th. Ke-5, (Desember).

"Tangkapan Besar2an Aanggota2 Parlemen, Pemimpin2 Kiri". 1951. Dalam *Nasional* (17 Agustus).

"Tangkapan dan Geledehan di Jogja". 1951. Dalam *Nasional* (21 Agustus).

"Tangkapan di Jogja/Magelang". 1951. Dalam *Nasional* (22 Agustus).

Taufiqurrahman. 1950. "Peringatan Ulang Tahun Ke V Partai Politik Islam Masyumi". Dalam *Suara Partai Masjumi*, No. 11, Th. 51, (Desember).

Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante. 1958. Bandung: Konstituante Republik Indonesia. Jilid I-III.

"Tiga Besar Harus Memimpin Kabinet Nanti". 1956. Dalam *Suara Masjumi*, No. 2, Th. XI (10 Januari).

"Tinjauan Dalam Negeri". 1954. Dalam *Suara Masjumi*, No. 7, Th. IX (20 September).

"Tindjauan Dalam Negeri". 1954. Dalam *Suara Masjumi*, No. 16/17, Th. X (20 Desember).

"Tindjauan Dalam Negeri". 1954. Dalam *Suara Masjumi*, No. 9, Th. IX (10 Oktober).

"Tindjauan Dalam Negeri". 1956. Dalam *Suara Masjumi*, No. 10, Th. XI (1 April).

"Tindjauan Dalam Negeri". 1956. Dalam *Suara Masjumi*, No. 13, Th. XI (12 Mei).

"Tindjauan Dalam Negeri". 1956. Dalam *Suara Masjumi*, No. 8, Th. XI (20 Maret).

"Tukar Nama!". 1950. Dalam *Suara Partai Masjumi*, No. 7-8, Th. Ke-6, (Agustus-September).

"Ulang Tahun Ke-XI Masjumi: Masjumi dan Revolusi Indonesia". 1956. Dalam *Suara Masjumi*, No. 30/31, Th. XI (10 Nopember).

Usman, Sjarif. 1951. "Kemerdekaan adalah Djembatan ke Negara Islam Indonesia" dalam *Suara Parta Masjumi*, No. 12, Th. Ke-6 (Januari).

Waspadalah Menghadapi Pemilihan Umum. 1955. Jakarta: Pusat Komite Aksi Pemilihan Umum Masjumi.

Wibisono, Jusuf. 1951. *Islam dan Sosialisme*. Jakarta: Pustaka Islam. Cet. Ke-2. Jilid I.

_____ 1951. "Masjumi di Masa Datang" Dalam *Suara Partai Masjumi*. No. 2, Th. Ke-6 (Pebruari).

_____ 1954. "Kabinet Ali-Wongso Harus Bubar" Dalam *Suara Masjumi*. No. 10, Th. IX (20 Oktober).

_____ 1954. "Pemerintah Ali Timbulkan Kemelaratan Lebih Banjak Pada Rakjat" Dalam *Suara Masjumi*. No. 16/17, Th.X (20 Desember).

Indeks

BIODATA PENULIS

SAMSURI, lahir di Haurgeulis (Kabupaten Indramayu) pada 19 Juni 1972. Lulus Sarjana Pendidikan (S1) dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Yogyakarta dalam bidang Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan pada tahun 1997. Pada tahun 2000 menyelesaikan kajian studi Islam konsentrasi Pendidikan Islam di Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Kini sedang menyelesaikan studi Islam di Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak 2001.

Aktivitasnya selama ini selain sebagai dosen tetap pada Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta (dulu IKIP Yogyakarta) sejak 2002, adalah menjadi anggota redaksi pelaksana *Millah: Jurnal Studi Agama* (sejak 2001) dan sekretaris redaksi *Jurnal Civics* (sejak 2004). Pernah terlibat sebagai anggota tim peneliti dalam penelitian hubungan antar etnis dan iman mahasiswa Yogyakarta (1998) di Institut Dian/Interfidei Yogyakarta, dan staf paruh waktu Pusat Studi Agama-agama (PSAA) Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta (1997/1998). Sumbangan tulisannya yang telah

dibukukan antara lain: "Pemberdayaan Ekonomi Umat, Model Manajemen ZIS di BMT" dalam Pieternella van Doorn-Harder, Kees de Jong dan Djaka Soetapa, *Lima Titik Temu Agama-agama* (Yogyakarta: Duta Wana University Press, 2000); dan "Implikasi Hermeneutika-Kritis Karl Otto Apel terhadap Studi Agama" dalam Nafisul Atho' dan Arif Fahrudin, *Hermeneutika Transendental* (Yogyakarta: Ircisod, 2003).